



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR - ISI

- I. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022**
- II. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022**
- III. LAMPIRAN I : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
- IV. LAMPIRAN II : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
- V. LAMPIRAN III : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
 - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 2. Dinas Kesehatan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 4. Satuan Polisi Pamong
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 9. Dinas Perhubungan
 - 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VI. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

VII. LAMPIRAN V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

VIII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

IX. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022

- X. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022**
- XI. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
- XII. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**
- XIII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH**
- XIV. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**
- XV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN**
- XVI. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2022**
- XVII. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN**
- XVIII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN
2022**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SEMESTA BERENCANA PRROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4872 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. Bahwa sesuai hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, telah mendapat persetujuan bersama untuk penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi *Corona Viruses Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Viruses Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu Lokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
26. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 46);
27. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 29 Desember 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI,



I NYOMAN ADIWIJATAMA, S.Sos., M.Si

Wakil Ketua,

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, SE.M.M,Ak.CA

Wakil Ketua,

I NYOMAN SUYASA, ST

Wakil Ketua,

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., M.A.P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota Se- Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se- Bali;
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RANCANGAN APBD 2022
I.	TUJUAN EVALUASI	
	<p>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menguji kesesuaian Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan:</p> <p>A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>B. kepentingan umum;</p> <p>C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan</p> <p>D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p>	

II.	KEBIJAKAN UMUM	
	<p>Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur, meliputi :</p> <p>A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut :</p>	

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Ursian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
	Nomor	Tanggal	
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali 2022	27 Tahun 2021	28 Juni 2021	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah	S.13/050/3641/Bid.PADFE-BPKAD	18 Agustus 2021	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Provinsi Bali	<u>B.13/903/4101/Bid.PADFE-BPKAD</u> B.08/910/5127/Keu/DPRD	27 September 2021	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan PPAS Pemerintah dan DPRD Provinsi Bali	<u>B.13/903/4102/Bid.PADFE-BPKAD</u> B.08/910/5128/Keu/DPRD	27 September 2021	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.13.045.2/4135/PADFE/BPKAD	29 September 2021	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September/minggu IV bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Provinsi Bali tentang Ranperda APBD	<u>B.13/903/4682/PADFE/BPKAD</u> B.08/910/5876/Keu/DPRD	22 November 2021	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Gubernur Bali untuk dievaluasi	S.13.903/4709/PADFE/BPKAD	23 November 2021	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang akan lebih tertib dalam tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD antara lain:

Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (41) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c. Harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang

	<p>tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>b. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman <i>COVID-19</i> di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.</p> <p>3. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p>	
<p>III.</p>	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM</p>	
	<p>A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp12.193.613.476.231,00, dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :</p>	<p>Target pendapatan daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.044.664.586.100,00</p>

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
	Target	Realisasi		
PENDAPATAN DAERAH	6.092.766.638.277,00	5.315.555.422.204,53	6.033.051.655.837,00	5.044.664.586.100,00
Pendapatan Asli Daerah	3.434.785.985.000,00	2.938.286.641.113,53	3.178.019.403.737,00	3.000.000.000.000,00
Pajak Daerah	2.989.347.879.808,48	2.497.439.893.720,00	2.640.212.076.975,00	2.580.452.740.853,00
Retribusi Daerah	26.452.745.700,00	18.596.348.843,00	12.602.157.400,00	20.224.547.850,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	177.452.629.542,00	177.395.020.194,90	160.711.862.041,00	128.527.641.457,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	241.532.729.949,52	244.855.378.355,63	364.493.307.321,00	270.795.069.840,00
Pendapatan Transfer	2.573.470.371.277,00	2.292.758.499.087,00	2.849.324.252.100,00	2.038.956.586.100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.573.470.371.277,00	2.292.758.499.087,00	2.849.324.252.100,00	2.038.956.586.100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	84.510.282.000,00	84.510.282.004,00	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00
Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.802.282.000,00	78.802.282.000,00		

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.000.000.000.000,00 atau 59,47% dari total pendapatan daerah mengalami penurunan Rp178.019.403.737,00 dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Target Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp434.785.985.000,00 dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi PAD di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.580.452.740.853,00 atau 51,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp59.759.336.122,00 dibandingkan dengan target pajak daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp408.895.138.955,48 dibandingkan dengan target pajak daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:

	<p>1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.255.351.182.365,00; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Rp674.136.937.290,00; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Rp350.000.000.000,00; 4) Pajak Air Permukaan Rp3.200.000.000,00; 5) Pajak Rokok Rp297.764.621.198,00;</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah.</p> <p>Selanjutnya, penganggaran jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor harus berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan</p>	<p>Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dalam Raperda dan Rapergub tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Provinsi Bali dan juga memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah.</p> <p>Penganggaran jenis pajak daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah dialokasikan sesuai Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
--	---	--

sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak provinsi, 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program JKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana . ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

	<p>b. Retribusi Daerah</p> <p>Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp20.224.547.850,00 atau 0,40% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp7.622.390.450,00 dibandingkan dengan target retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp6.228.197.850,00 dibandingkan dengan target Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, besaran target pendapatan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi <i>COVID-19</i> yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.</p> <p>Selanjutnya, penganggaran jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sebagaimana</p>	<p>Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggarkan sudah didasari dengan Peraturan Daerah dan telah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>
--	--	--

	<p>ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp128.527.641.457,00 atau 2,55% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp32.184.220.584,00 dibandingkan dengan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp48.924.988.085,00 dibandingkan dengan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT. BPD Bali Rp58.436.630.618,70 atau 24,57% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp644.920.000.000,00; 2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp1.279.822.630,00 atau 0,20% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp644.912.000.000,00; 3) PT. Puri Raharja Rp823.182.430,00 atau 9,42% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp8.736.000.000,00; 	<p>Penganggaran Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan telah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2021.</p>
--	--	--

- 4) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp173.054.110,00 atau 15,05% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp1.150.000.000,00;

Untuk itu pemerintah Provinsi Bali harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/ atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.1.c.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, untuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), mengingat pada tahun sebelumnya tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan

Terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan, akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengaktifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	<p>restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu melakukan proses <i>due diligence</i> melalui lembaga <i>appraisal</i> yang <i>certified</i> terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus lebih mengefektikan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.</p> <p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Panganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp270.795.069.840,00 atau 5,37% dari total pendapatan daerah. dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 merrgalami penurunan Rp93.698.237.481,00 dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp29.262.339.890,48 dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Harus berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.l.c.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>	<p>Penganggaran Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Pasai 24 ayat (41 dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>
--	--	--

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp395.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedornan pada Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.1.c.1).d).(l).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp6.053.955.100,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 der-.gan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.1.c.1).d).(1).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

	<p>3) Hasil Kerja Sama Daerah Rp210.000.000,00 atau 0,004% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam.Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>4) Jasa Giro Rp10.000.000.000,00 atau 0,20% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>5) Pendapatan Bunga Rp13.000.000.000,00 atau 0,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.1.c.1).d).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Talun 2021.</p>	
--	--	--

Dalam hal pendapatan bunga dimaksud bersumber dari deposito dan/atau investasi jangka pendek hanya diperkenankan dalam rangka manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik serta harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp8.247.410.000,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.l.c.1).d).(1).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp21.488.936.000,00 atau 0,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(l).(k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 8) Pendapatan BLUD Rp211.399.768.740,00 atau 4,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.c.1).d).(1).(o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.038.956.586.100,00 atau 40,42% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

<p>Rp2.038.956.586.100,00 atau 40,42% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan pada objek pendapatan:</p> <p>a. Dana Perimbangan Rp2.018.591.952.100,00 atau 40,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:</p> <p>1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp152.983.625.100,00 lebih kecil Rp4.133.637.900,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Rp157.117.263.000,00.</p> <p>2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.201.511.839.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp1.201.511.839.000,00.</p> <p>3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp82.933.262.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp82.933.262.000,00.</p> <p>4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp581.163.226.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam</p>	<p>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dimana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dialokasikan hanya yang menjadi bagian Provinsi Bali.</p>
--	--

	<p>Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp581.163.226.000,00.</p> <p>b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp20.364.634.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp20.364.634.000,00.</p> <p>Pemerintah Provinsi Bali dalam penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.l.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</p> <p>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.708.000.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sama dengan target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp78.802.282.000,00 dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p>	
--	--	--

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah Rp5.708.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp6.200.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.3).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp6.084.715.842.762,00, dirinci sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
	Target	Realisasi		
BELANJA DAERAH	6.924.582.165.725,65	5.869.811.106.957,59	7.882.948.253.052,00	6.102.490.842.762,00
Belanja Operasi	4.385.912.048.817,52	3.760.234.284.404,52	4.556.561.931.777,00	3.848.916.449.589,00
Belanja Pegawai	1.708.556.108.836,52	1.597.264.190.387,68	1.845.863.854.618,00	1.866.648.545.654,00
Belanja Barang dan Jasa	1.693.384.124.981,00	1.451.856.554.209,40	1.693.479.947.279,00	1.655.432.049.015,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	20.375.000.000,00	17.775.000.000,00
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	4.936.000.000,00	5.000.000.000,00	37.500.000,00
Belanja Hibah	974.971.815.000,00	703.241.539.807,44	1.012.218.129.880,00	308.883.354.920,00
Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	2.936.000.000,00		140.000.000,00
Belanja Modal	481.297.502.589,00	430.473.426.850,04	1.735.407.456.122,00	893.787.683.930,00
Belanja Modal Tanah			962.184.693.264,00	199.942.887.397,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			147.575.058.515,00	86.242.302.660,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			359.949.836.949,00	415.628.230.251,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			202.920.131.388,00	160.324.361.697,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			62.777.736.006,00	31.649.901.925,00
Belanja Tidak Terduga	384.445.657.234,68	353.698.652.901,94	91.118.471.313,00	50.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	384.445.657.234,68	353.698.652.901,94	91.118.471.313,00	50.000.000.000,00
Belanja Transfer	1.672.926.957.084,45	1.325.404.742.801,09	1.499.860.393.840,00	1.309.786.709.243,00
Belanja Bagi Hasil	1.268.007.845.434,45	944.582.291.774,51	1.127.384.356.596,00	1.033.881.670.735,00
Belanja Bantuan Keuangan	404.919.111.650,00	380.822.451.026,58	372.476.037.244,00	275.905.038.508,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp607.059.077.864,00 atau 39,85% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.523.316.671.100,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp317.897.239.760,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp264.363.887.954,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Rp24.797.950.150,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- 2) 100% Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp534.196.200,00 atau 0,11% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp505.771.450.720,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp228.310.200,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp305.886.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari:

- 1) 1090% Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan layanan kesehatan; dan
- 2) 100% Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi mendapatkan layanan kesehatan;

sesuai maksud Peraturan. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Rp51.500.727.369,00 atau 6,17% dari total belanja SKPD Dinas

	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp834.146.184.273,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp39.428.025.935,00; 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp12.072.701.434,00. <p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. <p>sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp651.078.208,00 atau 45,56% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp1.429.125.794,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rp14.753.910,00; 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rp636.324.298,00; 	
--	---	--

	<p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni; 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 <p>e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp17.370.871.222,00 atau 42,20% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Rp41.161.421.325,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp17.370.871.222,00;</p> <p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk provinsi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan Kepala Daerah provinsi memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; 2) 100% Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan 	
--	---	--

	<p>terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan</p> <p>3) 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p> <p>f. SPM Sosial</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp4.941.272.065,00 atau 16,30% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp30.311.083.224,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rp37.624.555,00; 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Rp616.073.555,00; 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rp74.236.155,00; 4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rp3.284.398.200,00; 5) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Rp255.939.600,00; <p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 	
--	---	--

- 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Prioritas Nasional Tahun 2022 meliputi:
 - a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp199.701.840.925,00 atau 3,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha

	<p>Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.</p> <p>Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. <p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp186.047.592,00; 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp13.850.263.083,00; 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp74.771.139.119,00; 	
--	---	--

	<p>4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp25.920.573.106,00;</p> <p>5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp39.061.050.184,00;</p> <p>6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp30.038.670.101,00;</p> <p>7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp57.000.578,00;</p> <p>8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp15.817.097.162,00.</p> <p>b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp24.379.193.003,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan</p>	
--	---	--

	<p>keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.</p> <p>Sasaran pengembangan wilayah Bali pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.</p> <p>c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.169.948.068.956,00 atau 35,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merubakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi <i>COVID-19</i>. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan <i>stunting</i>, pembangunan <i>Science-Techno Park</i>, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk;2) Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif;3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;6) Mengentaskan kemiskinan;7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.	
--	--	--

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp306.869.158,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp33.973.531.371,00;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp506.158.423.019,00;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.523.761.529.038,00;
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,

	<p>organisasi, dan berwirausaha dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.390.099.685,00;</p> <p>6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp55.875.238.119,00;</p> <p>7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp47.482.378.566,00;</p> <p>d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp567.677.920.437,00 atau 9,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi <i>COVID-19</i>. Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 	
--	---	--

	<p>4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;</p> <p>5) Meningkatnya ketahanan. keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;</p> <p>6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.</p> <p>Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:</p> <p>1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp10.416.251.333,00;</p> <p>2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp552.299.141.776,00;</p> <p>3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp182.865.144,00;</p> <p>4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp4.779.662.184,00.</p>	
--	---	--

	<p>e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp983.862.723.357,00 atau 16,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK. <p>Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNS dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp84.700.044.816,00; 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp736.680.724.173,00; 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp26.637.448.743,00; 	
--	--	--

	<p>4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>5) Transformasi Digital (PP5) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp135.844.465.625,00.</p> <p>f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp70.192.953.264,00 atau 1,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak <i>COVID-19</i> menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca pandemi <i>COVID-19</i> pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis, perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (<i>sudden onset</i>) maupun perlahan (<i>slow onset</i>), serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca (GRK). Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; 3) Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>Baseline</i>. 	
--	---	--

	<p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp46.827.044.766,00;2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp23.365.908.498,00;3) Pembangunan Rendah Karbon (PPS) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022. <p>g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dari Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.086.728.142.820,00 atau 34,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan</p>	
--	---	--

	<p>kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara <i>online</i>.</p> <p>Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Tejanganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Konsolidasi Demokrasi (PPI) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp32.556.074.146,00;	
--	---	--

- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan. dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.012.725.993.805,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp41.446.074.869,00.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Prioritas Nasional	R-APBD 2022 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
A	B	C	D
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	199.701.840.925,00	3,27%
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	24.379.193.003,00	0,40
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.169.948.068.956,00	35,56
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	567.677.920.437,00	9,30
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	983.862.723.357,00	16,12
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	70.192.953.264,00	1,15
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2.086.728.142.820,00	34,19
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		6.102.490.842.762,00	100
Total Belanja Daerah		6.102.490.842.762,00	

Alokasi anggaran dalam rangka mendukung prioritas nasional Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (P2) telah tercakup dalam pemenuhan prioritas nasional Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar seperti pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dan penataan Kawasan suci Besakih di Kabupaten Karangasem.

	<p>Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 4 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Bali pada tahun 2022 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Bali 5,50% s.d 6,34%;b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan 1,90% s.d 3,12%; sertac. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka 0,95% s.d 2,00%. <p>Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Provinsi Bali (<i>rebound</i>) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi <i>COVID-19</i> serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.</p> <p>Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi Bali 73,26% s.d 82,99%.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;	
--	---	--

	<p>b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;</p> <p>c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>Omnibus Law</i>, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;</p> <p>d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan</p> <p>e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.</p> <p>Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2022 yang diuraikan dalam Tabel 5 sebagai berikut :</p>	
--	--	--

Tabel 5
Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran Dalam R-APBD 2022 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pangan, Sandang dan Papan	186.725.732.101,00	3,06%
2.	Kesehatan dan Pendidikan	2.065.256.504.082,00	33,84%
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	30.537.404.001,00	0,50%
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	557.078.803.960,00	9,13%
5.	Pariwisata	15.817.097.162,00	0,26%
6.	Penguatan Infrastruktur	914.084.878.703,00	14,98%
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.332.990.422.753,00	38,23%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	6.102.490.842.762,00	100,00%
	Total Belanja Daerah	6.102.490.842.762,00	

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

	<p>2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi <i>COVID-19</i> dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan c. penyediaan jaring pengaman sosial/ <i>social safety net</i>; yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganal pandemi <i>COVID-19</i> yattu Rp134.501.488.757,00 diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan Rp113.368.832.050,00, yang diuraikan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Rp2.227.294.848,00 pada Dinas Kesehatan; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp30.735.528.218,00 pada Dinas Kesehatan; 	
--	---	--

	<p>3) Program Pemberdayaan Masyarakat Rp658.417.000,00 pada Dinas Kesehatan;</p> <p>4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp28.974.605.972,00 pada Dinas Kesehatan;</p> <p>5) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp772.986.012,00 pada Dinas Perhubungan;</p> <p>6) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp50.000.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup Rp13.809.015.274,00, yang diuraikan sebagai berikut :</p> <p>1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp315.246.554,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp609.048.900,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>3) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp362.608.292,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>4) Program Penempatan Tenaga Kerja Rp179.010.100,00 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>5) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp125.150.500,00 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>6) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Rp357.108.592,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;</p> <p>7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp469.284.796,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;</p> <p>8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp99.999.770,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;</p>	
--	---	--

	<p>9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp2.077.500,00;</p> <p>10)Program Pemasaran Pariwisata Rp227.487.896,00 pada Dinas Pariwisata;</p> <p>11)Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Rp117.725.051,00 pada Dinas Pariwisata;</p> <p>12)Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp514.559.014,00 pada Dinas Pariwisata;</p> <p>13)Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp2.819.445.719,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>14)Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp680.832.480,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>15)Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp247.569.418,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>16)Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp659.146.720,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>17)Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp1.080.545.020,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p>	
--	---	--

	<p>18)Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarala Pertanian Rp614.775.580,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>19)Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp494.826.448,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>20)Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp3.748.991. 924,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>21)Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp83.575.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/<i>social safety net</i> Rp7.323.641.433,00, yang diuraikan sebagai berikut :</p> <p>1) Program Rehabilitasi Sosial Rp35.000.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;</p> <p>2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Rp4.214.311.584,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;</p> <p>3) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp3.074.329.849,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p>	
--	---	--

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.559.098.081.063,00 atau 25,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian perhitungan Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	RANCANGAN APBD 2022
		Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	1.558.653.223.125,00
	1) Belanja operasi	1.354.363.497.069,00
	a) Belanja Pegawai	878.129.370.770,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	353.373.246.299,00
	c) Belanja Hibah	122.860.880.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	204.289.726.056,00
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	-
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
2) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	9.999.850,00	
3) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	50.000.140,00	
4) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	209.905.402,00	
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448,00	
6) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	137.476.098,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.559.098.081.063,00
3.	Total Belanja Daerah	6.102.490.842.762,00
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2-3) x 100%	25,55%

	<p>telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Bali.</p> <p>Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rp1.558.653.223.125,00 atau 99,97% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam : <ol style="list-style-type: none"> a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp890.988.467.170,00 atau 57,15% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; b) Program Pengelolaan Pendidikan Rp607.059.077.864,00 atau 38,94% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; <p>Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana pendidikan Rp204.289.726.056,00 atau 13,10% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.</p> 2) Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan Rp444.857.938,00 atau 0,03% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam: 	
--	---	--

	<p>a) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Rp9.999.850,00 atau 0,001% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;</p> <p>b) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Rp50.000.140,00 atau 0,003% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;</p> <p>c) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Rp209.905.402,00 atau 0,013% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;</p> <p>d) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Rp37.476.448,00 atau 0,002% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;</p> <p>e) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Rp137.476.098,00 atau 0,009% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;</p> <p>Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.</p> <p>b. Alokasi Anggaran Kesehatan Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp587.135.461.527,00 atau 10,77% dari total belanja daerah di luar gaji Rp5.450.976.775.079,00, dengan uraian perhitungan Tabel 7 sebagai berikut:</p>	
--	---	--

Tabel 7
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	RANCANGAN APBD 2022
		Jumlah (Rp)
	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	505.771.450.720,00
	1) Belanja Operasi	497.553.252.720,00
	a) Belanja Pegawai	270.588.018.437,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	226.965.234.283,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	8.218.198.000,00
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	81.364.010.807,00
	1) Belanja Transfer	80.977.038.508,00
	Belanja Bantuan Keuangan	80.977.038.508,00
	2) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	386.972.299,00
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	587.135.461.527,00
3.	Total Belanja Daerah	6.102.490.842.762,00
4.	Gaji ASN	651.514.067.683,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	5.450.976.775.079,00
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	10,77%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Provinsi Bali.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut di atas, dialokasikan untuk :

- 1) Program pada Dinas Kesehatan Rp505.771.450.720,00 atau 86,14% dari total anggaran kesehatan, antara lain diuraikan dalam :
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp40.212.395.278,00 atau 6,85% dari total anggaran kesehatan;
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp32.648.248.432,00 atau 5,56% dari total anggaran kesehatan;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan Rp8.218.198.000,00 atau 1,40% dari total anggaran kesehatan.

	<p>2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan Rp81.364.010.807,00 atau 13,86% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Belanja Bantuan Keuangan Rp80.977.038.508,00 atau 13,79% dari total anggaran kesehatan;b) Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Rp386.972.299,00 atau 0,07% dari total anggaran kesehatan; <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan <i>prevalensi stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan <i>preualensi</i> kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya <i>prevalensi stunting</i> (kurus) pada anak balita Rp3.427.418.880,00 atau 0,58% dari total anggaran kesehatan.</p> <p>Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum. <p>Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.352.723.710.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p>	
--	--	--

Tabel 8
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam R-APBD 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum	
	a) DAU	1.201.511.839.000,00
	b) DBH	152.983.625.100,00
	Jumlah Penerimaan	1.354.495.464.100,00
2.	Pengurang	
	a) DAU Tambahan	-
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	1.771.754.100,00
	c) ADD	-
	Jumlah Pengurang	1.771.754.100,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.352.723.710.000,00

Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau Rp338.180.927.500,00 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali Rp26.102.033.144,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam

<p>Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp1.261.835.606,00; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp512.806.992,00; 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp497.351.224,00; 4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp602.497.241,00; <p>belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu Rp36.614.945.056,57 atau terdapat selisih kurang Rp10.512.911.912,57.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:</p>	<p>Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</p>
---	--

	<p>1) Kegiatan pengawasan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoing dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;b) pengawasan prioritas nasional meliputi monitoing dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran <i>responsive</i> gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non penzinan, tindak lanjut prjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;c) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi dan evaluasi pelayanan publik;d) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoing dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, surueg penegakan integritas dan penanganan <i>Whistle Blower System</i>;	
--	--	--

<p>2) Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;</p> <p>3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain; sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Pendidikan dan Pelatihan Rp13.180.268.416,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Rp893.877.114,00; 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp12.286.391.302,00; <p>belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu Rp20.748.468.865,39 atau terdapat selisih kurang Rp7.568.200.449,39.</p>	<p>Pengalokasian anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
---	--

	<p>f. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <p>1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan Rp370.344.596,00;</p> <p>2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp16.709.943.836,00;</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp284.653.544,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada butir E.69 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>g. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS) Rp4.214.311.584,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:</p> <p>1) penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;</p>	
--	---	--

	<p>2) dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, <i>oxymeter</i>, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;</p> <p>3) pemberdayaan desa wisata;</p> <p>4) mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;</p> <p>5) mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.</p> <p>Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir E.65 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>h. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp70.435.800,00 atau 0,001% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp70.435.800,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama</p>	<p>Penyediaan alokasi anggaran untuk FKUB dalam rangka membangun dan merawat kerukunan umat beragama telah melalui koordinasi antara SKPD leading sektor dengan FKUB. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
--	---	--

<p>Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>i. Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial yang dianggarkan Rp537.662.083,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Rp137.662.183,00; 2) Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Rp399.999.900,00; <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi <i>deforestasi</i> dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang Sagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran yang</p>	<p>Penyediaan alokasi anggaran untuk mendukung Program Perhutanan Sosial telah melalui koordinasi dengan SKPD leading. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
---	---

	<p>memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. Belanja Operasi</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp3.848.916.449.589,00 atau 63,07%, dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:</p> <p>a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp1.866.648.545.654,00 atau 30,59%. dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalari peningkatan Rp20.784.691.036,00 dibandingkan dengan Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp 158.092.436.817,48 dibandingkan dengan Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020, telah memenuhi alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:</p> <p>1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp871.789.668.483,00 atau 14,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai</p>	<p>Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN telah mempedomi butir C.2.s.1).a).(7).(a), butir C.2.s.1).a).(7).(b), dan butir C.2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>
--	---	--

Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.2.s. 1).a).(7).(a), butir C.2.s. 1).a). (7).(b), dan butir C.2.s. 1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:
- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp52.646.269.369,00;
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.514.665.657,00;
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.499.039.073,00;
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp156.030.074,00;
 - e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp5.000.000,00;
 - f) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp20.000.000,00;
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.836.800,00;

yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun anggaran 2022 dan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:</p> <p>a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp58.298.132.074,00, yang diperuntukan bagi pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:</p> <p>(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.749.300.000,00;</p> <p>(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.536.485.000,00;</p> <p>(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp221.067.000,00;</p> <p>(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00;</p> <p>(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00;</p> <p>(6) Belanja Tunjangan perumahan DPRD Rp25.957.200.000,00;</p> <p>(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp14.688.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan</p>	
--	---	--

	<p>Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Gubernur Bali yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p> <p>Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah .regara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) peratuian Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.</p> <p>4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp4.764.654.068,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.000.000.000.000,00 yaitu Rp4.500.000.000,00.</p> <p>Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.</p>	<p>Penyediaan alokasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH telah disesuaikan dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp4.500.000.000,00 sesuai dengan amanat pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD.</p>
--	--	--

	<p>5) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan penghasilan ASN Rp543.798.260.706,00 atau 8,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp220.135.184.228,00;</p> <p>b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp1.626.567.000,00;</p> <p>c) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja ASN Rp322.036.509.478,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s. 1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp300.402.781.019,00 atau 4,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p>	<p>Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD telah memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>
--	---	--

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp52.223.526.082,00;
- b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp379.208.065,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir C.2.s.1).a).(7).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.s.1).a).(7).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru Rp205.276.104.000,00;
- d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp3.963.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melaJui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.2.s.1).a).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

	<p>e) Belanja Honorarium Rp9.532.320.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp8.709.000.000,00; (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp199.320.000,00; (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp624.000.000,00; <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Berkaitan dengan itu, penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan butir C.2.s.1).a).(7).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>7) Belanja Pegawai BLUD Rp86.987.700.244,00 atau 1,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79</p>	<p>Penyediaan alokasi anggaran Belanja Honorarium telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standard harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Pemberian honorarium tersebut telah mempedomi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan butir C.2.s.1).a).(7).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>
--	--	--

	<p>Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.655.432.049.015,00 atau 27,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp38.047.898.264,00 dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa dalam peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp37.952.075.966,00 dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dan butir C.2.s.1).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:</p> <p>1) Belanja Barang Rp113.812.416.026,00 atau 1,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Bahan Pakai Habis Rp113.812.416.026,00 atau 1,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	<p>Penyediaan Anggaran Belanja Barang telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata berdasarkan atas Volume pekerjaan serta telah memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s. 1).b).(3).(a).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
--	--	---

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp3.862.913.360,00; (2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Rp16.702.593.147,00; (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp7.339.391.365,00; (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Couer Rp2.236.272.815,00; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp4.439.210.815,00; (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp2.298.634.729,00; (7) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 15.098.916.918,00; (8) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp2.096.693.300,00; (9) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp8.506.599.700,00; (10) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp23.781.885.000,00; (11) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp4.524.112.756,00; (12) Belanja Penambah Minuman Jamuan Tamu Daya Tahan Tubuh Rp3.292.448.040,00; (13) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp2.099.015.000,00; (14) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp2.385.660.000,00; | |
|--|---|--|

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata

yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s. 1).b).(3).(a).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 2) Belanja Jasa Rp619.313.021.638,00 atau 10,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor Rp526.362.529.210,00 atau 8,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.443.650.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 10.012.490.000,00;
 - (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp23.531.633.200,00;
 - (4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp3.652.250.000,00;
 - (5) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp64.081.820.000,00;
 - (6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp75.206.572.272,00;

	<p>(7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp10.192.341.900,00;</p> <p>(8) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp3.610.651.200,00;</p> <p>(9) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp12.195.250.000,00;</p> <p>(10) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp147.728.423.656,00;</p> <p>(11) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp23.714.117.500,00;</p> <p>(12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp27.011.591.286,00;</p> <p>(13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp24.455.516.944,00;</p> <p>(14) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp14.458.830.544,00;</p> <p>(15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp3.607.664.600,00;</p> <p>(16) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp2.584.794.244,00;</p> <p>(17) Belanja Jasa Jalan/Tol Rp2.137.000.000,00;</p> <p>(18) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp14.785.148.538,00;</p> <p>(19) Belanja Tagihan Air Rp2.818.731.882,00;</p> <p>(20) Belanja Tagihan Listrik Rp22.096.259.394,00;</p> <p>(21) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp9.854.504.800,00;</p> <p>(22) Belanja Pengolahan Air Limbah Rp2.914.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp45.570.281.048,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.563.050.000,00;</p>	
--	--	--

	<p>c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Rp48.724.000,00 atau 0,0008% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan Rp48.724.000,00;</p> <p>harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dan 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kineq'anya sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>d) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp45.570.281.048,00 atau 1,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali'tentang APBD Tahun Arrggalan 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp17.335.842.480,00;</p>	<p>Penyediaan Anggaran Belanja Jasa telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam mencapai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
--	--	---

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp12.947.419.452,00;
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp12.947.116.752,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).ii.iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah Rp6.000.000,00 atau 0,00010% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp6.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp5.949.183.400,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp1.847.068.400,00;
 - (b) Belanja Sewa Komputer Jaringan Rp875.450.000,00;

Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan atau asuransi telah dialokasikan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan. Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengintegrasikan seluruh jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1).b).(3).(b).ii.iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- (c) Belanja Sewa *Personal Computer* Rp760.000.000,00;
- (d) Belanja Sewa Peralatan Komputer Rp750.000.000,00;

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp8.742.382.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp898.900.000,00;
- (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.968.800.000,00;
- (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp3.960.000.000,00.

(4) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp4.000.000,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya Rp4.000.000,00;

(5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp1.414.800.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa *Audio Visual* Rp790.000.000,00;
- (b) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp542.800.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan

	<p>nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>f) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp23.183.465.280,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp 1.323.7 29.7 20,00</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp17.246.767.960,00;</p>	<p>Penyediaan anggaran belanja sewa telah berdasarkan kebutuhan riil dan dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi telah berdasarkan konsep <i>full costing</i> atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).viii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Dan dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan aspek urgensi, efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
--	---	--

	<p>(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp1.838.380.000,00</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp1.255.953.600,00</p> <p>(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp3.681.902.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi Rp470.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layalan-Jasa Survei Rp958.152.00,00</p> <p>(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp1.085.000.000,00</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp585.000.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-rnasing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>	
--	---	--

	<p>Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep <i>full costing</i> atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).viii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021</p> <p>g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.349.754.700,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Rp3.954.754.700,00 (2) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp395. 000.000,00</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum</p>	<p>Pelaksanaan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan akan tetap dilaksanakan secara selektif, efisiensi, efektif, tertib anggaran dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan juga akan dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan <i>COVID-19</i>.</p>
--	--	--

	<p>pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp15.330.431.138,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota.</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan <i>COVID-19</i>, penerapan protokol pencegahan penularan <i>COVID-19</i> serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman <i>COVID-19</i> berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, <i>workshop</i>, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara <i>virtual</i> berbasis teknologi informasi.</p>	
--	---	--

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sebagaimana maksud butir C.2.s. 1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 3) Belanja Pemeliharaan Rp37.374.258.500,00 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp21.623.607.516,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp 1.505.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp7.433.997.000,00
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp3.559.217.000,00
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp1.085.040.000,00

	<p>(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp1 307.610.000,00;</p> <p>(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.075.080.070,00</p> <p>(7) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus Rp1.020.000.000,00</p> <p>(8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer <i>Unit- Personal Computer</i> Rpl. 339.100.000,00;</p> <p>(b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.819.639.484,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp5.519.714.045,00</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp2.829.138.039,00;</p> <p>(c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.862.461.500,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan- Jalan Provinsi Rp3.916.050.928,00;</p>	<p>Penganggaran belanja pemeliharaan telah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir C.2.s. 1).b).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
--	---	---

	<p>(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air-Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp400.000.000,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp648.479.244,00</p> <p>(d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp68.550.00,00 atau 0,0011% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman Rp50.000.000,00.</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir C.2.s. 1).b).(3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>4) Belanja Perjalanan Dinas Rp114.881.396.000,00 atau 1,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p>	<p>Penganggaran belanja perjalanan dinas telah mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas tahun sebelumnya serta telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dan dalam pelaksanaannya tetap dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.</p>
--	---	--

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp101.363.301.000,00 atau 1,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp76.683.400.000,00;
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp23.133.893.000,00
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp1.546.008.000,00;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp13.518.095.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri Rp 13.518.095.000,00

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir C.2.s.1).b).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021. Selanjutnya, penyediaan Anggaran belanja Belanja

Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota dalam rangka penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Guna mencegah terjadinya penularan *COVID-19* Varian *Omicron* di Indonesia, maka Provinsi Bali agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ Hal Hibauan Menunda perjalanan Luar Negeri.

	<p>Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi Bali dan mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan atnan <i>COVID-19</i> di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi</p> <p>5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Rp491.868.698.560,00 atau 8,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja.</p> <p>a) Belanja Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat Rp36.415.800.000,00 atau 0,60% yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp1.949.475.000,00;</p> <p>(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp34.182725.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan</p>	<p>Penganggaran belanja Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat telah berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran.</p>
--	--	--

	<p>akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1).b).(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Rp455.452.898.560,00 atau 7,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain Rp6.220.678.560,00; 2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp449.232.220.000,00; <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dapat dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).b).(3).(e).ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp158.252.100.695,00 atau 2,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi</p>	<p>Penganggaran belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat telah berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).b).(3).(e).ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>
--	---	---

	<p>Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir E.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>7) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp119.930.157.596,00 atau 1,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>c. Belanja Bunga Penganggaran Belanja Bunga Rp17.775.000.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 hanya untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (<i>principal outstanding</i>) berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>d. Belanja Subsidi Penganggaran Belanja Subsidi Rp37.500.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan</p>	
--	---	--

	<p>produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.</p> <p>Dalam hal, belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (<i>full cost recovery</i>), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir C.2.s. 1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Rp309.023.354.920,00 atau 5,06% dari total belanja daerah</p>	
--	--	--

dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang tercantum pada:

- 1) Belanja Hibah Rp308.883.354.920 atau 5,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp703.334.774.960,00 dibandingkan dengan Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp666.088.460.080,00 dibandingkan dengan Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp172.429.619.920,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp4.825.000.000,00
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.931.970.800,00
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp164.522.649.120,00;
 - (4) Belanja Hibah kepada Koperasi Rp150.000.000,00;
 - b) Belanja Hibah Dana BOS Rp119.985.880.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp119.985.880.000,00;
 - c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp16.467.855.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian

objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Rp16.467.855.000,00;

- 2) Belanja Bantuan Sosial Rp140.000.000,00 atau 0,0023% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sama dengan target Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp3.860.000.000,00 dibandingkan dengan Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp140.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp 140.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan

sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 serta butir C.2.s.1).e).(1) dan butir C.2.s.1).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS.

	<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Partai Politik Rp16.467.855.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir C.2.s.1).e).(1).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>7. Belanja Modal</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp893.787.683.930,00 atau 14,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp441.619.772.192,00 dibandingkan dengan Belanja Modal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp412.490.181.341,00 dibandingkan dengan Belanja Modal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).f).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya</p>	<p>Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial telah mempedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penambahan alokasi belanja hibah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang belum tercantum dalam KUA dan PPAS Tahun 2022 merupakan belanja hibah BOS Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan BOS Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahun 2022.</p> <p>Penganggaran belanja modal telah mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir C.2.s.2).c) dan butir C.2.s.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Penganggaran belanja modal juga telah berdasarkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>
--	--	---

	<p>perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).c) dan butir C.2.s.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (<i>new initiative</i>) dan angka dasar (<i>baseline</i>) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur Bali sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Belanja Modal Tanah Rp199.942.887.397,00 atau 3,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp762.241.805.867,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Tanah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali	
--	--	--

tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp199.942.887.397,00, yang diuraikan ke rincian objek belanja :

- 1) Belanja Modal Tanah Persil Rp76.779.266.785,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja :
 - a) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Rp7.500.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp69.279.266.785,00;
- 2) Belanja Modal Lapangan Rp123.163.620.612,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Jalan Rp123.163.620.612,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).h) dan butir C.2.s.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp86.242.302.660,00 atau 1,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp61.332.755.855,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek belanja :

	<p>1) Belanja Modal Alat Besar Rp1.325.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja :</p> <p>a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal <i>Excavator</i> Rp1.100.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Alat Bantu Rp225.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja :</p> <p>(1) Belanja Modal Pompa Rp33.000.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Peralatan Selam Rp192.000.00,00;</p> <p>2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp255.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp255.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp200.000.000,00;</p> <p>3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp31.655.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp31.655.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja :</p> <p>(1) Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i> Rp17.000.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp14.655.000,00;</p> <p>4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp9.784.390.580,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja :</p> <p>a) Belanja Modal Alat Kantor Rp1.630.980.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja;</p> <p>(1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp272.530.000,00</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp1.358.450.000,00</p>	
--	--	--

	<p>b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp7.939.390.580,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Modal Mebel Rp4.664.314.700,00; (2) Belanja Modal Alat Pembersih Rp964.063.180,00; (3) Belanja Modal Alat Pendingin Rp685.536.000,00; (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp1.498.684.700,00 <p>c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat pejabat Rp214.020.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp38.586.600,00 (2) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan pejabat Rp151.833.400,00 <p>5) Belanja Modal Alat Shtdio, Komunikasi, dan pemancar Rp1.692.595.000,00 yang diuraikan ke dalam rinciaa objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Alat Studio Rp1.677.595.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp532.695.000,00 (2) Belanja Modal Peralatan <i>Studio Video</i> dan <i>Film</i> Rp1.067.100.000,00; b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp15.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp15.000.000,00 <p>6) Belanja Modal Komputer Rp5.413.041.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Komputer Unit Rp1.685.285.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Modal <i>Personal Computer</i> Rp1.629.435.000,00; 	
--	--	--

	<p>(2) Belanja Modal Komputer <i>Unit</i> Lainnya Rp55.850.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.727.756.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja;</p> <p>(1) Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i> Rp799.564.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp2.375. 800. 000,00</p> <p>(3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp552.392.600,00;</p> <p>7) Belanja Modal Alat Bantu'Eksplorasi Rp12.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp12.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya Rp12.000.000,00</p> <p>8) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp100.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat SAR Rp 100.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air Rp100.000.000,00;</p> <p>9) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp47.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp47.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincial objek Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp47.500.000,00;</p> <p>c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp415.628.250.251,00 atau 6,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp55.678.393.302,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun</p>	
--	--	--

	<p>Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung Rp415.428.230.251,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp415.42A.230.251,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp4.454.525.000,00; 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp 189.853.886.600,00; 3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat pendidikan Rp 104.874.161.651,00; 4) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp114.300.000.000,00; <p>d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp160.324.361.697,00 atau 2,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 nengalarni penurunan Rp42.595.769.691,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp160.324.361.697,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp145.052.067.752,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Jalan Rp143.432.188.152,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Lainnya Rp 116.693.249.752,00; b) Belanja Modal Jembatan Rp1.619.879.600,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp1.619.879.600,00; 	
--	--	--

	<p>2) Belanja Modal Bangunan Air Rp9.436.097.200,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja :</p> <p>a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp6.785.620.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp6.785.620.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.650.477.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.650.477.200,00;</p> <p>3) Belanja Modal Instalasi Rp1.074.603.034,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp150.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal Rp150.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp924.603.034,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik. Rp924.603.034,00;</p> <p>4) Belanja Modal Jaringan Rp4.761.593.711,00 yang diuraikan ke rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp4.681.593.711,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp4.681.593.711,00</p> <p>b) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp80.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp80.000.000,00;</p> <p>e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp31.649.901.925,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan</p>	
--	--	--

Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 rnetgdami penurunan Rp31.127.834.081,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Tanaman Rp15.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanaman Rp15.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanaman Rp15.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Aset Tidak BerwujudRp724.879.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwrrjud Rp724.879.200,00 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Sofiware Rp358.900.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Talrun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah

yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 1.739.200.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp1.737.700.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran *Radiodiagnostic* Rp1.025.000.000,00 ;
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp1.500.000,00;

2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp11.267.023.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp214.023.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia Rp174.023.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi Rp40.000.000,00;

b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp11.053.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp 11.053.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan puma jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

f) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp50.442.986.580,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp50.442.986.580,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp50.442.986.580,00;

2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp30.760.022.725,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp30.760.022.725,00 yang hanya diuraikan ke dalam

sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
Rp30.760.022.725,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir E.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

g) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp200.000.000,00;

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp200.000.000,00;

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp150.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp150.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp150.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>8. Belanja Tidak Terduga</p> <p>Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan <i>COVID-19</i> dan dampaknya serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dan butir C.2.s.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp50.000.000.000,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp41.118.471.313,00 dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp334.445.657.234,68 dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>	<p>Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga telah dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan capaian realisasi belanja tidak terduga pada tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.</p>
--	---	--

Guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi *COVID-19* atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah Provinsi Bali agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2022 5% (lima persen)-10% (sepuluh persen) dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.

9. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp1.309.786.709.243,00 atau 21,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.033.881.670.735,00 atau 16,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
 $\text{Rp}1.255.351.182.365,00 \times 30\% = \text{Rp}376.605.354.709,50$;
- 2) Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 $\text{Rp}674.136.937.290,00 \times 30\% = \text{Rp}202.241.081.187,00$;
- 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 $\text{Rp}350.000.000.000,00 \times 70\% : \text{Rp}245.000.000.000,00$;
- 4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
 $\text{Rp}3.200.000.000,00 \times 50\% = \text{Rp}1.600.000.000,00$;
- 5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok
 $\text{Rp}297.764.621.198,00 \times 70\% = \text{Rp}208.435.234.838,60$.

Pemerintah Provinsi Bali harus menganggarkan alokasi untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum

dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai amanat Pasal 94 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.2.s.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (71) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.4).b).(l).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp275.905.038.508,00 atau 4,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp232.747.038.508,00 atau 3,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp43.158.000.000,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dilam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pemenuhan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/ kota tahun-tahun sebelumnya yang menjadi hak kabupaten/ kota. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.a).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagaimana Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
	Target	Realisasi		
PENDAPATAN DAERAH	6.092.766.638.277,00	5.315.555.422.204,53	6.033.051.655.837,00	5.044.664.586.100,00
Pendapatan Asli Daerah	3.434.785.985.000,00	2.938.286.641.113,53	3.178.019.403.737,00	3.000.000.000.000,00
Pajak Daerah	2.989.347.879.808,48	2.497.439.893.720,00	2.640.212.076.975,00	2.580.452.740.853,00
Retribusi Daerah	26.452.745.700,00	18.596.348.843,00	12.602.157.400,00	20.224.547.850,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	177.452.629.542,00	177.395.020.194,90	160.711.862.041,00	128.527.641.457,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	241.532.729.949,52	244.855.378.355,63	364.493.307.321,00	270.795.069.840,00
Pendapatan Transfer	2.573.470.371.277,00	2.292.758.499.087,00	2.849.324.252.100,00	2.038.956.586.100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.573.470.371.277,00	2.292.758.499.087,00	2.849.324.252.100,00	2.038.956.586.100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	84.510.282.000,00	84.510.282.004,00	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00
Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.802.282.000,00	78.802.282.000,00		

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan

penerimaan pembiayaan Rp1.157.826.256.662,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp1.157.826.256.662,00 atau 18,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp6.102.490.842.762,00. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.3.c. 1).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp100.000.000.000,00, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Rp 100.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

	<p>Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 4) sumber dana cadangan; dan <p>Penggunaan dana cadangan dimaksud harus diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam I (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan tersebut juga dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DAK; 2) pinjaman daerah; dan 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>untuk selanjutnya dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir C.3.c.2).b).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>	<p>Pembentukan Dana Cadangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.</p>
--	--	---

<p>IV</p>	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS</p>	
	<p>A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan peraturan Daerah dengan RKPD.</p> <p>Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD dan KUA/PPAS.</p> <p>Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD</p>	<p>Perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah serta dinamika pembahasan dengan DPRD. Pemerintah Provinsi akan tetap berupaya konsisten dalam rangka penyelesaian target-target RPJMD.</p>

<p>Tahun Anggaran 2022 telah berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>Namun, berkaitan, dengan hal tersebut masih terdapat perbedaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengarr RKPD, KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Bali antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer yang dianggarkan pada Program pengelolaan pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Dinas pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang praktik Siswa yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatar pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Provinsi yang dianggarkan pada program perlindungan Perempuan, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerahprovinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak; 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaanpelaksanaan Penanaman Modal yang dianggarkan pada program pengendalian Pelaksanaan penanarnan Modal, Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah provinsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu; 	<p>Adanya perbedaan/penambahan kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS karena mengakomodir pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik dan DAK Fisik Tahun 2022, serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pencapaian target Pembangunan Daerah Tahun 2022.</p> <p>Terhadap hal tersebut, telah dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara Gubernur Bali dengan Pimpinan DPRD Provinsi Bali yang menyatakan bahwa penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud benar merupakan kebijakan nasional atau provinsi.</p>
---	--

5. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Permuseuman, Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi pada Dinas Kebudayaan;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali harus konsisten dalam pengalokasian anggaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 265 ayat (3) dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 17 ayat (21) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, dengan program dan kegiatan yang target kinerja tercantum pada KUA dan PPAS yang berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan secara konsisten Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang target kinerja yang menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah Provinsi Bali harus menyusun surat berita acara kesepatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD yang menyatakan bahwa penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud benar merupakan kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari

	<p>peraturan perundang-undangan yang rebih tinggi setelah RKPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 94 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.</p>	
V	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD</p>	
	<p>Kesesuaian program pada Rancangan peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan Kepala Daerah Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp8.850.201.309.272,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp6. 102.490.842.762,00; 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 143 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan peraturan Daerah provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah 120 program; <p>Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Bali.</p>	

VI.	REKOMENDASI	
	<p>Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut :</p> <p>A. Pemerintah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Butir D.1.b Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>B. Pemerintah Provinsi Bali harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan. Masing-masing Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan <i>COVID-19</i> dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman <i>COVID-19</i> di berbagai aspek kehidupan, baik aspek Pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah provinsi Bali dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan</p>	

<p>daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi <i>COVID-19</i> dan, dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman <i>COVID-19</i> di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; 2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan 3. penyediaan jaring pengaman sosial/ <i>social safety net</i>; <p>sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.</p> <p>C. Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana ditegaskan dalam butir c.1.c.1)a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pemberian insentif antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM; 2. Pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi 2% (dua persen). <p>D. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali agar mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM</p>	<p>Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan Kebijakan terkait pemberian insentif, diskon pajak, serta pembebasan bunga dan denda yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak serta penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021.</p> <p>Pemerintah Provinsi Bali secara bertahap akan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan.</p>
--	--

	<p>dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.</p> <p>E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (41) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>F. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Bali agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>G. Sasaran utama pengembangan Wilayah Bali pada tahun, 2022 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan 1,90% s.d 3,12%, meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan</p>	
--	---	--

tingkat pengangguran terbuka 0,95% s.d 2,00% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi *COVID-19*. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

H. Pemerintah Provinsi Bali agar menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP; dan
3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/ atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali agar memprioritaskan pemberian Tpp kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan mengingat relatif tingginya

	<p>resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.</p> <p>I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>), Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan lelang barang jasa dan belanja modal pada awal tahun dengan berpedoman pada peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>J. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah provinsi Bali harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Keadaan Darurat Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana. yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. <p>Keperluan mendesak meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 	
--	--	--

<p>4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>K. Pemerintah Provinsi Bali agar menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urilsan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.69.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. 3. Pemerintah Provinsi Bali agar mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan <i>prevalensi stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan <i>prevalensi</i> kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya <i>prevalensi wasting</i> (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir E.74.a Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan 	<p>Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan alokasi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penurunan <i>prevalensi stunting</i>, Program Perhutanan Sosial, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Untuk tahun-tahun mendatang akan terus mengupayakan penyediaan anggaran yang merupakan kebijakan nasional dan daerah dimaksud.</p>
--	--

	<p>peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan <i>stunting</i> melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk; b. Dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, <i>oxymeter</i>, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera; c. Pemberdayaan dasa wisma; d. Pendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif; e. Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan. <p>L. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	---	--

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 29 Desember 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.

WAKIL KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.

WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST

WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022**



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp6.102.490.842.762,00 (enam triliun seratus dua miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp5.044.664.586.100,00
b. belanja daerah	<u>Rp6.102.490.842.762,00</u>
defisit	Rp(1.057.826.256.662,00)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp1.157.826.256.662,00
2. pengeluaran	<u>Rp100.000.000.000,00</u>
pembiayaan netto	<u>Rp1.057.826.256.662,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.044.664.586.100,00 (lima triliun empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.580.452.740.853,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp18.224.147.850,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp128.527.641.457,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp272.795.469.840,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.038.956.586.100,00 (dua triliun tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.102.490.842.762,00 (enam triliun seratus dua miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.857.438.485.026,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.867.728.937.199,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.654.600.692.907,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.775.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp317.156.354.920,00 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp878.272.783.493,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp218.591.956.419,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp87.778.617.560,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp379.604.311.282,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp160.199.047.607,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp32.098.850.625,00 (tiga puluh dua miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.316.779.574.243,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.033.881.670.735,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp282.897.903.508,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.157.826.256.662,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yaitu pembentukan dana cadangan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

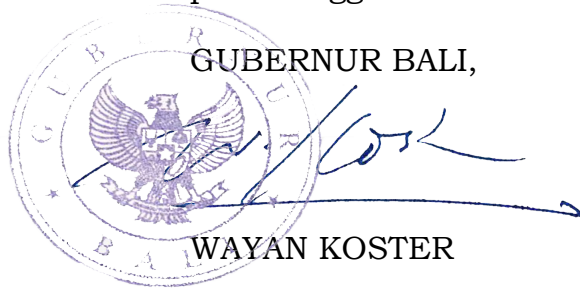
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Desember 2021

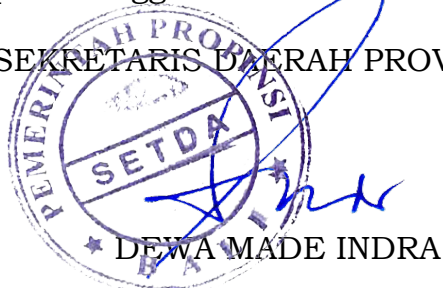
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (11-271/2021)

LAMPIRAN I

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	2.580.452.740.853
4.1.02	Retribusi Daerah	18.224.147.850
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	128.527.641.457
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	272.795.469.840
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.038.956.586.100
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.038.956.586.100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000
	Jumlah Pendapatan	5.044.664.586.100
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.857.438.485.026
5.1.01	Belanja Pegawai	1.867.728.937.199
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.600.692.907
5.1.03	Belanja Bunga	17.775.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	37.500.000
5.1.05	Belanja Hibah	317.156.354.920
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	140.000.000
5.2	BELANJA MODAL	878.272.783.493
5.2.01	Belanja Modal Tanah	218.591.956.419
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.778.617.560
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	379.604.311.282
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.199.047.607
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.098.850.625

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.316.779.574.243
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.033.881.670.735
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	282.897.903.508
	Jumlah Belanja	6.102.490.842.762
	Total Surplus/(Defisit)	(1.057.826.256.662)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.157.826.256.662
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.157.826.256.662
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.157.826.256.662
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000
	Pembiayaan Netto	1.057.826.256.662
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER



LAMPIRAN II

**RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN
ANGGARAN 2022 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI SKPD**

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	216.823.453.740	2.183.889.269.472	762.444.810.413	0	0	2.946.334.079.885
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.159.200.000	1.318.772.374.699	204.949.884.281	0	0	1.523.722.258.980
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.159.200.000	1.287.447.465.837	204.933.084.281	0	0	1.492.380.550.118
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0	3.718.067.989	16.800.000	0	0	3.734.867.989
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0	27.606.840.873	0	0	0	27.606.840.873
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	179.850.193.740	500.842.291.740	8.218.198.000	0	0	509.060.489.740
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	179.850.193.740	80.823.308.268	82.620.000	0	0	80.905.928.268
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0	5.810.959.731	59.348.000	0	0	5.870.307.731
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	0	18.311.392.280	14.662.600	0	0	18.326.054.880
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0	3.768.365.651	49.720.500	0	0	3.818.086.151
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara	0	205.490.333.980	100.000.000	0	0	205.590.333.980

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa	0	102.780.075.798	4.451.210.900	0	0	107.231.286.698
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0	73.852.001.096	3.022.000.000	0	0	76.874.001.096
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	0	10.005.854.936	438.636.000	0	0	10.444.490.936
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35.804.460.000	270.152.455.965	549.212.816.432	0	0	819.365.272.397
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0	3.950.711.354	1.311.023.000	0	0	5.261.734.354
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0	34.255.861.471	597.100.000	0	0	34.852.961.471
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0	12.863.441.500	0	0	0	12.863.441.500
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	35.804.460.000	219.082.441.640	547.304.693.432	0	0	766.387.135.072
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1.429.125.794	0	0	0	1.429.125.794
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1.429.125.794	0	0	0	1.429.125.794
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	62.334.695.020	0	0	0	62.334.695.020
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0	41.417.103.413	0	0	0	41.417.103.413
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	10.822.538.802	0	0	0	10.822.538.802
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0	10.095.052.805	0	0	0	10.095.052.805
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.600.000	30.358.326.254	63.911.700	0	0	30.422.237.954

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.600.000	21.277.354.016	37.750.000	0	0	21.315.104.016
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0	9.080.972.238	26.161.700	0	0	9.107.133.938
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.877.487.000	778.344.402.745	105.861.620.200	0	0	884.206.022.945
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	403.600.000	30.364.734.479	110.000.000	0	0	30.474.734.479
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0	5.629.210.614	110.000.000	0	0	5.739.210.614
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	0	3.373.633.236	0	0	0	3.373.633.236
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	403.600.000	21.361.890.629	0	0	0	21.361.890.629
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	4.778.289.247	7.000.000	0	0	4.785.289.247
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	664.201.100	0	0	0	664.201.100
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0	4.114.088.147	7.000.000	0	0	4.121.088.147
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	2.662.190.042	0	0	0	2.662.190.042
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1.175.445.846	0	0	0	1.175.445.846
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	1.486.744.196	0	0	0	1.486.744.196
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	162.888.950	0	0	0	162.888.950

2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	162.888.950	0	0	0	162.888.950
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	8.961.192.627	16.416.000	0	0	8.977.608.627
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	447.762.411	0	0	0	447.762.411
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0	2.030.584.772	16.416.000	0	0	2.047.000.772
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0	6.482.845.444	0	0	0	6.482.845.444
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	306.869.158	0	0	0	306.869.158
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	306.869.158	0	0	0	306.869.158
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	21.282.620.259	0	0	0	21.282.620.259
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	21.282.620.259	0	0	0	21.282.620.259
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000	27.409.951.074	60.496.000	0	0	27.470.447.074
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	213.600.000	15.902.483.304	12.996.000	0	0	15.915.479.304
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0	2.136.201.076	0	0	0	2.136.201.076

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0	5.487.796.555	0	0	0	5.487.796.555
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perlengkapan Jalan	0	2.098.704.574	47.500.000	0	0	2.146.204.574
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0	1.784.765.565	0	0	0	1.784.765.565
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	47.494.561.328	103.961.009.000	0	0	151.455.570.328
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	47.494.561.328	103.961.009.000	0	0	151.455.570.328
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	22.441.608.190	0	0	0	22.441.608.190
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	16.821.780.062	0	0	0	16.821.780.062
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0	5.619.828.128	0	0	0	5.619.828.128
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.219.595.000	22.730.052.235	27.900.000	0	0	22.757.952.235
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.219.595.000	22.730.052.235	27.900.000	0	0	22.757.952.235
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	35.336.552.025	0	0	0	35.336.552.025
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	35.336.552.025	0	0	0	35.336.552.025
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	486.822.218	0	0	0	486.822.218
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	486.822.218	0	0	0	486.822.218
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	341.503.236	0	0	0	341.503.236
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	341.503.236	0	0	0	341.503.236

2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.040.692.000	552.625.760.542	1.678.799.200	0	0	554.304.559.742
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	2.040.692.000	58.563.391.026	117.115.000	0	0	58.680.506.026
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0	6.606.014.536	177.308.200	0	0	6.783.322.736
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0	4.385.225.856	201.222.000	0	0	4.586.447.856
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0	5.109.823.132	73.136.000	0	0	5.182.959.132
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	477.961.305.992	1.110.018.000	0	0	479.071.323.992
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	444.857.938	0	0	0	444.857.938
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	0	0	0	0
2	23	4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Organisasi	0	444.857.938	0	0	0	444.857.938
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	164.453.346	0	0	0	164.453.346
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	0	0	0	0
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0	164.453.346	0	0	0	164.453.346
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.551.635.850	184.051.793.071	2.097.340.680	0	0	186.149.133.751
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	313.600.000	25.096.281.797	1.113.620.000	0	0	26.209.901.797
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	313.600.000	13.720.872.146	0	0	0	13.720.872.146
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	0	4.120.097.117	6.000.000	0	0	4.126.097.117
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0	2.816.549.160	0	0	0	2.816.549.160
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	0	2.218.120.636	1.107.620.000	0	0	3.325.740.636
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0	2.220.642.738	0	0	0	2.220.642.738
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	15.960.349.906	0	0	0	15.960.349.906


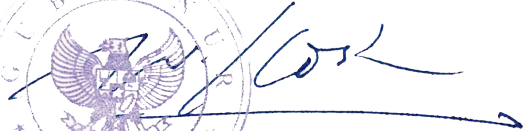
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	0	15.960.349.906	0	0	0	15.960.349.906
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	964.235.850	75.659.362.492	1.102.500	0	0	75.660.464.992
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	964.235.850	63.984.862.935	0	0	0	63.984.862.935
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	712.022.782	0	0	0	712.022.782
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	5.453.269.288	1.102.500	0	0	5.454.371.788
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	3.148.061.037	0	0	0	3.148.061.037
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	2.361.146.450	0	0	0	2.361.146.450
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	248.200.000	43.255.164.689	132.380.000	0	0	43.387.544.689
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	248.200.000	14.879.954.828	124.400.000	0	0	15.004.354.828
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0	6.618.046.571	7.980.000	0	0	6.626.026.571
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0	10.958.034.227	0	0	0	10.958.034.227
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0	6.197.857.683	0	0	0	6.197.857.683
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0	2.498.809.878	0	0	0	2.498.809.878
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0	2.102.461.502	0	0	0	2.102.461.502

3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	186.047.592	0	0	0	186.047.592
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0	186.047.592	0	0	0	186.047.592
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	17.632.467.003	850.238.180	0	0	18.482.705.183
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	15.495.031.751	850.238.180	0	0	16.345.269.931
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0	2.137.435.252	0	0	0	2.137.435.252
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	25.600.000	6.262.119.592	0	0	0	6.262.119.592
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.600.000	4.223.087.542	0	0	0	4.223.087.542
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0	2.039.032.050	0	0	0	2.039.032.050
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	128.527.641.457	360.147.253.816	1.621.172.600	0	0	361.768.426.416
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	128.527.641.457	155.740.169.210	1.486.472.600	0	0	157.226.641.810
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	30.295.073.901	0	0	0	30.295.073.901
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0	76.098.684.308	106.620.000	0	0	76.205.304.308
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0	11.662.827.463	0	0	0	11.662.827.463
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Organisasi	0	16.674.444.951	0	0	0	16.674.444.951
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0006	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	0	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0	21.009.138.587	1.379.852.600	0	0	22.388.991.187
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	204.407.084.606	134.700.000	0	0	204.541.784.606
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	204.407.084.606	134.700.000	0	0	204.541.784.606

5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.685.884.368.053	297.863.416.073	5.626.142.600	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.670.269.132.916
5 01		PERENCANAAN	0	23.573.750.843	146.500.000	0	0	23.720.250.843
5 01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	23.573.750.843	146.500.000	0	0	23.720.250.843
5 02		KEUANGAN	4.678.830.535.423	194.523.875.739	4.290.018.400	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.565.593.468.382
5 02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.076.726.563.470	41.878.505.256	347.329.000	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.409.005.408.499
5 02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	5.992.417.317	0	0	0	5.992.417.317
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	2.602.103.971.953	77.327.521.452	3.942.689.400	0	0	81.270.210.852
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0	8.750.954.169	0	0	0	8.750.954.169
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0	4.349.218.844	0	0	0	4.349.218.844
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0	7.334.523.097	0	0	0	7.334.523.097
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0	13.179.093.826	0	0	0	13.179.093.826
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0	13.019.901.395	0	0	0	13.019.901.395
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0	8.127.492.432	0	0	0	8.127.492.432
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0	5.118.507.347	0	0	0	5.118.507.347

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0	5.263.644.461	0	0	0	5.263.644.461
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0	4.182.096.143	0	0	0	4.182.096.143
5	03		KEPEGAWAIAN	6.959.832.630	25.643.532.295	47.635.000	0	0	25.691.167.295
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	0	0	0
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0	0	0	0	0	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.959.832.630	22.934.912.846	47.635.000	0	0	22.982.547.846
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0	2.708.619.449	0	0	0	2.708.619.449
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	23.692.465.384	697.000.000	0	0	24.389.465.384
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	909.746.594	0	0	0	909.746.594
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	22.782.718.790	697.000.000	0	0	23.479.718.790
5	04	5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	22.821.732.563	421.379.200	0	0	23.243.111.763
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	22.821.732.563	421.379.200	0	0	23.243.111.763
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	94.000.000	7.608.059.249	23.610.000	0	0	7.631.669.249
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	94.000.000	7.608.059.249	23.610.000	0	0	7.631.669.249
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
TOTAL				5.044.664.586.100	3.857.438.485.026	878.272.783.493	50.000.000.000	1.316.779.574.243	6.102.490.842.762


 GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III

**RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN
2022 MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI SKPD,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.159.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.100.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.000	
Jumlah Pendapatan									1.159.200.000	
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.523.722.258.980	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	607.358.889.448	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	318.084.622.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.922.869.628	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.703.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	59.219.869.628	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.273.263.300	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.946.606.328	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02			Penambahan Ruang Kelas Baru	15.913.874.304	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	15.913.874.304	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	672.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.241.874.304	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	617.729.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	617.729.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	585.729.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04				Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1.074.375.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	547.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	547.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2		BELANJA MODAL	1.073.827.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.772.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.009.054.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06				Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	526.654.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	273.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	273.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	526.380.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.386.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	493.993.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07				Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	956.630.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2		BELANJA MODAL	956.630.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.350.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	856.280.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.691.920.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	2		BELANJA MODAL	1.691.920.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.691.920.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	784.691.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	5	2		BELANJA MODAL	784.691.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	784.691.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	21				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	521.500.000	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2		BELANJA MODAL	521.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	521.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	260.750.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	2		BELANJA MODAL	260.750.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.750.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	268.151.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	5	2		BELANJA MODAL	268.151.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	268.151.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	106.061.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	5	2		BELANJA MODAL	106.061.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.061.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.841.775.450	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	1		BELANJA OPERASI	4.230.175.050	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.230.175.050	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2		BELANJA MODAL	611.600.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.100.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	41				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	125.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	41	5	2		BELANJA MODAL	125.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	41	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	481.682.860	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	5	1		BELANJA OPERASI	481.682.860	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	481.682.860	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44.038.300	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	5	1		BELANJA OPERASI	44.038.300	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.038.300	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	57.846.573.388	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	5	1		BELANJA OPERASI	57.846.573.388	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.846.573.388	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14.378.970	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	5	1		BELANJA OPERASI	14.378.970	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.378.970	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	504.578.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	5	1		BELANJA OPERASI	504.578.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	504.578.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	170.560.240.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1		BELANJA OPERASI	139.503.666.195	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.653.636.195	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1	05	Belanja Hibah	36.850.030.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2		BELANJA MODAL	31.056.573.805	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.429.474.380	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.627.099.425	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	21.149.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	5	1		BELANJA OPERASI	21.149.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.149.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	00				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	264.476.317.298	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	12.628.359.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	12.598.359.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	540.520.000	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.057.839.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.152.800.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	1.152.800.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.152.800.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	5.085.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	5.085.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	585.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.500.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	846.197.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2		BELANJA MODAL	846.197.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	846.197.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4.835.355.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1		BELANJA OPERASI	4.835.355.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.835.355.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.970.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	2		BELANJA MODAL	10.970.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.970.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	302.687.050	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	5	1		BELANJA OPERASI	302.687.050	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	302.687.050	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	87.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	5	1		BELANJA OPERASI	87.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49.610.791.718	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	5	1		BELANJA OPERASI	49.610.791.718	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.610.791.718	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	14.267.930	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	5	1		BELANJA OPERASI	14.267.930	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.267.930	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	218.639.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	5	1		BELANJA OPERASI	218.639.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.639.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	178.725.220.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1		BELANJA OPERASI	130.220.540.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.504.680.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1	05	Belanja Hibah	81.715.860.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2		BELANJA MODAL	48.504.680.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.102.808.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.401.872.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Pendidikan Khusus	24.797.950.150	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.589.824.884	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	1.589.824.884	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.589.824.884	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	218.332.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	2		BELANJA MODAL	218.332.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.888.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.443.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	06				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.241.239.460	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	06	5	2		BELANJA MODAL	1.241.239.460	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.570.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.213.669.460	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	10				Pembangunan Kantin Sekolah	1.068.864.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	10	5	2		BELANJA MODAL	1.068.864.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	972.864.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	18				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.289.560.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	18	5	2		BELANJA MODAL	3.289.560.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	18	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.289.560.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	21				Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	193.140.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	21	5	2		BELANJA MODAL	193.140.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	21	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.140.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.094.709.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	5	1		BELANJA OPERASI	1.094.709.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.709.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	27.400.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	5	1		BELANJA OPERASI	27.400.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.548.936.056	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	5	1		BELANJA OPERASI	5.548.936.056	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.548.936.056	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	352.155.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	1		BELANJA OPERASI	279.485.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	279.485.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	2		BELANJA MODAL	72.670.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.670.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.155.530.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1		BELANJA OPERASI	8.227.721.800	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.807.731.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1	05	Belanja Hibah	1.419.990.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2		BELANJA MODAL	1.927.808.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.892.808.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.258.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	5	1		BELANJA OPERASI	18.258.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.258.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	233.380.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	00				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	207.084.950	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	128.276.150	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	128.276.150	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.276.150	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	03				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	46.731.350	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	46.731.350	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.731.350	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	32.077.450	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	32.077.450	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.077.450	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	00				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	26.295.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	26.295.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	26.295.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.295.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29.048.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	00				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	29.048.850	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	29.048.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.048.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.048.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	25.006.696.366	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	00				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.006.696.366	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	02				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25.006.696.366	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.006.696.366	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.006.696.366	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	891.094.243.466	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.742.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.533.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.533.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.533.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.209.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.209.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.209.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	878.319.040.255	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	878.160.194.170	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	878.160.194.170	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	878.160.194.170	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.500.790	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	78.500.790	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.500.790	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80.345.295	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.345.295	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.345.295	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	00				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.990.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	49.990.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	49.990.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.537.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.537.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	27.537.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.537.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.048.782.895	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	740.790.545	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	287.922.545	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	287.922.545	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	452.868.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.868.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.781.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	6.781.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.781.850	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.123.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	74.123.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.123.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.525.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	33.525.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.525.000	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.562.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	193.562.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	193.562.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.103.984.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.103.984.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	2		BELANJA MODAL	2.003.984.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.003.984.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.501.890.088	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	682.653.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	682.653.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	682.653.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.816.237.088	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	6.816.237.088	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.816.237.088	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.014.275.728	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	734.829.728	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	734.829.728	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	734.829.728	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.890.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.890.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	853.876.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	853.876.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	853.876.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.680.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	412.680.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	412.680.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.336.552.025	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	767.258.585	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	00				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	767.258.585	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	767.258.585	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	767.258.585	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	767.258.585	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	34.069.293.440	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	00				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	33.694.293.440	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	33.694.293.440	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	33.694.293.440	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.694.293.440	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	2.000.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	00				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	375.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03				Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	375.000.000	

2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	375.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	5	1	05	Belanja Hibah	375.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	00				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	500.000.000	
Jumlah Belanja										1.559.058.811.005	
Total Surplus/(Defisit)										(1.557.899.611.005)	
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS KESEHATAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAM PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	179.850.193.740	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	3.433.285.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	176.416.908.740	
Jumlah Pendapatan									179.850.193.740	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	509.060.489.740	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.342.076.154	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	16.311.108.308	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03			Pengembangan Rumah Sakit	13.080.947.232	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	9.392.547.232	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.392.547.232	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	3.688.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.528.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07				Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	15				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1.013.437.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	15	5	1		BELANJA OPERASI	1.013.437.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.437.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.986.723.376	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	1.986.723.376	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.986.723.376	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	23.742.713.046	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	228.310.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	228.310.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.310.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	305.886.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	305.886.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	305.886.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	212.374.780	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	212.374.780	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	212.374.780	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.734.644.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.734.644.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.734.644.800	

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	81.465.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	81.465.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.465.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	160.534.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	160.534.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.534.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	347.207.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	307.207.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	307.207.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	2		BELANJA MODAL	40.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	576.505.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	427.033.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	427.033.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2		BELANJA MODAL	149.472.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.472.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	722.335.136	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	722.335.136	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	722.335.136	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.339.429.480	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1		BELANJA OPERASI	17.339.429.480	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.339.429.480	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	19				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	34.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	19	5	1		BELANJA OPERASI	34.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.020.000	

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	34.422.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	34.422.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.522.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.522.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	9.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	253.832.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	253.832.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	253.832.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	253.832.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	32.777.513.792	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	32.777.513.792	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	32.777.513.792	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.777.513.792	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.777.513.792	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	94.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	00				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	94.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	94.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	94.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	435.846.339.794	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.482.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.482.000	

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	31.482.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	31.482.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	194.389.858.535	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	194.341.449.565	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	194.341.449.565	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	194.341.449.565	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.408.970	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	48.408.970	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.408.970	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.172.733.345	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	536.494.955	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	194.066.855	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	194.066.855	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2			BELANJA MODAL	342.428.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.428.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.636.238.390	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.636.238.390	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.636.238.390	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.184.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05					Pengadaan Mebel	29.184.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2			BELANJA MODAL	29.184.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.184.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.077.208.274	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.382.010.402	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.382.010.402	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.382.010.402	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.695.197.872	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	51.695.197.872	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.695.197.872	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.626.146.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	665.652.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	665.652.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	665.652.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.338.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	261.683.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	261.683.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	2		BELANJA MODAL	14.655.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.655.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	528.624.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	528.624.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	528.624.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.155.532.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.155.532.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.155.532.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	00				Peningkatan Pelayanan BLUD	176.369.727.240	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	176.369.727.240	

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	172.425.568.340	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	01	Belanja Pegawai	79.102.825.244	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.322.743.096	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2		BELANJA MODAL	3.944.158.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.594.158.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000	
Jumlah Belanja										509.060.489.740	
Total Surplus/(Defisit)										(329.210.296.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.804.460.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	303.600.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	35.500.860.000	
Jumlah Pendapatan									35.804.460.000	
0	00	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	819.365.272.397	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.712.600.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	00			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.901.101.400	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09			Pembangunan Tanggul Sungai	1.513.837.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	2	BELANJA MODAL	1.513.837.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.513.837.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	18			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.136.640.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	18	5	2	BELANJA MODAL	1.136.640.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	18	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.136.640.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	250.624.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	1	BELANJA OPERASI	250.624.200	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.624.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	00				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.811.499.500	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	763.916.216	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	763.916.216	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	763.916.216	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.038.101.488	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	1		BELANJA OPERASI	252.481.488	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	252.481.488	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	2		BELANJA MODAL	6.785.620.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.785.620.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.009.481.796	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	3.009.481.796	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.009.481.796	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	39.428.025.935	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	00				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	39.428.025.935	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.249.246.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.249.246.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.246.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03				Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	4.831.593.711	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	850.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	3.831.593.711	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.831.593.711	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	33.347.185.888	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	32.750.085.888	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	6.875.215.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.874.870.888	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2		BELANJA MODAL	597.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.072.701.434	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	00				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	12.072.701.434	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	924.603.034	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	924.603.034	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	924.603.034	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.148.098.400	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	11.148.098.400	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.009.660.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.138.438.400	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	0.00	00				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	427.410.477.402	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	00				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	427.410.477.402	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.002.129.220	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.002.129.220	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.060.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	999.069.220	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02				Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	17.832.656.734	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	17.832.656.734	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.832.656.734	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03				Penataan Bangunan dan Lingkungan	408.575.691.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	144.216.777.835	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	702.407.915	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	143.514.369.920	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	264.358.913.613	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	89.728.335.807	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.630.577.806	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	290.224.682.184	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	00				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	290.224.682.184	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	479.941.346	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	479.941.346	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	479.941.346	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	02				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	123.563.620.612	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	400.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	123.163.620.612	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	02	5	2	01	Belanja Modal Tanah	123.163.620.612	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	03				Pengelolaan Leger Jalan	48.204.898	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	48.204.898	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.204.898	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	48.394.898	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	48.394.898	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.394.898	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05				Pembangunan Jalan	116.861.298.909	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	392.937.557	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	392.937.557	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	116.468.361.352	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.468.361.352	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	08				Rekonstruksi Jalan	9.332.501.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	08	5	2		BELANJA MODAL	9.332.501.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	08	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.332.501.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10				Pemeliharaan Berkala Jalan	18.119.122.410	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	2		BELANJA MODAL	18.119.122.410	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.119.122.410	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11				Pemeliharaan Rutin Jalan	14.490.600.101	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	14.490.600.101	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.490.600.101	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	17				Pelebaran Jembatan	1.619.879.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	17	5	2		BELANJA MODAL	1.619.879.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	17	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.619.879.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	4.190.224.923	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	4.190.224.923	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1	01	Belanja Pegawai	6.120.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.184.104.923	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.470.892.587	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	1		BELANJA OPERASI	1.470.892.587	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.470.892.587	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.358.016.098	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	00				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	296.643.077	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	296.643.077	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	296.643.077	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	296.643.077	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	00				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	3.061.373.021	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	01				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2.359.864.416	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.048.841.416	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.841.416	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	1.311.023.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.311.023.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	701.508.605	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	701.508.605	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.998.605	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.173.557.688	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.01	00				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	654.373.132	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.01	01				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	654.373.132	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	654.373.132	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	654.373.132	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	00				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	218.212.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	218.212.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	218.212.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.212.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	00				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	300.971.956	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	173.317.652	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	173.317.652	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	173.317.652	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	127.654.304	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	127.654.304	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.654.304	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.985.210.756	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.488.011	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	423.053.425	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	423.053.425	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	423.053.425	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.434.586	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	317.434.586	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.434.586	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.552.529.609	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.552.529.609	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	26.552.529.609	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	26.552.529.609	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.320.840	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.251.500	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.251.500	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.251.500	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.345.340	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.345.340	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.345.340	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	115.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.376.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	93.376.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.376.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.520.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	37.520.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.640.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	17.640.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.188.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	322.188.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	322.188.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	55.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	5.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.576.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.850.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	549.850.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	549.850.000	

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.726.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	395.726.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	395.726.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.881.195.848	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.404.333.540	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.404.333.540	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.823.540	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.298.452	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	320.298.452	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	320.298.452	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.156.563.856	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.156.563.856	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.156.053.856	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.429.125.794	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.056.670.806	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	00				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	420.346.508	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	14.753.910	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.753.910	

1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.753.910	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	405.592.598	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	405.592.598	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	405.082.598	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	00				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	636.324.298	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	636.324.298	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	636.324.298	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1	01	Belanja Pegawai	1.530.000	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	494.794.298	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	140.000.000	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	372.454.988	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	00				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	372.454.988	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	127.688.700	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	127.688.700	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.178.700	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	229.264.838	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	229.264.838	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	229.264.838	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	15.501.450	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	15.501.450	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.501.450	

2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	162.888.950	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	0.00	00					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	162.888.950	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	00					Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	162.888.950	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	162.888.950	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	162.888.950	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	510.000	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	162.378.950	
Jumlah Belanja											820.957.287.141	
Total Surplus/(Defisit)											(785.152.827.141)	
0	00	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.00.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	41.417.103.413	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.801.725.174	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.633.206.358	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.625.124.694	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.625.124.694	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.625.124.694	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06					Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	74.952.896	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	74.952.896	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	74.952.896	

1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.895.652.320	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	14.895.652.320	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.895.652.320	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	168.518.816	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	168.518.816	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	168.518.816	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	168.518.816	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.615.378.239	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.725.809.319	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.725.809.319	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.725.809.319	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.725.809.319	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.672.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.783.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.783.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.783.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.536.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.536.800	

1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.536.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.130.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	34.130.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.130.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.222.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	64.222.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.222.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.880.272	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	142.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.210.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	80.210.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.210.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924.670.272	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	924.670.272	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	924.670.272	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.468.016.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.468.016.448	

1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.468.016.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.468.016.448	
Jumlah Belanja										41.417.103.413	
Total Surplus/(Defisit)										(41.417.103.413)	
0	00	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BARENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
								Jumlah Pendapatan	0	
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	5	BELANJA			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.917.591.607		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.971.491.900		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	00		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	426.624.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	426.624.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	426.624.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	426.624.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	00		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	524.867.900		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	524.867.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	524.867.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	524.867.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	00		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.020.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.020.000.000	

1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.020.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.020.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.946.099.707	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.376.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.554.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.554.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.821.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.821.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.821.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.180.885.859	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.180.885.859	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	13.180.885.859	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	13.180.885.859	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.104.990	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.910.350	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.910.350	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.910.350	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.628.640	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	25.628.640	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.628.640	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	75.000.000	

1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.566.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.566.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.566.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.760.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.760.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	13.760.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.296.974	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.592.042	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	387.592.042	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	387.592.042	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.204.932	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	355.204.932	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	355.204.932	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.894.675.284	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.835.020.284	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.835.020.284	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.835.020.284	

1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.655.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	59.655.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.655.000	
Jumlah Belanja										20.917.591.607	
Total Surplus/(Defisit)										(20.917.591.607)	
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.600.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	9.600.000	
Jumlah Pendapatan									9.600.000	
0	00	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.422.237.954	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.150.165	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	00			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.530.110	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.110	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.530.110	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.110	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	00			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.620.055	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.620.055	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	38.620.055	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.620.055	

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	0.00	00				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.692.582.335	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	00				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	37.624.555	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01				Penyediaan Permakanan	28.959.755	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.959.755	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.959.755	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	8.664.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	8.664.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.664.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	00				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	616.073.555	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01				Pengasuhan	35.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02				Penyediaan Makanan	190.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	190.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03				Penyediaan Sandang	35.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	15.800.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.800.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30.344.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	30.344.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.344.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	55.926.000	

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	55.926.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.926.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	222.100.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	222.100.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.100.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	5.700.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	26.203.555	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	26.203.555	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.203.555	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	00				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	747.236.155	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01				Penyediaan Permakanan	465.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	465.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	465.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	117.902.500	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	117.902.500	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.902.500	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.599.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	16.599.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.599.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12				Pemulasaraan	137.734.055	

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	5	1		BELANJA OPERASI	137.734.055	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.734.055	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	00				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.284.398.200	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10				Pemulangan ke Daerah Asal	3.284.398.200	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	5	1		BELANJA OPERASI	3.284.398.200	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.284.398.200	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	00				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.870	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02				Penyediaan Sandang	7.249.870	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.249.870	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.249.870	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	0.00	00				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.805.370	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	00				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.805.370	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.805.370	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.805.370	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.805.370	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.939.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	00				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.939.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.939.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	255.939.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	255.939.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.164.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	00				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.164.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.164.000	

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	127.164.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.164.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.300.596.484	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.080.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.834.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.834.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.834.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.246.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.246.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.246.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.243.154.726	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.243.154.726	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.243.154.726	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.243.154.726	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.814.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.357.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.357.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.357.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	49.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.955.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	185.955.000	

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	185.955.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.852.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.852.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.852.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.900.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.991.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.991.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	9.829.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.829.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	14.161.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.161.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.706.040	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.250.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	389.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	389.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	389.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.956.040	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	214.956.040	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.956.040	

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.129.848.818	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.156.924.512	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.156.924.512	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.156.924.512	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	727.034.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	727.034.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	727.034.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.245.889.586	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	2.245.889.586	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.245.889.586	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.785.289.247	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11.100.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	00					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	11.100.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	11.100.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.100.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.100.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	0.00	00					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	381.834.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	00					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000	

2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	112.950.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	112.950.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.950.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	00				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	268.884.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.840.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.840.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	262.044.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	262.044.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	262.044.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.101.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	00				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.101.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.101.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	653.101.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	653.101.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	0.00	00				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	76.806.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	00				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	

2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	76.806.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	76.806.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.806.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.662.448.147	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.152.309.860	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.152.309.860	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.152.309.860	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.152.309.860	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.690.500	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.967.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.967.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.967.100	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	7.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.723.400	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.723.400	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.723.400	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	

2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.447.787	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.545.896	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	124.545.896	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	124.545.896	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.299.668	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	40.299.668	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.299.668	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.602.223	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	327.602.223	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	327.602.223	
Jumlah Belanja											35.207.527.201	
Total Surplus/(Defisit)											(35.197.927.201)	
0	00	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL**

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	403.600.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	403.600.000	
Jumlah Pendapatan											403.600.000	
0	00	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.474.734.479	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	125.150.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	00					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	125.150.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	125.150.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	179.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	00					Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	02					Pelayanan Antar Kerja	179.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	179.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	179.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	0.00	00					PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	178.500.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	00					Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	178.500.000	

2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	27.500.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.500.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	151.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	151.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	151.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.992.073.879	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.673.379.955	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.673.379.955	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.673.379.955	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	25.673.379.955	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.434.440	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.769.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.769.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.769.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.432.440	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	74.432.440	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.432.440	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.250.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	120.250.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.250.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.808.400	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	61.808.400	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.808.400	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	

2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08				Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	2.400.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.774.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	20.774.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.774.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.479.193.220	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.700.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	612.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	612.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.493.220	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	864.493.220	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	864.493.220	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.529.066.264	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.146.667.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.146.667.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.667.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	309.905.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	199.905.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.905.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	110.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000	

2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.072.492.752	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	1.072.492.752	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.072.492.752	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	186.047.592	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	186.047.592	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	00					Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	186.047.592	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07					Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	186.047.592	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	1			BELANJA OPERASI	186.047.592	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	186.047.592	
Jumlah Belanja											30.660.782.071	
Total Surplus/(Defisit)											(30.257.182.071)	
0	00	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
								Jumlah Pendapatan	0	
0	00	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	306.869.158		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	173.673.414		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	00		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	173.673.414		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04		Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	173.673.414		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	173.673.414	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	173.673.414
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	133.195.744		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	00		Pelayanan Pencatatan Sipil	133.195.744		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	133.195.744		
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	133.195.744	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.195.744
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.282.620.259		
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	114.915.006		

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	00					Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	114.915.006	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01					Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	114.915.006	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	114.915.006	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	114.915.006	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	727.309.784	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	00					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	727.309.784	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02					Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	227.318.792	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	227.318.792	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	227.318.792	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	499.990.992	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	499.990.992	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	499.990.992	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	0.00	00					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.037.683.662	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	00					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.037.683.662	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	202.835.892	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	202.835.892	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	202.835.892	

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	357.108.592	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	357.108.592	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	357.108.592	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	213.427.594	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	213.427.594	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	213.427.594	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.264.311.584	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.264.311.584	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.366.311.584	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1	05	Belanja Hibah	898.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.402.711.807	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.187.044	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.659.300	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.659.300	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.659.300	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.527.744	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	196.527.744	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.527.744	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.054.052.229	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.918.921.355	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.918.921.355	

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	12.918.921.355	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.130.874	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	135.130.874	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.130.874	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.205.930	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.495.900	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.495.900	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.495.900	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.146.030	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	19.146.030	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	2.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.146.030	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	93.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.649.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.649.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.649.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.200.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.575.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	7.575.000	

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.140.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	45.140.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.140.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.340.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	7.340.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.532.076	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	250.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.532.076	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	483.532.076	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	483.532.076	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.394.528	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.177.794.528	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.177.794.528	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.794.528	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	38.600.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000	

2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	349.495.851	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	349.495.851	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	00					Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	349.495.851	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02					Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	349.495.851	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	349.495.851	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	349.495.851	
Jumlah Belanja											21.938.985.268	
Total Surplus/(Defisit)											(21.938.985.268)	
0	00	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.00.00.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213.600.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	3.600.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	210.000.000	
								Jumlah Pendapatan	213.600.000	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.470.447.074	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.872.434.124	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	525.156.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	247.666.950	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	200.166.950	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.166.950	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	47.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	277.489.350	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	277.489.350	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	277.489.350	

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	00					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.222.797.596	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	349.811.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1			BELANJA OPERASI	349.811.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	349.811.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02					Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	772.986.012	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1			BELANJA OPERASI	772.986.012	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	772.986.012	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	00					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	25.829.560	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	13.025.960	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.025.960	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.025.960	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	12.803.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	12.803.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.803.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	00					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.586.802.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.586.802.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.586.802.200	

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.586.802.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	00				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	511.848.468	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	511.848.468	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	511.848.468	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	511.848.468	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	691.617.510	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	00				Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	673.937.510	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	673.937.510	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	673.937.510	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	673.937.510	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	00				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	17.680.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	8.840.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.840.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.840.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8.840.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.840.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.840.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	217.150.340	

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	217.150.340	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	217.150.340	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	217.150.340	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.150.340	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.689.245.100	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.789.660	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.512.870	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.512.870	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.512.870	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.276.790	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	13.276.790	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.276.790	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.674.601.529	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.653.028.709	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.653.028.709	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	15.653.028.709	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.572.820	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	21.572.820	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.572.820	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	701.745.505	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.191.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.191.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.191.800	

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.997.725	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	48.001.725	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.001.725	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	12.996.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.996.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.893.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	100.893.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.893.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.971.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.971.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.971.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	26.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.690.280	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	502.690.280	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	502.690.280	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	01	5	1	05	Belanja Hibah	1.200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.570.230	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	292.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	292.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.370.230	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	418.370.230	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	418.370.230	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.370.538.176	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.504.096	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	169.504.096	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	169.504.096	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	885.512.880	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	885.512.880	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	885.512.880	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.610.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	68.610.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.610.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.046.911.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.046.911.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.046.911.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
Jumlah Belanja										27.470.447.074	
Total Surplus/(Defisit)										(27.256.847.074)	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	151.455.570.328	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.846.130.310	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	15.846.130.310	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.775.787.578	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.637.287.578	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.637.287.578	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	2			BELANJA MODAL	138.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9.904.915.644	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	9.904.915.644	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.904.915.644	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06					Pelayanan Informasi Publik	282.027.318	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	282.027.318	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	282.027.318	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.437.653.968	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	2.437.653.968	

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	437.653.968	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1	05	Belanja Hibah	2.000.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	813.654.432	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	813.654.432	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	813.654.432	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	632.091.370	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	466.491.370	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	466.491.370	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	2		BELANJA MODAL	165.600.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.600.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	116.737.802.736	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	00				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	116.737.802.736	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	103.027.334.139	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	817.334.139	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	817.334.139	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2		BELANJA MODAL	102.210.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	5.700.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.130.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.380.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9.235.294.739	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.188.794.739	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.188.794.739	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	1.046.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.046.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.475.173.858	

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.420.273.858	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1	01	Belanja Pegawai	3.570.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.416.703.858	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	2		BELANJA MODAL	54.900.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.900.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.871.637.282	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.090.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.763.590	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.763.590	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.763.590	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.738.970	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.738.970	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.738.970	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.588.340	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.588.340	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.588.340	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.145.964.884	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.875.964.884	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.875.964.884	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	12.875.964.884	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.270.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.270.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	1.270.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.699.650	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.615.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.615.500	

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.615.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	354.987.750	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.122.750	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	5.100.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.022.750	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	328.865.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.865.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.930.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.930.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.930.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.805.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	35.805.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.805.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.361.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	80.361.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.361.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.154.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.154.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	510.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	16.644.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.644.000	

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.135.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.020.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.020.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.605.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	262.605.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	262.605.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.510.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	135.510.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.719.592.848	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.866.980.272	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.866.980.272	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.866.980.272	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	4.800.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.800.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.740.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	149.740.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.740.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.537.138.576	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.537.138.576	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.628.576	

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.934.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	160.934.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.914.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	486.822.218	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	486.822.218	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	00				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	486.822.218	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	220.504.016	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	220.504.016	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.504.016	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03				Membangun Metadata Statistik Sektoral	140.047.996	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	140.047.996	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.047.996	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	126.270.206	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	126.270.206	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.270.206	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	341.503.236	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	341.503.236	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	00				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	212.092.878	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	116.551.978	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	116.551.978	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	116.551.978	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	95.540.900	

2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	95.540.900	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.540.900	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	00				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	129.410.358	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	129.410.358	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	129.410.358	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.410.358	
Jumlah Belanja										152.283.895.782	
Total Surplus/(Defisit)										(152.283.895.782)	
0	00	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Organisasi : 2.17.00.00.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	
0	00	2.17.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA		
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	22.441.608.190	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	255.064.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.956.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.956.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	BELANJA OPERASI	17.956.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	02 Belanja Barang dan Jasa	17.956.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	237.108.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	237.108.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	BELANJA OPERASI	237.108.240	

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.608.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	04	Belanja Subsidi	37.500.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	118.552.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.552.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.844.528.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.844.528.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.844.528.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.844.528.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.844.528.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	468.864.290	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	468.864.290	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	315.246.554	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	315.246.554	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	165.246.554	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	150.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	153.617.736	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	153.617.736	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	153.617.736	

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	609.048.900	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	00				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	609.048.900	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01				Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	609.048.900	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	609.048.900	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	609.048.900	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.145.548.968	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.630.016	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.417.006	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	78.417.006	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.417.006	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.213.010	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.213.010	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.213.010	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.255.730.998	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.255.730.998	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.255.730.998	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	14.255.730.998	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.311.990	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.688.750	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.688.750	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.688.750	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.658.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	67.658.240	

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.658.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.965.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.965.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.965.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.574.563.592	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	319.700.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	319.700.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.251.863.592	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.251.863.592	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.863.592	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.312.372	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.244.984	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	825.244.984	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	825.244.984	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.270.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	53.270.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.270.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.797.388	

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	254.797.388	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	254.797.388	
Jumlah Belanja										22.441.608.190	
Total Surplus/(Defisit)										(22.441.608.190)	
0	00	2.17.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.219.595.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	9.219.595.000	
Jumlah Pendapatan									9.219.595.000	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22.757.952.235	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.080.316	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	84.523.746	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	84.523.746	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	84.523.746	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.523.746	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	365.556.570	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	365.556.570	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	365.556.570	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	365.556.570	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	458.026.986	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	458.026.986	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	168.678.196	

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	168.678.196	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	168.678.196	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	289.348.790	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	289.348.790	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	289.348.790	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.047.798.138	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	00				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.047.798.138	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	820.783.972	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	820.783.972	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	820.783.972	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	227.014.166	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	227.014.166	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	227.014.166	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	792.840.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	792.840.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	655.191.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	655.191.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	655.191.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	137.649.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	137.649.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.649.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	178.381.096	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	178.381.096	

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	178.381.096	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	178.381.096	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.381.096	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.830.824.907	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.361.963.422	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.361.963.422	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	17.361.963.422	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	17.361.963.422	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.975.285	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.638.850	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.638.850	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.638.850	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.177.845	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	41.177.845	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.177.845	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.466.990	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	61.466.990	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.466.990	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.231.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.231.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.231.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.460.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	53.460.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.460.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.900.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.900.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	27.900.000	

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.900.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.333.728.960	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	178.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.155.728.960	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.155.728.960	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.728.960	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.257.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	784.372.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	784.372.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	784.372.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.885.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	131.885.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	131.885.000	
Jumlah Belanja										22.757.952.235	
Total Surplus/(Defisit)										(13.538.357.235)	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN, PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.040.692.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.679.432.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	361.260.000	
Jumlah Pendapatan											2.040.692.000	
0	00	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	75.233.235.750	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	31.281.654.036	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.995.917.436	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.378.938.208	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.378.938.208	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.378.938.208	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3.616.979.228	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.616.979.228	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.616.979.228	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	15.138.780.790	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	13.644.869.035	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	13.644.869.035	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.494.869.035	

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	1.150.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.493.911.755	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.493.911.755	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.493.911.755	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.146.955.810	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	11.146.955.810	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	11.146.955.810	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	427.955.810	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	05	Belanja Hibah	10.719.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.217.138.902	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.217.138.902	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	485.091.100	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	485.091.100	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	485.091.100	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	732.047.802	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	732.047.802	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	732.047.802	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	336.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	336.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	336.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	336.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	336.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	661.513.920	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	124.999.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02				Penetapan Cagar Budaya	124.999.900	

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	124.999.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.999.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	00				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	536.514.020	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02				Pengembangan Cagar Budaya	405.623.020	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	405.623.020	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	405.623.020	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	03				Pemanfaatan Cagar Budaya	130.891.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	130.891.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.891.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.600.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Pengelolaan Museum Provinsi	3.600.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.080.000.280	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.080.000.280	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.280	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.800.000.370	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000.370	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.370	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	719.999.350	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	719.999.350	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	719.999.350	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.136.428.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.609.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.637.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	110.637.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.637.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.972.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.972.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.972.000	

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.334.504.708	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.979.924.976	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.979.924.976	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	21.979.924.976	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	349.539.732	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	349.539.732	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.539.732	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.040.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.040.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.106.518.520	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	363.582.320	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	363.582.320	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	363.582.320	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.324.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	47.073.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.073.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	160.251.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.251.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	287.625.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	287.625.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	287.625.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.611.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	61.611.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.611.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.600.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	43.600.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000	

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	18.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.775.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	124.775.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.775.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	533.925.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	281.587.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	62.365.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.365.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	219.222.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.222.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.338.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	75.030.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.030.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	177.308.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.308.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.521.911.944	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.020.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.020.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.020.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.901.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.901.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.901.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	666.944.060	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	654.944.060	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	654.944.060	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	2		BELANJA MODAL	12.000.000	

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.938.947.884	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.938.947.884	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.938.947.884	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.520.958.824	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.263.253.888	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.263.253.888	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.253.888	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	415.075.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	415.075.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	415.075.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.842.629.936	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	5.842.629.936	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	19.920.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.822.709.936	
Jumlah Belanja										75.233.235.750	
Total Surplus/(Defisit)										(73.192.543.750)	
0	00	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
								Jumlah Pendapatan	0	
0	00	2.22.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	479.071.323.992	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	0.00	00			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	463.413.246.494	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	00			Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	459.066.605.985	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	01			Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	457.870.600.241	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	457.870.600.241	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.870.600.241
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	02			Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	1.196.005.744	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.196.005.744
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.196.005.744
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	00			Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	705.727.988	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	01			Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	151.055.550	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	151.055.550
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	151.055.550
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	02			Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	554.672.438	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	554.672.438
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	554.672.438

2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.03	00				Penyelenggaraan Desa Adat	632.068.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.03	03				Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	632.068.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	632.068.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	632.068.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.04	00				Pembinaan Sumber Daya Manusia	3.008.843.629	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.04	03				Pembinaan SDM Lembaga Adat	3.008.843.629	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.008.843.629	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.008.843.629	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.658.077.498	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.861.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.861.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.861.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.861.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.255.081.424	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.255.081.424	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.255.081.424	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.255.081.424	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.368.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.354.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.354.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.354.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.565.700	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	46.565.700	

2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.565.700	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.216.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.216.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.216.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	838.233.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	838.233.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	838.233.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.227.798.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.227.798.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	117.780.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	1.530.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	116.250.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	1.110.018.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.110.018.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.382.250	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944.382.250	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	944.382.250	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	944.382.250	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.290.585.924	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.384.600.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.384.600.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.600.896	

2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.905.985.028	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.905.985.028	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.905.985.028	
Jumlah Belanja										479.071.323.992	
Total Surplus/(Defisit)										(479.071.323.992)	
0	00	2.22.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313.600.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	313.600.000	
Jumlah Pendapatan											313.600.000	
0	00	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.209.901.797	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.293.435.696	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.146.253.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.146.253.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	40.633.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.633.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2			BELANJA MODAL	1.105.620.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	909.620.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.182.196	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.182.196	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	147.182.196	

3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.182.196	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	05	Belanja Hibah	68.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	469.284.796	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	469.284.796	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	469.284.796	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	469.284.796	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.284.796	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	390.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	99.999.770	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	00				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	99.999.770	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	03				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99.999.770	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	93.999.770	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.999.770	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	2		BELANJA MODAL	6.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	345.383.516	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	00				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	345.383.516	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	336.883.516	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	336.883.516	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	336.883.516	

3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	8.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.001.798.019	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.505.300.291	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.505.300.291	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.505.300.291	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.505.300.291	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.157.480	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.952.380	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.952.380	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.952.380	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.205.100	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	248.205.100	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	248.205.100	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	2		BELANJA MODAL	2.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.229.340.248	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.345.976	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	919.345.976	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	918.835.976	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.122.574.272	

3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.122.574.272	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.122.574.272	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.420.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	187.420.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.420.000	
Jumlah Belanja										26.209.901.797	
Total Surplus/(Defisit)										(25.896.301.797)	
0	00	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS PARIWISATA

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.960.349.906	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	358.469.345	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2.077.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2.077.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	2.077.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.077.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	216.204.749	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	216.204.749	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	216.204.749	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	216.204.749	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.187.096	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	115.548.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	115.548.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	115.548.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05					Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	24.638.100	

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	24.638.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.638.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	580.213.291	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	580.213.291	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	227.487.896	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	227.487.896	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	227.487.896	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	80.046.751	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	80.046.751	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.046.751	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	272.678.644	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	272.678.644	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	272.678.644	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	235.133.799	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	117.725.051	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	117.725.051	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	117.725.051	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.725.051	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	00				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	117.408.748	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	117.408.748	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	117.408.748	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.408.748	

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	514.559.014	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	514.559.014	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	514.559.014	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	514.559.014	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	514.559.014	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.271.974.457	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.597.394	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.313.098	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.313.098	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.313.098	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.284.296	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	76.284.296	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.284.296	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.617.956.032	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.617.956.032	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.617.956.032	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	12.617.956.032	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.071.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.593.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.593.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.593.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.711.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	10.711.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.711.200	

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	55.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.798.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.798.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.798.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.220.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.749.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	10.749.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.749.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.140.823	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	138.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.140.823	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	204.140.823	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	204.140.823	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.208.708	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.162.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	266.162.300	

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	266.162.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	787.005.408	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	787.005.408	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	787.005.408	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.041.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	51.041.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.041.000	
Jumlah Belanja										15.960.349.906	
Total Surplus/(Defisit)										(15.960.349.906)	
0	00	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	964.235.850	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	956.835.850	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	7.400.000	
Jumlah Pendapatan									964.235.850	
0	00	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.662.190.042	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	293.645.438	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	00			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	293.645.438	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	293.645.438	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	293.645.438	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	243.645.438	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	50.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	523.099.224	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	00			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	202.464.540	

2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	202.464.540	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	202.464.540	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	202.464.540	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	00				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	320.634.684	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	320.634.684	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	320.634.684	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	320.634.684	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.119.660.406	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.119.660.406	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	358.701.184	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	358.701.184	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	358.701.184	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	361.690.887	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	361.690.887	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	361.690.887	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	399.268.335	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	399.268.335	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	399.268.335	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	725.784.974	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.521.800	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.143.400	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.143.400	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.143.400	

2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.278.400	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.278.400	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.278.400	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.100.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.100.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.118.582	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	202.224.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	202.224.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.894.582	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	120.894.582	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.894.582	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.144.592	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.891.696	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	125.891.696	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.891.696	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.252.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	124.252.896	

2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.252.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	75.660.464.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.911.026.805	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	00				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	362.608.292	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	362.608.292	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	362.608.292	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	162.608.292	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	200.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	00				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.314.692.944	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	736.389.362	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	736.389.362	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	736.389.362	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.364.595.672	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.364.595.672	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.595.672	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	140.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.217.766.466	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.217.766.466	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	946.366.466	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	271.400.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.995.941.444	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.995.941.444	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.941.444	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	05	Belanja Hibah	190.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.178.999.830	

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.178.999.830	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.177.897.330	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.897.330	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	2		BELANJA MODAL	1.102.500	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.102.500	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	00				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.054.725.739	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01				Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.157.926.867	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.157.926.867	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.422.926.867	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	05	Belanja Hibah	2.735.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.896.798.872	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.896.798.872	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.896.798.872	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	936.817.188	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	00				Penataan Prasarana Pertanian	936.817.188	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	680.832.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	680.832.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	391.482.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	289.350.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	255.984.708	

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	255.984.708	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	255.984.708	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.067.730.926	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	00				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	308.092.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01				Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	308.092.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	308.092.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	308.092.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	00				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	712.022.782	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01				Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	340.118.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	340.118.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	340.118.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	371.904.542	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	371.904.542	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	371.904.542	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	00				Kesejahteraan Hewan	47.615.248	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02				Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	47.615.248	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	47.615.248	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.615.248	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.295.861.869	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.295.861.869	

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	756.741.987	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	756.741.987	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	756.741.987	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.048.290.586	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.048.290.586	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.290.586	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	490.829.296	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	490.829.296	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	490.829.296	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	0.00	00				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	120.903.344	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	00				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	120.903.344	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	120.903.344	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	120.903.344	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.903.344	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.328.124.860	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	596.276.720	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	317.784.084	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	317.784.084	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.784.084	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.492.636	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	278.492.636	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	278.492.636	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.192.042.867	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.795.425.387	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	51.795.425.387	

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	51.795.425.387	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	396.617.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	396.617.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	396.617.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.071.995	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.749.180	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	54.749.180	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.749.180	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.225.215	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	39.225.215	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.225.215	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	175.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.097.600	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	44.097.600	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.097.600	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.730.104.574	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	871.776.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	871.776.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	871.776.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.328.574	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	858.328.574	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	858.328.574	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.496.628.704	

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.385.557.504	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.385.557.504	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.385.557.504	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	881.958.304	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	881.958.304	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	881.958.304	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.112.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	229.112.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	229.112.896	
Jumlah Belanja											78.322.655.034	
Total Surplus/(Defisit)											(77.358.419.184)	
0	00	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
 Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.200.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	32.200.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	216.000.000	
Jumlah Pendapatan									248.200.000	
0	00	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.977.608.627	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	209.579.144	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	00			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	209.579.144	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	04			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	209.579.144	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	209.579.144	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.579.144	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	28.292.800	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	00			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28.292.800	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.292.800	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	28.292.800	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.292.800	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	209.890.467	

2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	00				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	209.890.467	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	209.890.467	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	209.890.467	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	209.890.467	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.198.738.856	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	00				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4.198.738.856	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	02				Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	1.454.208.596	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.454.208.596	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.454.208.596	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.630.936.500	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.630.936.500	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.630.936.500	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	04				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	9.068.110	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	9.068.110	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.068.110	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	30.875.650	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	30.875.650	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.875.650	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	06				Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	73.650.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	73.650.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.650.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.331.107.360	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.367.122	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.437.367.122	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.437.367.122	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.437.367.122	

2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.243.310	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.330.310	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.330.310	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.330.310	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.875.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	55.875.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.875.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.038.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.038.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.038.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.286.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.286.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	870.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	870.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	16.416.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.416.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.210.928	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.278.688	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	346.278.688	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	346.278.688	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	

2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.932.240	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	348.932.240	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.932.240	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	43.387.544.689	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.895.944.786	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	00				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.773.437.100	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	02				Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	4.155.237.100	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.155.237.100	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.237.100	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	05				Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	618.200.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	618.200.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	618.200.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	00				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.507.686	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.686	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	122.507.686	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.507.686	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	399.999.900	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	399.999.900	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	1.01	03				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	399.999.900	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	399.999.900	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.900	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	137.662.183	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	00				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.662.183	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02				Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	137.662.183	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	137.662.183	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.662.183	

3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.953.937.820	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.720	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.720	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.827.720	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.827.720	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.576.430.323	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.534.900.553	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.534.900.553	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	32.534.900.553	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.529.770	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	41.529.770	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.529.770	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	740.196.705	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.932.500	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.932.500	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.932.500	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.520.405	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	158.540.405	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	500.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	158.040.405	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	7.980.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.980.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	234.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.101.800	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	53.101.800	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.101.800	

3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.970.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	12.970.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.970.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.250.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	26.250.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.422.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	217.422.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.422.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.570.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.570.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	25.170.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	01	Belanja Pegawai	3.570.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	124.400.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.400.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.961.426	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.095.242	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	281.095.242	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.095.242	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.866.184	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	644.866.184	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	644.866.184	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.525.951.646	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.092.789.790	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.092.789.790	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.200.000	

3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.091.589.790	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	346.710.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	346.710.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.530.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	345.180.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.086.451.856	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	1.086.451.856	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.451.856	
Jumlah Belanja										52.365.153.316	
Total Surplus/(Defisit)										(52.116.953.316)	
0	00	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.600.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	25.600.000	
Jumlah Pendapatan									25.600.000	
0	00	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.482.705.183	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	334.463.198	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	00			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	334.463.198	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	334.463.198	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	334.463.198	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	334.463.198	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	95.778.800	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	00			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	95.778.800	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	95.778.800	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	95.778.800	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.778.800	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	8.483.820	

3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	00					Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8.483.820	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	8.483.820	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	8.483.820	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.483.820	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	0.00	00					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	661.832.724	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	00					Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	494.826.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01					Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	494.826.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	494.826.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	494.826.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	00					Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	103.869.848	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02					Pengembangan Layanan Pengujian	103.869.848	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	103.869.848	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	103.869.848	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	00					Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	63.136.428	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01					Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	63.136.428	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	63.136.428	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	63.136.428	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	0.00	00					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.516.758	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	00					Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.516.758	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01					Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.516.758	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	48.516.758	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.516.758	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.333.629.883	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.592.962.401	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.592.962.401	

3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.592.962.401	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.592.962.401	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.281.027.350	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.952.100	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.952.100	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.952.100	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	966.149.250	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	115.911.070	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	115.911.070	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	850.238.180	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.238.180	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.217.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.217.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.217.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.840.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.840.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.869.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	194.869.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	194.869.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.870.148	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	222.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539.870.148	

3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	539.870.148	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	539.870.148	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.497.769.984	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.080.817.088	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.080.817.088	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.307.088	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	416.952.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	416.952.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	416.952.896	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.262.119.592	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.170.958.454	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	00				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.170.958.454	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	01				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	11.222.420	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.222.420	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.222.420	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	327.169.110	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	327.169.110	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	277.169.110	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.832.566.924	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.832.566.924	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.832.566.924	

3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	135.704.088	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	00				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	135.704.088	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	135.704.088	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	135.704.088	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.704.088	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.955.457.050	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.863.774	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.766.863.774	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.766.863.774	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.766.863.774	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.990.380	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.710.380	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	17.710.380	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.710.380	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.280.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.280.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.506.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.506.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	53.506.448	

3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.506.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.096.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.096.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	110.096.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.096.448	
Jumlah Belanja										24.744.824.775	
Total Surplus/(Defisit)										(24.719.224.775)	
0	00	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.527.641.457	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	128.527.641.457	
Jumlah Pendapatan									128.527.641.457	
0	00	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	444.857.938	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	444.857.938	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	00			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	307.381.840	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.999.850	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.999.850	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.850	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.140	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.140	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.140	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	209.905.402	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	209.905.402	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.905.402	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	37.476.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	

2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	00				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	137.476.098	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	137.476.098	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	137.476.098	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.476.098	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	164.453.346	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	164.453.346	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	00				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	37.476.448	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	37.476.448	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	37.476.448	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	126.976.898	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	10.000.000	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	116.976.898	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	116.976.898	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	116.976.898	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00				SEKRETARIAT DAERAH	157.226.641.810	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	271.872.406	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	00				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	111.469.058	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	14.957.855	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.957.855	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.957.855	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	36.228.955	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.228.955	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.228.955	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03				Penataan Analisis Jabatan	60.282.248	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	60.282.248	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.282.248	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	00				Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	160.403.348	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40.452.940	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.452.940	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.452.940	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	28.544.400	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.544.400	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.544.400	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.249.350	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	11.249.350	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.249.350	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	14.021.610	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	14.021.610	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.021.610	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	66.135.048	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	66.135.048	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.135.048	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.226.585.227	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	00				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	182.449.668	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	138.656.788	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	138.656.788	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.656.788	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03				Fasilitasi Penataan Wilayah	43.792.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	43.792.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.792.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	00				Pelaksanaan Otonomi Daerah	354.512.690	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	203.521.144	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	203.521.144	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	203.521.144	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	150.991.546	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	150.991.546	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.991.546	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	00				Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.689.622.869	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01				Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	163.461.209	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	163.461.209	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.461.209	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1.526.161.660	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.526.161.660	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.526.161.660	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.038.894.896	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	00				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6.699.871.726	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	6.015.491.970	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.015.491.970	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.265.491.970	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	750.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	684.379.756	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	684.379.756	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	284.379.756	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	400.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	00				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	14.339.023.170	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	14.339.023.170	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	14.339.023.170	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.796.523.170	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	10.542.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.802.769.888	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	00				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.748.481.856	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.073.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.073.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	187.382.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	187.382.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.382.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	149.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	149.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	337.288.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	337.288.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	337.288.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	00				Fasilitasi Bantuan Hukum	2.054.288.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.866.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.866.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.866.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	187.382.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	187.382.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.382.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	232.816.710	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	00				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	51.353.550	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	51.353.550	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	51.353.550	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.353.550	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	00				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	28.869.710	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	28.869.710	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.869.710	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.869.710	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	00				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	152.593.450	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	152.593.450	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	152.593.450	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.593.450	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	0.00	00				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.016.673.950	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	00				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.339.998.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.990.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.990.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.267.921.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	176.721.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	2.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	174.221.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	1.091.200.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.091.200.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.087.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	47.087.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.087.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	00				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	161.070.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	66.006.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	66.006.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.506.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	95.064.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	23.064.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.064.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	72.000.000	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	72.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	00				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	515.604.840	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	298.365.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	298.365.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.365.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.982.840	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.982.840	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.982.840	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	166.257.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	166.257.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	166.257.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	0.00	00				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	58.375.030	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	00				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	33.285.330	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	33.285.330	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	33.285.330	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.285.330	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	00				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.089.700	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.089.700	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.089.700	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.089.700	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.578.653.703	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.045.537.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.045.537.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.045.537.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.537.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.296.637.961	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.642.003.615	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	73.642.003.615	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	73.642.003.615	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	654.634.346	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	654.634.346	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	654.634.346	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	00				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	383.535.005	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	383.535.005	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	383.535.005	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	383.535.005	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.379.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.379.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.379.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.379.510	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.545.896.691	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	358.412.742	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	358.412.742	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	358.412.742	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.822.915.703	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.602.543.103	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	2.550.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.599.993.103	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	220.372.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.372.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.242.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	57.242.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.242.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.648.264.444	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	3.648.264.444	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1	01	Belanja Pegawai	2.500.000	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.645.764.444	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.073.893.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.073.893.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.073.893.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	585.167.422	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	5	1		BELANJA OPERASI	585.167.422	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	585.167.422	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.993.593.052	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.708.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.708.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.551.092.944	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.551.092.944	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.551.092.944	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.734.000.108	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.734.000.108	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.734.000.108	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.138.926.662	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.148.254.340	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.148.254.340	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.148.254.340	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.981.846.350	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.981.846.350	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.981.846.350	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.820.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	355.820.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	355.820.000	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.623.005.972	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.605.105.972	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1	01	Belanja Pegawai	6.120.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.985.972	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	17.900.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.900.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	00				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.747.349.060	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	5	1		BELANJA OPERASI	247.349.060	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	5	1	01	Belanja Pegawai	247.349.060	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.500.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	5	1	01	Belanja Pegawai	4.500.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	00				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	11.974.281.466	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.695.476.759	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.635.476.759	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.635.476.759	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2		BELANJA MODAL	60.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.018.324.707	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.993.324.707	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.993.324.707	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2		BELANJA MODAL	25.000.000	

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	260.480.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	5	1		BELANJA OPERASI	260.480.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	260.480.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	00				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	469.974.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	469.974.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	469.974.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	469.974.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	00				Fasilitasi Keprotokolan	1.975.541.696	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.975.541.696	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.975.541.696	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.975.541.696	
Jumlah Belanja										157.835.953.094	
Total Surplus/(Defisit)										(29.308.311.637)	
0	00	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

SEKRETARIAT DPRD

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan											0	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					SEKRETARIAT DPRD	204.541.784.606	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	119.481.630.541	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	16.346.065.318	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.891.443.906	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.891.443.906	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.891.443.906	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pembahasan Rancangan Perda	13.604.734.006	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	13.604.734.006	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.604.734.006	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	849.887.406	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	849.887.406	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	849.887.406	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Pembahasan Kebijakan Anggaran	13.731.667.440	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Pembahasan KUA dan PPAS	2.738.500.048	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.738.500.048	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.738.500.048	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.770.418.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.770.418.098	

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.770.418.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pembahasan APBD	2.742.114.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.742.114.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.742.114.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pembahasan Perubahan APBD	2.738.369.798	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.738.369.798	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.738.369.798	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.742.265.398	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.742.265.398	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.742.265.398	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	28.882.239.284	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6.583.992.692	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.583.992.692	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.583.992.692	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.472.319.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.472.319.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.472.319.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7.129.576.516	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.129.576.516	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.129.576.516	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.992.273.196	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.992.273.196	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.273.196	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.704.077.680	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	2.704.077.680	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.704.077.680	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00				Peningkatan Kapasitas DPRD	15.367.907.586	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02				Bimbingan Teknis DPRD	5.412.289.344	

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	5.412.289.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.412.289.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.436.479.596	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	3.346.479.596	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.346.479.596	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	2			BELANJA MODAL	90.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.246.703.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	3.246.703.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.246.703.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	903.498.650	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1			BELANJA OPERASI	903.498.650	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	903.498.650	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07					Penyusunan Program Kerja DPRD	2.368.936.496	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1			BELANJA OPERASI	2.368.936.496	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.368.936.496	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	00					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	30.496.661.985	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01					Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.773.746.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.773.746.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.773.746.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.170.509.050	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.170.509.050	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.170.509.050	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03					Pelaksanaan Reses	22.552.406.039	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1			BELANJA OPERASI	22.552.406.039	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.552.406.039	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	00					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	932.540.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02					Pengawasan Kode Etik DPRD	932.540.096	

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	932.540.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	932.540.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	00					Fasilitasi Tugas DPRD	13.724.548.832	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.692.836.984	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.692.836.984	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.692.836.984	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.031.711.848	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.031.711.848	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.031.711.848	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.060.154.065	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.395.946	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.524.898	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	141.524.898	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	141.524.898	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.871.048	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	123.871.048	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	123.871.048	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.568.971.816	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.337.405.520	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	10.337.405.520	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	10.337.405.520	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.403.648	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	116.403.648	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	116.403.648	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	115.162.648	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	115.162.648	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	115.162.648	

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.689.394.853	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.238.775	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	132.238.775	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.238.775	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.232.480	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	276.232.480	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	276.232.480	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	782.938.254	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	782.938.254	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	782.938.254	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.269.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	62.269.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.269.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	930.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	930.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	930.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.505.715.944	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.505.715.944	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.505.715.944	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.700.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.700.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	44.700.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.700.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.422.535.832	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	890.000.000	

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	890.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	890.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.525.035.832	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.525.035.832	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.525.035.832	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.771.945.996	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.933.401.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.933.401.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.933.401.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193.458.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	193.458.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	193.458.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645.086.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	645.086.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	645.086.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	00					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	59.675.837.172	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.298.132.074	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1			BELANJA OPERASI	58.298.132.074	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1	01		Belanja Pegawai	58.298.132.074	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.098.350.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.098.350.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.098.350.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	279.355.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1			BELANJA OPERASI	279.355.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	279.355.098	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	00					Layanan Adminstrasi DPRD	1.621.372.450	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02					Fasilitasi Fraksi DPRD	229.421.490	

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1		BELANJA OPERASI	229.421.490	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	229.421.490	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.391.950.960	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.391.950.960	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.391.950.960	
Jumlah Belanja										204.541.784.606	
Total Surplus/(Defisit)										(204.541.784.606)	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	5.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					PERENCANAAN	23.720.250.843	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.561.454.662	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.994.538.880	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	48.368.940	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	48.368.940	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.368.940	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.946.169.940	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	2.896.169.940	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.896.169.940	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2			BELANJA MODAL	50.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	698.026.742	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	420.083.626	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	420.083.626	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	420.083.626	

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	277.943.116	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	277.943.116	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	277.943.116	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.868.889.040	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	85.669.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	85.669.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.669.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	297.600.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	247.600.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	247.600.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.485.619.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.485.619.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.619.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.331.674.797	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	897.059.160	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.967.696	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	84.967.696	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.967.696	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.529.728	

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	40.529.728	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.529.728	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.527.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.527.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.527.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	40.341.648	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	40.341.648	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.341.648	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.572.488	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	89.572.488	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.572.488	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	06				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	44.966.908	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	44.966.908	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.966.908	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	498.455.196	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	498.455.196	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	498.455.196	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.697.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	53.697.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.697.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	605.640.162	

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	168.775.054	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	168.775.054	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	168.775.054	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	196.484.514	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	196.484.514	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.484.514	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.778.500	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	8.778.500	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.778.500	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	231.602.094	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	231.602.094	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.602.094	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	00				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	828.975.475	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	235.629.195	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	235.629.195	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.629.195	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	181.846.740	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	181.846.740	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	181.846.740	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236.831.540	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	236.831.540	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	236.831.540	

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	174.668.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	174.668.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	174.668.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.827.121.384	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.275.530	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239.812.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	239.812.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	239.812.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.462.930	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	23.462.930	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.462.930	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.803.837.631	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.517.817.040	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.517.817.040	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	12.517.817.040	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.117.995	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	198.117.995	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.117.995	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	87.902.596	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	87.902.596	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.902.596	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.447.986	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.703.698	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.703.698	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.703.698	

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.533.548	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	70.033.548	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.033.548	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	46.500.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.500.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.276.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	126.276.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.276.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.884.948	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	73.884.948	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.884.948	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.916.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	74.916.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.916.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.426.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	42.426.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.426.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.706.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	110.706.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.706.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.606.216	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.276.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	342.276.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	342.276.448	

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.853.320	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	582.853.320	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	582.853.320	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.954.021	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	779.224.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	779.224.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	779.224.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.986.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	132.986.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.986.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.743.093	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	293.743.093	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	293.743.093	
Jumlah Belanja										23.720.250.843	
Total Surplus/(Defisit)										(23.720.250.843)	
0	00	5.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.061.977.370	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	583.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	31.478.777.370	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2			PENDAPATAN TRANSFER	2.038.956.586.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2	01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.038.956.586.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3	01		Pendapatan Hibah	5.708.000.000	
Jumlah Pendapatan											2.076.726.563.470	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00					KEUANGAN	1.414.997.825.816	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.388.128.627.499	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	00					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.757.169.262	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.757.169.262	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	2.757.169.262	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1	01		Belanja Pegawai	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.756.659.262	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	00					Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	213.748.700	

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	213.748.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	213.748.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	213.748.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	00				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	200.692.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	200.692.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	200.692.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.182.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	00				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	402.443.244	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	402.443.244	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	402.443.244	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	402.443.244	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	00				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.384.554.574.243	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	17.775.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	17.775.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	5	1	03	Belanja Bunga	17.775.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	282.897.903.508	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	5	4		BELANJA TRANSFER	282.897.903.508	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	282.897.903.508	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10				Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.033.881.670.735	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	5	4		BELANJA TRANSFER	1.033.881.670.735	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	1.033.881.670.735	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.664.143.602	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	00				Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.664.143.602	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01				Penyusunan Standar Harga	249.633.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	249.633.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	249.123.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	302.560.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	302.560.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	302.560.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07				Pengamanan Barang Milik Daerah	2.299.220.720	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.299.220.720	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.200.720	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	812.728.402	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	812.728.402	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	811.708.402	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.205.054.715	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.381.270	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.381.270	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	31.381.270	

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.381.270	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.446.218.288	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.244.694.968	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.244.694.968	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	19.244.694.968	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.523.320	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	201.523.320	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	201.013.320	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.335.381.385	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.839.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	347.329.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.329.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	987.542.385	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	987.542.385	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	987.032.385	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.392.073.772	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	587.350.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	587.350.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	586.330.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.100.700	

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	135.100.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	135.100.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.669.622.976	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	1.669.622.976	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	01		Belanja Pegawai	1.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.668.602.976	
Jumlah Belanja											1.414.997.825.816	
Total Surplus/(Defisit)											661.728.737.654	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.157.826.256.662	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.157.826.256.662	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											1.157.826.256.662	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											100.000.000.000	

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.602.103.971.953	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	01		Pajak Daerah	2.580.452.740.853	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	75.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	21.575.631.100	
Jumlah Pendapatan											2.602.103.971.953	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00					KEUANGAN	150.595.642.566	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	42.694.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	00					Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	42.694.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	42.694.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	42.694.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.694.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.677.422.008	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	00					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.677.422.008	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	135.726.190	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	135.726.190	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	135.726.190	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	20.042.180	

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	20.042.180	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.042.180	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200.849.460	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	200.849.460	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	200.849.460	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9.474.892.768	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	9.474.892.768	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.474.892.768	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10					Penagihan Pajak Daerah	6.284.575.160	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	6.284.575.160	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.284.575.160	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.525.833.910	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	1.525.833.910	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.525.833.910	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.502.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	5	1			BELANJA OPERASI	35.502.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.502.340	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	132.875.526.218	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.621.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.091.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.091.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.091.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	9.530.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.530.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.636.310.861	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110.636.310.861	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	110.636.310.861	

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	110.636.310.861	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.558.381.665	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.978.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.978.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.978.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.467.937.965	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.467.937.965	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	4.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.463.937.965	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.928.552.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.928.552.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.552.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.752.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	47.752.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.752.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	164.050.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	164.050.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	164.050.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.110.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	573.110.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	573.110.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.288.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.799.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	1.799.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.799.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	288.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	13.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	275.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.372.270.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.260.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	17.260.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.260.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.518.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.518.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.518.020.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.836.990.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.836.990.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	4.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.490.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.999.841.992	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	437.080.548	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	437.080.548	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	437.080.548	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.180.881.612	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.180.881.612	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.881.612	

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	727.527.376	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	727.527.376	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	727.527.376	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.243.569.560	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.575.980.160	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	3.530.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.572.450.160	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.667.589.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.442.701.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	224.888.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.398.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	260.398.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	260.398.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.384.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	1.150.384.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.384.096	
Jumlah Belanja										150.595.642.566	
Total Surplus/(Defisit)										2.451.508.329.387	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.959.832.630	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	6.959.832.630	
Jumlah Pendapatan											6.959.832.630	
0	00	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00					KEPEGAWAIAN	25.691.167.295	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.399.965.314	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	00					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.924.488.886	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.265	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	8.072.265	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.072.265	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04					Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	4.649.000.468	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	4.649.000.468	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.649.000.468	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	125.186.809	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	125.186.809	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	125.186.809	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	142.229.344	

5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	142.229.344	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	142.229.344	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	00					Mutasi dan Promosi ASN	301.235.744	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01					Pengelolaan Mutasi ASN	63.784.848	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	63.784.848	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	63.784.848	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	69.300.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	69.300.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	69.300.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03					Pengelolaan Promosi ASN	168.150.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	168.150.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	168.150.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	00					Pengembangan Kompetensi ASN	638.381.592	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02					Pengelolaan Assessment Center	360.687.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	360.687.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	360.687.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	04					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	145.158.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	145.158.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	145.158.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	05					Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	66.522.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	05	5	1			BELANJA OPERASI	66.522.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	66.522.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	66.012.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	5	1			BELANJA OPERASI	66.012.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	66.012.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	00					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	535.859.092	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.402.448	

5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	287.402.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	287.402.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	136.075.748	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	136.075.748	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.075.748	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07				Pembinaan Disiplin ASN	94.072.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	94.072.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.072.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.308.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	18.308.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.308.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.291.201.981	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.435.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.953.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	106.953.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.953.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.482.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	14.482.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.482.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.068.737.828	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.068.737.828	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.068.737.828	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	16.068.737.828	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.345.960	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.818.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.818.000	

5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.818.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.839.160	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	152.839.160	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	500.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.339.160	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.275.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	92.275.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.275.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.763.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.763.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.763.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.764.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.764.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.886.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	276.886.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	276.886.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.635.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.635.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	47.635.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.635.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.673.341	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	

5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	279.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	279.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.673.341	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.267.673.341	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.673.341	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.374.052	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599.804.232	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	599.804.232	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	01	Belanja Pegawai	500.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	599.304.232	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	136.669.820	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	5	1		BELANJA OPERASI	136.669.820	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.669.820	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.900.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	126.900.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.900.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.389.465.384	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.482.707.114	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	00				Pengembangan Kompetensi Teknis	781.447.770	

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	31.640.650	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	31.640.650	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.640.650	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	749.807.120	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	749.807.120	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	749.807.120	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	00				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.701.259.344	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	534.418.994	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	534.418.994	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	534.418.994	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	268.237.300	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	268.237.300	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	268.237.300	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05				Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	107.090.300	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	107.090.300	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.090.300	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	06				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	14.641.650	

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	14.641.650	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.641.650	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.776.871.100	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	3.776.871.100	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.776.871.100	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.906.758.270	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.721.503.922	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.721.503.922	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.721.503.922	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	7.721.503.922	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.398.410	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.992.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	99.992.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.992.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.355.510	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.355.510	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.355.510	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.050.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	34.050.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	711.120.000	

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	711.120.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	14.120.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	6.120.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	697.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.333.807.264	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	630.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.703.807.264	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.703.807.264	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.807.264	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912.096.044	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.206.044	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	298.206.044	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.206.044	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.500.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	399.500.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	399.500.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.390.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	214.390.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.390.000	

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	00					Peningkatan Pelayanan BLUD	6.959.832.630	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.630	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	1			BELANJA OPERASI	6.959.832.630	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.959.832.630	
Jumlah Belanja											50.080.632.679	
Total Surplus/(Defisit)											(43.120.800.049)	
0	00	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	
0	00	5.05.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	5	BELANJA		
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23.243.111.763	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	0.00	00		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.653.925.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	00		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	7.708.309.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.059.304.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	7.059.304.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.059.304.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	08		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	238.708.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	08	5 1	BELANJA OPERASI	238.708.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.708.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	154.736.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	12	5 1	BELANJA OPERASI	154.736.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	154.736.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	13		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	255.558.800	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	13	5 1	BELANJA OPERASI	255.558.800	

5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	255.558.800	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	00				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	668.486.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	02				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	126.582.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	126.582.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.582.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	04				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	300.730.300	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	24.751.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.751.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	04	5	2		BELANJA MODAL	275.979.200	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.979.200	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	06				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	241.173.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	241.173.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	241.173.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	00				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	277.130.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	02				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	66.738.150	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	66.738.150	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.738.150	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	04				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	52.293.150	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	52.293.150	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.293.150	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	05				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	158.098.800	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	83.098.800	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	83.098.800	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	05	5	2		BELANJA MODAL	75.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	05	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.589.186.063	

5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.692.750	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.660.750	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.660.750	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.660.750	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.032.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	38.032.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.032.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.422.889.349	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.408.233.949	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.408.233.949	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.408.233.949	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.593.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.593.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.593.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.304.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.304.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.304.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.757.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.757.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.757.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.375.800	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.524.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.524.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.524.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.752.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	34.752.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.752.900	

5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.416.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	142.416.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.416.500	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.940.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	11.940.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.200.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	37.200.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.542.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	70.542.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.542.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.520.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.520.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	9.120.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	6.120.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	70.400.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.400.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.496.036	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.480.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.480.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	226.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.016.036	

5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	304.016.036	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	304.016.036	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.179.212.128	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.128.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	761.128.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	761.128.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.418.084.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.418.084.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.418.084.096	
Jumlah Belanja										23.243.111.763	
Total Surplus/(Defisit)										(23.243.111.763)	
0	00	5.05.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOAAN PERBATASAN
 Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02	Retribusi Daerah	94.000.000	
Jumlah Pendapatan								94.000.000	
0	00	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	7.631.669.249	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.034.004.860	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.034.004.860	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04		Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	113.560.972	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	113.560.972	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.560.972	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	920.443.888	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	920.443.888	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	920.443.888	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.597.664.389	

5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.688.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.688.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.688.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.688.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.497.962.505	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.497.962.505	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.497.962.505	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.497.962.505	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.248.300	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.652.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.652.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.652.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.506.200	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	19.506.200	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.506.200	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.075.100	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.075.100	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.075.100	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.015.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	31.015.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.015.000	

5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.610.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.610.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2			BELANJA MODAL	23.610.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.610.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.692.636	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	6.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	205.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838.692.636	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	838.692.636	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	838.692.636	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.462.348	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	754.521.376	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	754.521.376	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	754.521.376	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	35.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	

5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.940.972	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	84.940.972	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.940.972	
Jumlah Belanja										7.631.669.249	
Total Surplus/(Defisit)										(7.537.669.249)	
0	00	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

INSPEKTORAT

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					INSPEKTORAT DAERAH	26.132.856.544	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.774.642.598	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.261.835.606	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	141.715.876	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	141.715.876	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	141.715.876	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	331.734.162	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	331.734.162	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	331.734.162	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Reviu Laporan Kinerja	34.197.165	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	34.197.165	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.197.165	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Reviu Laporan Keuangan	130.892.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	130.892.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	130.892.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	342.513.996	

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	342.513.996	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	342.513.996	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06				Kerjasama Pengawasan Internal	98.371.115	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	98.371.115	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.371.115	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	182.410.396	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	182.410.396	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	182.410.396	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	512.806.992	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	67.084.648	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	67.084.648	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.084.648	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	445.722.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	445.722.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	445.722.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.099.848.465	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	497.351.224	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	245.041.432	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	245.041.432	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	245.041.432	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	252.309.792	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	252.309.792	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	252.309.792	

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00				Pendampingan dan Asistensi	602.497.241	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	367.216.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	367.216.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	367.216.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38.385.375	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	38.385.375	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.385.375	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	110.027.970	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	110.027.970	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.027.970	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	86.867.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	86.867.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.867.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.258.365.481	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.189.750	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.439.930	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.439.930	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.439.930	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.749.820	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	7.749.820	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.749.820	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.263.943.526	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.263.943.526	

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.263.943.526	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.263.943.526	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.706.685	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.500.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.500.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.497.885	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	72.497.885	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.497.885	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.840.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	114.840.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.840.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	13.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.868.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	189.868.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.868.000	

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.915.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.915.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	5.100.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	01		Belanja Pegawai	5.100.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2			BELANJA MODAL	64.815.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.815.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.857.588	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	265.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	265.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.857.588	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	324.857.588	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	324.857.588	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.846.752.932	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	938.922.232	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	938.922.232	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	938.922.232	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.401.356	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	190.401.356	

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.530.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	188.871.356	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	505.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.429.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	200.429.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.429.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	12.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000	
Jumlah Belanja										26.132.856.544	
Total Surplus/(Defisit)										(26.132.856.544)	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan											0	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.631.190.305	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	370.344.596	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	370.344.596	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	370.344.596	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	370.344.596	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	370.344.596	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.747.420.284	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.747.420.284	

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.747.420.284	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	16.747.420.284	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	279.565.284	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	16.467.855.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	182.865.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	182.865.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	182.865.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	172.865.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	172.865.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	2		BELANJA MODAL	10.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	284.653.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	284.653.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	284.653.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	274.653.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	274.653.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	2		BELANJA MODAL	10.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	

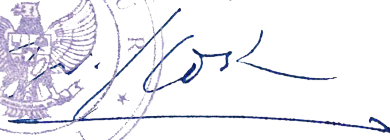
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.045.906.737	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.330.380	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.936.980	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.936.980	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.936.980	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.393.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.393.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.660.957.696	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.660.957.696	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.660.957.696	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.660.957.696	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.482.645	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.693.095	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.693.095	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.693.095	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.213.750	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	21.331.750	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.821.750	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	19.882.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.882.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.155.800	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.155.800	

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.155.800	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	3.750.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.670.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	55.670.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.670.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.599.616	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	110.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.099.616	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	662.099.616	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	662.099.616	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.536.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.566.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	336.566.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	336.566.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.040.000	

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	32.040.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.040.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	19.930.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000	
Jumlah Belanja										27.631.190.305	
Total Surplus/(Defisit)										(27.631.190.305)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	



 GUBERNUR BALI,



 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IV

**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB
KEGIATAN BESERTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.183.889.269.472	762.444.810.413	0	0	2.946.334.079.885
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.318.772.374.699	204.949.884.281	0	0	1.523.722.258.980
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.318.772.374.699	204.949.884.281	0	0	1.523.722.258.980
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	888.637.391.466	2.456.852.000	0	0	891.094.243.466
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.742.900	0	0	0	28.742.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.533.100	0	0	24.533.100
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.209.800	0	0	4.209.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	878.319.040.255	0	0	878.319.040.255
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	878.160.194.170	0	0	878.160.194.170
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.500.790	0	0	78.500.790
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80.345.295	0	0	80.345.295

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.990.200	0	0	0	49.990.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	49.990.200	0	0	0	49.990.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.537.400	0	0	0	27.537.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.537.400	0	0	0	27.537.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	595.914.895	452.868.000	0	0	1.048.782.895
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.922.545	452.868.000	0	0	740.790.545
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.781.850	0	0	0	6.781.850
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.123.500	0	0	0	74.123.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.525.000	0	0	0	33.525.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.562.000	0	0	0	193.562.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	2.003.984.000	0	0	2.103.984.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	2.003.984.000	0	0	2.103.984.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.501.890.088	0	0	0	7.501.890.088
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	682.653.000	0	0	0	682.653.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.816.237.088	0	0	0	6.816.237.088

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.014.275.728	0	0	0	2.014.275.728
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	734.829.728	0	0	0	734.829.728
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.890.000	0	0	0	9.890.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	853.876.000	0	0	0	853.876.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.680.000	0	0	0	412.680.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	404.865.857.167	202.493.032.281	0	0	607.358.889.448
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	204.350.064.263	113.734.557.737	0	0	318.084.622.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1.703.000.000	59.219.869.628	0	0	60.922.869.628
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	15.913.874.304	0	0	15.913.874.304
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	617.729.000	0	0	617.729.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	547.600	1.073.827.400	0	0	1.074.375.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	273.800	526.380.200	0	0	526.654.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	956.630.000	0	0	956.630.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	1.691.920.000	0	0	1.691.920.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	784.691.000	0	0	784.691.000

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	0	521.500.000	0	0	521.500.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	260.750.000	0	0	260.750.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0	268.151.000	0	0	268.151.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	106.061.000	0	0	106.061.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.230.175.050	611.600.400	0	0	4.841.775.450
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	125.000.000	0	0	125.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	481.682.860	0	0	0	481.682.860
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44.038.300	0	0	0	44.038.300
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	57.846.573.388	0	0	0	57.846.573.388
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14.378.970	0	0	0	14.378.970
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	504.578.600	0	0	0	504.578.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	139.503.666.195	31.056.573.805	0	0	170.560.240.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	21.149.500	0	0	0	21.149.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	185.319.281.298	79.157.036.000	0	0	264.476.317.298
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	30.000.000	12.598.359.000	0	0	12.628.359.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0	1.152.800.000	0	0	1.152.800.000

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	5.085.000.000	0	0	5.085.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	846.197.000	0	0	846.197.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4.835.355.000	0	0	0	4.835.355.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	10.970.000.000	0	0	10.970.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	302.687.050	0	0	0	302.687.050
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	87.000.000	0	0	0	87.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49.610.791.718	0	0	0	49.610.791.718
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	14.267.930	0	0	0	14.267.930
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	218.639.600	0	0	0	218.639.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	130.220.540.000	48.504.680.000	0	0	178.725.220.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	15.196.511.606	9.601.438.544	0	0	24.797.950.150
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0	1.589.824.884	0	0	1.589.824.884
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	218.332.000	0	0	218.332.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0	1.241.239.460	0	0	1.241.239.460
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	0	1.068.864.000	0	0	1.068.864.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	3.289.560.000	0	0	3.289.560.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	0	193.140.000	0	0	193.140.000

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.094.709.100	0	0	0	1.094.709.100
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	27.400.400	0	0	0	27.400.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.548.936.056	0	0	0	5.548.936.056
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	279.485.850	72.670.000	0	0	352.155.850
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.227.721.800	1.927.808.200	0	0	10.155.530.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.258.400	0	0	0	18.258.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	233.380.850	0	0	0	233.380.850
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	207.084.950	0	0	0	207.084.950
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	128.276.150	0	0	0	128.276.150
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	46.731.350	0	0	0	46.731.350
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	32.077.450	0	0	0	32.077.450
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	26.295.900	0	0	0	26.295.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	26.295.900	0	0	0	26.295.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29.048.850	0	0	0	29.048.850
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	29.048.850	0	0	0	29.048.850

1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	29.048.850	0	0	0	29.048.850
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	25.006.696.366	0	0	0	25.006.696.366
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.006.696.366	0	0	0	25.006.696.366
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25.006.696.366	0	0	0	25.006.696.366
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	500.842.291.740	8.218.198.000	0	0	509.060.489.740
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kesehatan	500.842.291.740	8.218.198.000	0	0	509.060.489.740
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	431.515.913.794	4.330.426.000	0	0	435.846.339.794
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.482.000	0	0	0	31.482.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.482.000	0	0	0	31.482.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	194.389.858.535	0	0	0	194.389.858.535
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	194.341.449.565	0	0	0	194.341.449.565
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.408.970	0	0	0	48.408.970
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.830.305.245	342.428.100	0	0	2.172.733.345
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.066.855	342.428.100	0	0	536.494.955
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.636.238.390	0	0	0	1.636.238.390
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	29.184.000	0	0	179.184.000

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	29.184.000	0	0	29.184.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0	0	0	150.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.077.208.274	0	0	0	59.077.208.274
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.382.010.402	0	0	0	7.382.010.402
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.695.197.872	0	0	0	51.695.197.872
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.611.491.400	14.655.000	0	0	3.626.146.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	665.652.100	0	0	0	665.652.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.683.200	14.655.000	0	0	276.338.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	528.624.000	0	0	0	528.624.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.155.532.100	0	0	0	2.155.532.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	172.425.568.340	3.944.158.900	0	0	176.369.727.240
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	172.425.568.340	3.944.158.900	0	0	176.369.727.240
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36.454.304.154	3.887.772.000	0	0	40.342.076.154

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12.622.708.308	3.688.400.000	0	0	16.311.108.308
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	9.392.547.232	3.688.400.000	0	0	13.080.947.232
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	200.000.000	0	0	0	200.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1.013.437.700	0	0	0	1.013.437.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.986.723.376	0	0	0	1.986.723.376
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	23.553.241.046	189.472.000	0	0	23.742.713.046
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	228.310.200	0	0	0	228.310.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	305.886.000	0	0	0	305.886.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	212.374.780	0	0	0	212.374.780
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.734.644.800	0	0	0	3.734.644.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	81.465.700	0	0	0	81.465.700

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	160.534.300	0	0	0	160.534.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	307.207.000	40.000.000	0	0	347.207.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	427.033.650	149.472.000	0	0	576.505.650
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	722.335.136	0	0	0	722.335.136
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.339.429.480	0	0	0	17.339.429.480
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	34.020.000	0	0	0	34.020.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	24.522.800	9.900.000	0	0	34.422.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	24.522.800	9.900.000	0	0	34.422.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	253.832.000	0	0	0	253.832.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	253.832.000	0	0	0	253.832.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	32.777.513.792	0	0	0	32.777.513.792
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	32.777.513.792	0	0	0	32.777.513.792
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	32.777.513.792	0	0	0	32.777.513.792
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	94.560.000	0	0	0	94.560.000

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	94.560.000	0	0	0	94.560.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	94.560.000	0	0	0	94.560.000
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	270.152.455.965	549.212.816.432	0	0	819.365.272.397
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	270.152.455.965	549.212.816.432	0	0	819.365.272.397
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.935.210.756	50.000.000	0	0	31.985.210.756
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.488.011	0	0	0	740.488.011
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	423.053.425	0	0	0	423.053.425
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.434.586	0	0	0	317.434.586
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.552.529.609	0	0	0	26.552.529.609
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.552.529.609	0	0	0	26.552.529.609
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.320.840	0	0	0	706.320.840
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.251.500	0	0	0	36.251.500
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.345.340	0	0	0	84.345.340
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000	0	0	0	115.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.376.000	0	0	0	93.376.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.520.000	0	0	0	37.520.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.640.000	0	0	0	17.640.000

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.188.000	0	0	0	322.188.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.100.000	50.000.000	0	0	105.100.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.100.000	50.000.000	0	0	105.100.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.576.448	0	0	0	999.576.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.850.000	0	0	0	549.850.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.726.448	0	0	0	395.726.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.881.195.848	0	0	0	2.881.195.848
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.404.333.540	0	0	0	1.404.333.540
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.298.452	0	0	0	320.298.452
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.156.563.856	0	0	0	1.156.563.856
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.276.503.700	9.436.097.200	0	0	13.712.600.900
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.624.200	2.650.477.200	0	0	2.901.101.400
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	0	1.513.837.200	0	0	1.513.837.200
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	1.136.640.000	0	0	1.136.640.000

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	250.624.200	0	0	0	250.624.200
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.025.879.500	6.785.620.000	0	0	10.811.499.500
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	763.916.216	0	0	0	763.916.216
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	252.481.488	6.785.620.000	0	0	7.038.101.488
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.009.481.796	0	0	0	3.009.481.796
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	34.999.332.224	4.428.693.711	0	0	39.428.025.935
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	34.999.332.224	4.428.693.711	0	0	39.428.025.935
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.249.246.336	0	0	0	1.249.246.336
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1.000.000.000	3.831.593.711	0	0	4.831.593.711
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	32.750.085.888	597.100.000	0	0	33.347.185.888
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.148.098.400	924.603.034	0	0	12.072.701.434
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	11.148.098.400	924.603.034	0	0	12.072.701.434
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	924.603.034	0	0	924.603.034

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.148.098.400	0	0	0	11.148.098.400
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	163.051.563.789	264.358.913.613	0	0	427.410.477.402
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	163.051.563.789	264.358.913.613	0	0	427.410.477.402
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.002.129.220	0	0	0	1.002.129.220
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	17.832.656.734	0	0	0	17.832.656.734
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	144.216.777.835	264.358.913.613	0	0	408.575.691.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.521.196.310	268.703.485.874	0	0	290.224.682.184
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	21.521.196.310	268.703.485.874	0	0	290.224.682.184
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	479.941.346	0	0	0	479.941.346
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	400.000.000	123.163.620.612	0	0	123.563.620.612
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	48.204.898	0	0	0	48.204.898
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	48.394.898	0	0	0	48.394.898
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	392.937.557	116.468.361.352	0	0	116.861.298.909
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	0	9.332.501.900	0	0	9.332.501.900
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	0	18.119.122.410	0	0	18.119.122.410
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	14.490.600.101	0	0	0	14.490.600.101
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan	0	1.619.879.600	0	0	1.619.879.600

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	4.190.224.923	0	0	0	4.190.224.923
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.470.892.587	0	0	0	1.470.892.587
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.046.993.098	1.311.023.000	0	0	3.358.016.098
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	296.643.077	0	0	0	296.643.077
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	296.643.077	0	0	0	296.643.077
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.750.350.021	1.311.023.000	0	0	3.061.373.021
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.048.841.416	1.311.023.000	0	0	2.359.864.416
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	701.508.605	0	0	0	701.508.605
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.173.557.688	0	0	0	1.173.557.688
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	654.373.132	0	0	0	654.373.132
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	654.373.132	0	0	0	654.373.132
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	218.212.600	0	0	0	218.212.600
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	218.212.600	0	0	0	218.212.600
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	300.971.956	0	0	0	300.971.956

1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	173.317.652	0	0	0	173.317.652
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	127.654.304	0	0	0	127.654.304
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.429.125.794	0	0	0	1.429.125.794
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.429.125.794	0	0	0	1.429.125.794
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.056.670.806	0	0	0	1.056.670.806
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	420.346.508	0	0	0	420.346.508
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	14.753.910	0	0	0	14.753.910
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	405.592.598	0	0	0	405.592.598
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	636.324.298	0	0	0	636.324.298
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	636.324.298	0	0	0	636.324.298
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	372.454.988	0	0	0	372.454.988
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	372.454.988	0	0	0	372.454.988
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	127.688.700	0	0	0	127.688.700

1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	229.264.838	0	0	0	229.264.838
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	15.501.450	0	0	0	15.501.450
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	62.334.695.020	0	0	0	62.334.695.020
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000				Satuan Polisi Pamong Praja	41.417.103.413	0	0	0	41.417.103.413
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.615.378.239	0	0	0	23.615.378.239
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	0	0	0	13.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	0	0	0	8.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.725.809.319	0	0	0	20.725.809.319
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.725.809.319	0	0	0	20.725.809.319
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.672.200	0	0	0	258.672.200
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.783.000	0	0	0	29.783.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.536.800	0	0	0	55.536.800
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.130.400	0	0	0	34.130.400
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.222.000	0	0	0	64.222.000

1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.880.272	0	0	0	1.149.880.272
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	0	0	0	142.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.210.000	0	0	0	80.210.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924.670.272	0	0	0	924.670.272
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.468.016.448	0	0	0	1.468.016.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.468.016.448	0	0	0	1.468.016.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.801.725.174	0	0	0	17.801.725.174
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.633.206.358	0	0	0	17.633.206.358
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.625.124.694	0	0	0	2.625.124.694
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	0	0	0	37.476.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	74.952.896	0	0	0	74.952.896

1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.895.652.320	0	0	0	14.895.652.320
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	168.518.816	0	0	0	168.518.816
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	168.518.816	0	0	0	168.518.816
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.917.591.607	0	0	0	20.917.591.607
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.946.099.707	0	0	0	18.946.099.707
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.376.600	0	0	0	4.376.600
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	0	0	0	2.554.700
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.821.900	0	0	0	1.821.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.180.885.859	0	0	0	13.180.885.859
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.180.885.859	0	0	0	13.180.885.859
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.104.990	0	0	0	108.104.990
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.910.350	0	0	0	4.910.350
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.628.640	0	0	0	25.628.640
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.566.000	0	0	0	2.566.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.760.000	0	0	0	13.760.000

1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.760.000	0	0	0	13.760.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.296.974	0	0	0	744.296.974
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	0	1.500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.592.042	0	0	0	387.592.042
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.204.932	0	0	0	355.204.932
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.894.675.284	0	0	0	4.894.675.284
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.835.020.284	0	0	0	4.835.020.284
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.655.000	0	0	0	59.655.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.971.491.900	0	0	0	1.971.491.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	426.624.000	0	0	0	426.624.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	426.624.000	0	0	0	426.624.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	524.867.900	0	0	0	524.867.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	524.867.900	0	0	0	524.867.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.020.000.000	0	0	0	1.020.000.000

1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.020.000.000	0	0	0	1.020.000.000
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.358.326.254	63.911.700	0	0	30.422.237.954
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	30.358.326.254	63.911.700	0	0	30.422.237.954
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.236.684.784	63.911.700	0	0	25.300.596.484
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.080.700	0	0	0	27.080.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.834.700	0	0	0	21.834.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.246.000	0	0	0	5.246.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.243.154.726	0	0	0	20.243.154.726
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.243.154.726	0	0	0	20.243.154.726
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.064.900	49.750.000	0	0	270.814.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.357.300	0	0	0	23.357.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	49.750.000	0	0	49.750.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.955.000	0	0	0	185.955.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.852.600	0	0	0	9.852.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900.000	0	0	0	1.900.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.829.600	14.161.700	0	0	23.991.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.829.600	14.161.700	0	0	23.991.300

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.706.040	0	0	0	605.706.040
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	0	0	0	1.250.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	389.500.000	0	0	0	389.500.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.956.040	0	0	0	214.956.040
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.129.848.818	0	0	0	4.129.848.818
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.156.924.512	0	0	0	1.156.924.512
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	727.034.720	0	0	0	727.034.720
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.245.889.586	0	0	0	2.245.889.586
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.150.165	0	0	0	42.150.165
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.530.110	0	0	0	3.530.110
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.110	0	0	0	3.530.110
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.620.055	0	0	0	38.620.055
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.620.055	0	0	0	38.620.055
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.692.582.335	0	0	0	4.692.582.335

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	37.624.555	0	0	0	37.624.555
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	28.959.755	0	0	0	28.959.755
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	8.664.800	0	0	0	8.664.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	616.073.555	0	0	0	616.073.555
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	Pengasuhan	35.000.000	0	0	0	35.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	190.000.000	0	0	0	190.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	35.000.000	0	0	0	35.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	15.800.000	0	0	0	15.800.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30.344.000	0	0	0	30.344.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	55.926.000	0	0	0	55.926.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	222.100.000	0	0	0	222.100.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000	0	0	0	5.700.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	26.203.555	0	0	0	26.203.555
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	747.236.155	0	0	0	747.236.155
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	465.000.000	0	0	0	465.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000	0	0	0	10.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	117.902.500	0	0	0	117.902.500
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.599.600	0	0	0	16.599.600

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	Pemulasaraan	137.734.055	0	0	0	137.734.055
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.284.398.200	0	0	0	3.284.398.200
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	3.284.398.200	0	0	0	3.284.398.200
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.870	0	0	0	7.249.870
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	7.249.870	0	0	0	7.249.870
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.805.370	0	0	0	3.805.370
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.805.370	0	0	0	3.805.370
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.805.370	0	0	0	3.805.370
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.939.600	0	0	0	255.939.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.939.600	0	0	0	255.939.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.939.600	0	0	0	255.939.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.164.000	0	0	0	127.164.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.164.000	0	0	0	127.164.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.164.000	0	0	0	127.164.000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	778.344.402.745	105.861.620.200	0	0	884.206.022.945
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.364.734.479	110.000.000	0	0	30.474.734.479

2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.364.734.479	110.000.000	0	0	30.474.734.479
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.882.073.879	110.000.000	0	0	29.992.073.879
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.673.379.955	0	0	0	25.673.379.955
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.673.379.955	0	0	0	25.673.379.955
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.434.440	0	0	0	310.434.440
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.769.600	0	0	0	21.769.600
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.432.440	0	0	0	74.432.440
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.250.000	0	0	0	120.250.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.808.400	0	0	0	61.808.400
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	0	0	0	9.000.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	0	0	0	2.400.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.774.000	0	0	0	20.774.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.479.193.220	0	0	0	1.479.193.220
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	0	0	0	2.700.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.000.000	0	0	0	612.000.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.493.220	0	0	0	864.493.220
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.419.066.264	110.000.000	0	0	2.529.066.264

2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.146.667.720	0	0	0	1.146.667.720
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.905.792	110.000.000	0	0	309.905.792
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.072.492.752	0	0	0	1.072.492.752
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	125.150.500	0	0	0	125.150.500
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	0	0	0	125.150.500
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	0	0	0	125.150.500
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	179.010.100	0	0	0	179.010.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179.010.100	0	0	0	179.010.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	179.010.100	0	0	0	179.010.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	178.500.000	0	0	0	178.500.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	178.500.000	0	0	0	178.500.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	27.500.000	0	0	0	27.500.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	151.000.000	0	0	0	151.000.000
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.778.289.247	7.000.000	0	0	4.785.289.247

1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.778.289.247	7.000.000	0	0	4.785.289.247
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.655.448.147	7.000.000	0	0	3.662.448.147
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.152.309.860	0	0	0	3.152.309.860
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.152.309.860	0	0	0	3.152.309.860
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.690.500	7.000.000	0	0	12.690.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.967.100	0	0	0	1.967.100
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	7.000.000	0	0	7.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.723.400	0	0	0	3.723.400
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.447.787	0	0	0	492.447.787
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.545.896	0	0	0	124.545.896
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.299.668	0	0	0	40.299.668
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.602.223	0	0	0	327.602.223
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11.100.100	0	0	0	11.100.100

2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	11.100.100	0	0	0	11.100.100
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	11.100.100	0	0	0	11.100.100
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	381.834.000	0	0	0	381.834.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000	0	0	0	112.950.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	112.950.000	0	0	0	112.950.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	268.884.000	0	0	0	268.884.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.840.000	0	0	0	6.840.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	262.044.000	0	0	0	262.044.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.101.000	0	0	0	653.101.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.101.000	0	0	0	653.101.000

2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.101.000	0	0	0	653.101.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	76.806.000	0	0	0	76.806.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	0	0	0	76.806.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	76.806.000	0	0	0	76.806.000
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.662.190.042	0	0	0	2.662.190.042
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.662.190.042	0	0	0	2.662.190.042
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	725.784.974	0	0	0	725.784.974
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.521.800	0	0	0	52.521.800
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.143.400	0	0	0	10.143.400
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.278.400	0	0	0	6.278.400
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	0	0	0	30.000.000
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.100.000	0	0	0	6.100.000
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.118.582	0	0	0	323.118.582
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	0	0	0	202.224.000

2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.894.582	0	0	0	120.894.582
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.144.592	0	0	0	350.144.592
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.891.696	0	0	0	125.891.696
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.252.896	0	0	0	124.252.896
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	293.645.438	0	0	0	293.645.438
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	293.645.438	0	0	0	293.645.438
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	293.645.438	0	0	0	293.645.438
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	523.099.224	0	0	0	523.099.224
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	202.464.540	0	0	0	202.464.540
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	202.464.540	0	0	0	202.464.540
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	320.634.684	0	0	0	320.634.684

2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	320.634.684	0	0	0	320.634.684
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.119.660.406	0	0	0	1.119.660.406
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.119.660.406	0	0	0	1.119.660.406
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	358.701.184	0	0	0	358.701.184
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	361.690.887	0	0	0	361.690.887
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	399.268.335	0	0	0	399.268.335
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	162.888.950	0	0	0	162.888.950
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	162.888.950	0	0	0	162.888.950
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	162.888.950	0	0	0	162.888.950
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	162.888.950	0	0	0	162.888.950
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	162.888.950	0	0	0	162.888.950
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.961.192.627	16.416.000	0	0	8.977.608.627
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.961.192.627	16.416.000	0	0	8.977.608.627

2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.314.691.360	16.416.000	0	0	4.331.107.360
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.367.122	0	0	0	3.437.367.122
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.437.367.122	0	0	0	3.437.367.122
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.243.310	0	0	0	81.243.310
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.330.310	0	0	0	13.330.310
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.875.000	0	0	0	55.875.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.038.000	0	0	0	9.038.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	870.000	16.416.000	0	0	17.286.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	870.000	16.416.000	0	0	17.286.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.210.928	0	0	0	795.210.928
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.278.688	0	0	0	346.278.688
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.932.240	0	0	0	348.932.240
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	209.579.144	0	0	0	209.579.144
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	209.579.144	0	0	0	209.579.144

2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	209.579.144	0	0	0	209.579.144
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	28.292.800	0	0	0	28.292.800
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28.292.800	0	0	0	28.292.800
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.292.800	0	0	0	28.292.800
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	209.890.467	0	0	0	209.890.467
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	209.890.467	0	0	0	209.890.467
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	209.890.467	0	0	0	209.890.467
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.198.738.856	0	0	0	4.198.738.856
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4.198.738.856	0	0	0	4.198.738.856
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	1.454.208.596	0	0	0	1.454.208.596
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.630.936.500	0	0	0	2.630.936.500
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	9.068.110	0	0	0	9.068.110

2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	30.875.650	0	0	0	30.875.650
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	73.650.000	0	0	0	73.650.000
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	306.869.158	0	0	0	306.869.158
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	306.869.158	0	0	0	306.869.158
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	173.673.414	0	0	0	173.673.414
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	173.673.414	0	0	0	173.673.414
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	173.673.414	0	0	0	173.673.414
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	133.195.744	0	0	0	133.195.744
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	133.195.744	0	0	0	133.195.744
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	133.195.744	0	0	0	133.195.744
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.282.620.259	0	0	0	21.282.620.259
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.282.620.259	0	0	0	21.282.620.259
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.402.711.807	0	0	0	15.402.711.807
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.187.044	0	0	0	211.187.044
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.659.300	0	0	0	14.659.300
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.527.744	0	0	0	196.527.744
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.054.052.229	0	0	0	13.054.052.229
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.918.921.355	0	0	0	12.918.921.355

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.130.874	0	0	0	135.130.874
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.205.930	0	0	0	180.205.930
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.495.900	0	0	0	5.495.900
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.146.030	0	0	0	19.146.030
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000	0	0	0	93.000.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.649.000	0	0	0	5.649.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.575.000	0	0	0	7.575.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.140.000	0	0	0	45.140.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.000	0	0	0	7.340.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.340.000	0	0	0	7.340.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.532.076	0	0	0	733.532.076
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	0	0	0	250.000.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.532.076	0	0	0	483.532.076
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.394.528	0	0	0	1.216.394.528
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.177.794.528	0	0	0	1.177.794.528

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	0	0	0	38.600.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	114.915.006	0	0	0	114.915.006
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	114.915.006	0	0	0	114.915.006
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	114.915.006	0	0	0	114.915.006
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	727.309.784	0	0	0	727.309.784
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	727.309.784	0	0	0	727.309.784
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	227.318.792	0	0	0	227.318.792
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	499.990.992	0	0	0	499.990.992
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.037.683.662	0	0	0	5.037.683.662
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.037.683.662	0	0	0	5.037.683.662
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	202.835.892	0	0	0	202.835.892

2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	357.108.592	0	0	0	357.108.592
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	213.427.594	0	0	0	213.427.594
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.264.311.584	0	0	0	4.264.311.584
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	349.495.851	0	0	0	349.495.851
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.409.951.074	60.496.000	0	0	27.470.447.074
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000				Dinas Perhubungan	27.409.951.074	60.496.000	0	0	27.470.447.074
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.676.249.100	12.996.000	0	0	20.689.245.100

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.789.660	0	0	0	26.789.660
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.512.870	0	0	0	13.512.870
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.276.790	0	0	0	13.276.790
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.674.601.529	0	0	0	15.674.601.529
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.653.028.709	0	0	0	15.653.028.709
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.572.820	0	0	0	21.572.820
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.749.505	12.996.000	0	0	701.745.505
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.191.800	0	0	0	5.191.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.001.725	12.996.000	0	0	60.997.725
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.893.900	0	0	0	100.893.900
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.971.800	0	0	0	5.971.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000	0	0	0	26.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.690.280	0	0	0	502.690.280
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.570.230	0	0	0	715.570.230
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	0	0	0	4.500.000

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.700.000	0	0	0	292.700.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.370.230	0	0	0	418.370.230
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.370.538.176	0	0	0	2.370.538.176
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.504.096	0	0	0	169.504.096
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	885.512.880	0	0	0	885.512.880
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.610.000	0	0	0	68.610.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.046.911.200	0	0	0	1.046.911.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0	0	200.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.824.934.124	47.500.000	0	0	5.872.434.124
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	477.656.300	47.500.000	0	0	525.156.300
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	200.166.950	47.500.000	0	0	247.666.950
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	277.489.350	0	0	0	277.489.350
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.222.797.596	0	0	0	1.222.797.596

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	349.811.584	0	0	0	349.811.584
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	772.986.012	0	0	0	772.986.012
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	25.829.560	0	0	0	25.829.560
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	13.025.960	0	0	0	13.025.960
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	12.803.600	0	0	0	12.803.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.586.802.200	0	0	0	3.586.802.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.586.802.200	0	0	0	3.586.802.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	511.848.468	0	0	0	511.848.468
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	511.848.468	0	0	0	511.848.468
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	691.617.510	0	0	0	691.617.510

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	673.937.510	0	0	0	673.937.510
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	673.937.510	0	0	0	673.937.510
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	17.680.000	0	0	0	17.680.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	8.840.000	0	0	0	8.840.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8.840.000	0	0	0	8.840.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	217.150.340	0	0	0	217.150.340
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	217.150.340	0	0	0	217.150.340
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	217.150.340	0	0	0	217.150.340
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47.494.561.328	103.961.009.000	0	0	151.455.570.328
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	47.494.561.328	103.961.009.000	0	0	151.455.570.328
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.526.128.282	345.509.000	0	0	18.871.637.282
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.090.900	0	0	0	23.090.900
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.763.590	0	0	0	12.763.590
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.738.970	0	0	0	4.738.970

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.588.340	0	0	0	5.588.340
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.145.964.884	0	0	0	14.145.964.884
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.875.964.884	0	0	0	12.875.964.884
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.270.000.000	0	0	0	1.270.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.834.650	328.865.000	0	0	564.699.650
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.615.500	0	0	0	4.615.500
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.122.750	328.865.000	0	0	354.987.750
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.930.400	0	0	0	8.930.400
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.805.000	0	0	0	35.805.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.361.000	0	0	0	80.361.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510.000	16.644.000	0	0	17.154.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.000	16.644.000	0	0	17.154.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.135.000	0	0	0	401.135.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.020.000	0	0	0	3.020.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.605.000	0	0	0	262.605.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.510.000	0	0	0	135.510.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.719.592.848	0	0	0	3.719.592.848

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.866.980.272	0	0	0	1.866.980.272
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	4.800.000	0	0	0	4.800.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.740.000	0	0	0	149.740.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.537.138.576	0	0	0	1.537.138.576
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.934.000	0	0	0	160.934.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.542.030.310	304.100.000	0	0	15.846.130.310
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	15.542.030.310	304.100.000	0	0	15.846.130.310
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.637.287.578	138.500.000	0	0	1.775.787.578
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9.904.915.644	0	0	0	9.904.915.644
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	282.027.318	0	0	0	282.027.318
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.437.653.968	0	0	0	2.437.653.968
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	813.654.432	0	0	0	813.654.432
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	466.491.370	165.600.000	0	0	632.091.370
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.426.402.736	103.311.400.000	0	0	116.737.802.736
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	13.426.402.736	103.311.400.000	0	0	116.737.802.736

2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	817.334.139	102.210.000.000	0	0	103.027.334.139
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	8.188.794.739	1.046.500.000	0	0	9.235.294.739
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.420.273.858	54.900.000	0	0	4.475.173.858
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	22.441.608.190	0	0	0	22.441.608.190
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.441.608.190	0	0	0	22.441.608.190
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.145.548.968	0	0	0	17.145.548.968
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.630.016	0	0	0	80.630.016
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.417.006	0	0	0	78.417.006
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.213.010	0	0	0	2.213.010
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.255.730.998	0	0	0	14.255.730.998
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.255.730.998	0	0	0	14.255.730.998
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.311.990	0	0	0	101.311.990
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.688.750	0	0	0	10.688.750
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.658.240	0	0	0	67.658.240
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.965.000	0	0	0	15.965.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.574.563.592	0	0	0	1.574.563.592
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	0	0	0	319.700.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.251.863.592	0	0	0	1.251.863.592
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.312.372	0	0	0	1.133.312.372
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.244.984	0	0	0	825.244.984
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.270.000	0	0	0	53.270.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.797.388	0	0	0	254.797.388
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	255.064.240	0	0	0	255.064.240
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.956.000	0	0	0	17.956.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.956.000	0	0	0	17.956.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	237.108.240	0	0	0	237.108.240

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	237.108.240	0	0	0	237.108.240
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.896	0	0	0	118.552.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.896	0	0	0	118.552.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.896	0	0	0	118.552.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.844.528.896	0	0	0	3.844.528.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.844.528.896	0	0	0	3.844.528.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.844.528.896	0	0	0	3.844.528.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	468.864.290	0	0	0	468.864.290
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	468.864.290	0	0	0	468.864.290
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	315.246.554	0	0	0	315.246.554

2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	153.617.736	0	0	0	153.617.736
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	609.048.900	0	0	0	609.048.900
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	609.048.900	0	0	0	609.048.900
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	609.048.900	0	0	0	609.048.900
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22.730.052.235	27.900.000	0	0	22.757.952.235
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.730.052.235	27.900.000	0	0	22.757.952.235
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.802.924.907	27.900.000	0	0	19.830.824.907
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.361.963.422	0	0	0	17.361.963.422
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.361.963.422	0	0	0	17.361.963.422
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.975.285	0	0	0	190.975.285
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.638.850	0	0	0	18.638.850
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.177.845	0	0	0	41.177.845
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.466.990	0	0	0	61.466.990

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.231.600	0	0	0	16.231.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.460.000	0	0	0	53.460.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	27.900.000	0	0	27.900.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	27.900.000	0	0	27.900.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.333.728.960	0	0	0	1.333.728.960
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	0	0	0	178.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.155.728.960	0	0	0	1.155.728.960
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.257.240	0	0	0	916.257.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	784.372.240	0	0	0	784.372.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.885.000	0	0	0	131.885.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.080.316	0	0	0	450.080.316
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	84.523.746	0	0	0	84.523.746
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	84.523.746	0	0	0	84.523.746
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	365.556.570	0	0	0	365.556.570

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	365.556.570	0	0	0	365.556.570
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	458.026.986	0	0	0	458.026.986
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	458.026.986	0	0	0	458.026.986
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	168.678.196	0	0	0	168.678.196
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	289.348.790	0	0	0	289.348.790
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.047.798.138	0	0	0	1.047.798.138
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.047.798.138	0	0	0	1.047.798.138
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	820.783.972	0	0	0	820.783.972
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	227.014.166	0	0	0	227.014.166
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	792.840.792	0	0	0	792.840.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	792.840.792	0	0	0	792.840.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	655.191.792	0	0	0	655.191.792

2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	137.649.000	0	0	0	137.649.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	178.381.096	0	0	0	178.381.096
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	178.381.096	0	0	0	178.381.096
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	178.381.096	0	0	0	178.381.096
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.336.552.025	0	0	0	35.336.552.025
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	35.336.552.025	0	0	0	35.336.552.025
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	767.258.585	0	0	0	767.258.585
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	767.258.585	0	0	0	767.258.585
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	767.258.585	0	0	0	767.258.585
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	34.069.293.440	0	0	0	34.069.293.440
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	33.694.293.440	0	0	0	33.694.293.440
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	33.694.293.440	0	0	0	33.694.293.440
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	375.000.000	0	0	0	375.000.000

2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	375.000.000	0	0	0	375.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	486.822.218	0	0	0	486.822.218
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	486.822.218	0	0	0	486.822.218
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	486.822.218	0	0	0	486.822.218
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	486.822.218	0	0	0	486.822.218
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	220.504.016	0	0	0	220.504.016
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	140.047.996	0	0	0	140.047.996
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	126.270.206	0	0	0	126.270.206
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	341.503.236	0	0	0	341.503.236
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	341.503.236	0	0	0	341.503.236
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	341.503.236	0	0	0	341.503.236
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	212.092.878	0	0	0	212.092.878

2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	116.551.978	0	0	0	116.551.978
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	95.540.900	0	0	0	95.540.900
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	129.410.358	0	0	0	129.410.358
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	129.410.358	0	0	0	129.410.358
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	552.625.760.542	1.678.799.200	0	0	554.304.559.742
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kebudayaan	74.664.454.550	568.781.200	0	0	75.233.235.750
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.567.647.692	568.781.200	0	0	38.136.428.892
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.609.696	0	0	0	118.609.696
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.637.696	0	0	0	110.637.696
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.972.000	0	0	0	7.972.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.334.504.708	0	0	0	22.334.504.708
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.979.924.976	0	0	0	21.979.924.976
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	349.539.732	0	0	0	349.539.732
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.040.000	0	0	0	5.040.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.267.520	160.251.000	0	0	1.106.518.520
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	363.582.320	0	0	0	363.582.320

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.073.800	160.251.000	0	0	207.324.800
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	287.625.000	0	0	0	287.625.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.611.400	0	0	0	61.611.400
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.600.000	0	0	0	43.600.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	0	0	0	18.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.775.000	0	0	0	124.775.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.395.000	396.530.200	0	0	533.925.200
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.365.000	219.222.000	0	0	281.587.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.030.000	177.308.200	0	0	252.338.200
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.509.911.944	12.000.000	0	0	6.521.911.944
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.020.000	0	0	0	15.020.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.901.000.000	0	0	0	1.901.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	654.944.060	12.000.000	0	0	666.944.060
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.938.947.884	0	0	0	3.938.947.884
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.520.958.824	0	0	0	7.520.958.824
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.263.253.888	0	0	0	1.263.253.888

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	415.075.000	0	0	0	415.075.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.842.629.936	0	0	0	5.842.629.936
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	31.281.654.036	0	0	0	31.281.654.036
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.995.917.436	0	0	0	4.995.917.436
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.378.938.208	0	0	0	1.378.938.208
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3.616.979.228	0	0	0	3.616.979.228
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	15.138.780.790	0	0	0	15.138.780.790
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	13.644.869.035	0	0	0	13.644.869.035
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.493.911.755	0	0	0	1.493.911.755
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.146.955.810	0	0	0	11.146.955.810
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	11.146.955.810	0	0	0	11.146.955.810
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.217.138.902	0	0	0	1.217.138.902

2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.217.138.902	0	0	0	1.217.138.902
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	485.091.100	0	0	0	485.091.100
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	732.047.802	0	0	0	732.047.802
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	336.500.000	0	0	0	336.500.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	336.500.000	0	0	0	336.500.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	336.500.000	0	0	0	336.500.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	661.513.920	0	0	0	661.513.920
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	124.999.900	0	0	0	124.999.900
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	124.999.900	0	0	0	124.999.900
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	536.514.020	0	0	0	536.514.020
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	405.623.020	0	0	0	405.623.020
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	130.891.000	0	0	0	130.891.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.600.000.000	0	0	0	3.600.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	3.600.000.000	0	0	0	3.600.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.080.000.280	0	0	0	1.080.000.280
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.800.000.370	0	0	0	1.800.000.370
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	719.999.350	0	0	0	719.999.350
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000				Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	477.961.305.992	1.110.018.000	0	0	479.071.323.992

2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.548.059.498	1.110.018.000	0	0	15.658.077.498
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.861.000	0	0	0	13.861.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.861.000	0	0	0	13.861.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.255.081.424	0	0	0	9.255.081.424
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.255.081.424	0	0	0	9.255.081.424
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.368.900	0	0	0	926.368.900
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.354.200	0	0	0	24.354.200
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.565.700	0	0	0	46.565.700
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.216.000	0	0	0	17.216.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	838.233.000	0	0	0	838.233.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.780.000	1.110.018.000	0	0	1.227.798.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.780.000	1.110.018.000	0	0	1.227.798.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.382.250	0	0	0	944.382.250
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944.382.250	0	0	0	944.382.250
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.290.585.924	0	0	0	3.290.585.924
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.384.600.896	0	0	0	1.384.600.896

2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.905.985.028	0	0	0	1.905.985.028
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	463.413.246.494	0	0	0	463.413.246.494
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	459.066.605.985	0	0	0	459.066.605.985
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	457.870.600.241	0	0	0	457.870.600.241
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	1.196.005.744	0	0	0	1.196.005.744
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	705.727.988	0	0	0	705.727.988
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	151.055.550	0	0	0	151.055.550
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	554.672.438	0	0	0	554.672.438
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.03		Penyelenggaraan Desa Adat	632.068.892	0	0	0	632.068.892
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	632.068.892	0	0	0	632.068.892
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia	3.008.843.629	0	0	0	3.008.843.629
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	3.008.843.629	0	0	0	3.008.843.629
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	444.857.938	0	0	0	444.857.938
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	0	0	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000				Sekretariat Daerah	444.857.938	0	0	0	444.857.938
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	444.857.938	0	0	0	444.857.938
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	307.381.840	0	0	0	307.381.840
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.999.850	0	0	0	9.999.850

2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.140	0	0	0	50.000.140
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	209.905.402	0	0	0	209.905.402
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448	0	0	0	37.476.448
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	137.476.098	0	0	0	137.476.098
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	137.476.098	0	0	0	137.476.098
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	164.453.346	0	0	0	164.453.346
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	0	0	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000				Sekretariat Daerah	164.453.346	0	0	0	164.453.346
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	164.453.346	0	0	0	164.453.346
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	37.476.448	0	0	0	37.476.448
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	37.476.448	0	0	0	37.476.448
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	126.976.898	0	0	0	126.976.898
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	116.976.898	0	0	0	116.976.898
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	184.051.793.071	2.097.340.680	0	0	186.149.133.751
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.096.281.797	1.113.620.000	0	0	26.209.901.797

3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kelautan dan Perikanan	25.096.281.797	1.113.620.000	0	0	26.209.901.797
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.999.798.019	2.000.000	0	0	24.001.798.019
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.505.300.291	0	0	0	20.505.300.291
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.505.300.291	0	0	0	20.505.300.291
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.157.480	2.000.000	0	0	267.157.480
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.952.380	0	0	0	16.952.380
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	248.205.100	2.000.000	0	0	250.205.100
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.229.340.248	0	0	0	3.229.340.248
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.345.976	0	0	0	919.345.976
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.122.574.272	0	0	0	2.122.574.272
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.420.000	0	0	0	187.420.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	187.815.696	1.105.620.000	0	0	1.293.435.696
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	40.633.500	1.105.620.000	0	0	1.146.253.500
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	40.633.500	1.105.620.000	0	0	1.146.253.500
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.182.196	0	0	0	147.182.196
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.182.196	0	0	0	147.182.196

3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	469.284.796	0	0	0	469.284.796
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	469.284.796	0	0	0	469.284.796
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	469.284.796	0	0	0	469.284.796
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	93.999.770	6.000.000	0	0	99.999.770
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	93.999.770	6.000.000	0	0	99.999.770
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	93.999.770	6.000.000	0	0	99.999.770
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	345.383.516	0	0	0	345.383.516
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	345.383.516	0	0	0	345.383.516
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	336.883.516	0	0	0	336.883.516
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	8.500.000	0	0	0	8.500.000
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.960.349.906	0	0	0	15.960.349.906

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pariwisata	15.960.349.906	0	0	0	15.960.349.906
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.271.974.457	0	0	0	14.271.974.457
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.597.394	0	0	0	116.597.394
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.313.098	0	0	0	40.313.098
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.284.296	0	0	0	76.284.296
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.617.956.032	0	0	0	12.617.956.032
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.617.956.032	0	0	0	12.617.956.032
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.071.500	0	0	0	89.071.500
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.593.000	0	0	0	3.593.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.711.200	0	0	0	10.711.200
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	0	0	0	55.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.798.300	0	0	0	6.798.300
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	0	0	0	2.220.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.749.000	0	0	0	10.749.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.140.823	0	0	0	344.140.823
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000	0	0	0	138.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.140.823	0	0	0	204.140.823

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.208.708	0	0	0	1.104.208.708
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.162.300	0	0	0	266.162.300
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	787.005.408	0	0	0	787.005.408
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.041.000	0	0	0	51.041.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	358.469.345	0	0	0	358.469.345
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2.077.500	0	0	0	2.077.500
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2.077.500	0	0	0	2.077.500
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	216.204.749	0	0	0	216.204.749
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	216.204.749	0	0	0	216.204.749
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.187.096	0	0	0	140.187.096
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	115.548.996	0	0	0	115.548.996
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	24.638.100	0	0	0	24.638.100
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	580.213.291	0	0	0	580.213.291
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	580.213.291	0	0	0	580.213.291

3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	227.487.896	0	0	0	227.487.896
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	80.046.751	0	0	0	80.046.751
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	272.678.644	0	0	0	272.678.644
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	235.133.799	0	0	0	235.133.799
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	117.725.051	0	0	0	117.725.051
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	117.725.051	0	0	0	117.725.051
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	117.408.748	0	0	0	117.408.748
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	117.408.748	0	0	0	117.408.748
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	514.559.014	0	0	0	514.559.014
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	514.559.014	0	0	0	514.559.014
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	514.559.014	0	0	0	514.559.014
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	75.659.362.492	1.102.500	0	0	75.660.464.992
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.659.362.492	1.102.500	0	0	75.660.464.992

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.328.124.860	0	0	0	58.328.124.860
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	596.276.720	0	0	0	596.276.720
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	317.784.084	0	0	0	317.784.084
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.492.636	0	0	0	278.492.636
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.192.042.867	0	0	0	52.192.042.867
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.795.425.387	0	0	0	51.795.425.387
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	396.617.480	0	0	0	396.617.480
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.071.995	0	0	0	313.071.995
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.749.180	0	0	0	54.749.180
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.225.215	0	0	0	39.225.215
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	0	0	0	175.000.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.097.600	0	0	0	44.097.600
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.730.104.574	0	0	0	1.730.104.574
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	871.776.000	0	0	0	871.776.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.328.574	0	0	0	858.328.574
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.496.628.704	0	0	0	3.496.628.704
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.385.557.504	0	0	0	2.385.557.504

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	881.958.304	0	0	0	881.958.304
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.112.896	0	0	0	229.112.896
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.909.924.305	1.102.500	0	0	12.911.026.805
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	362.608.292	0	0	0	362.608.292
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	362.608.292	0	0	0	362.608.292
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.314.692.944	0	0	0	5.314.692.944
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	736.389.362	0	0	0	736.389.362
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.364.595.672	0	0	0	1.364.595.672
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.217.766.466	0	0	0	1.217.766.466
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.995.941.444	0	0	0	1.995.941.444
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.177.897.330	1.102.500	0	0	1.178.999.830
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.177.897.330	1.102.500	0	0	1.178.999.830
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.054.725.739	0	0	0	6.054.725.739

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.157.926.867	0	0	0	4.157.926.867
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.896.798.872	0	0	0	1.896.798.872
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	936.817.188	0	0	0	936.817.188
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	936.817.188	0	0	0	936.817.188
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	680.832.480	0	0	0	680.832.480
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	255.984.708	0	0	0	255.984.708
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.067.730.926	0	0	0	1.067.730.926
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	308.092.896	0	0	0	308.092.896
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	308.092.896	0	0	0	308.092.896
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	712.022.782	0	0	0	712.022.782
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	340.118.240	0	0	0	340.118.240

3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	371.904.542	0	0	0	371.904.542
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	47.615.248	0	0	0	47.615.248
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	47.615.248	0	0	0	47.615.248
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.295.861.869	0	0	0	2.295.861.869
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.295.861.869	0	0	0	2.295.861.869
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	756.741.987	0	0	0	756.741.987
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.048.290.586	0	0	0	1.048.290.586
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	490.829.296	0	0	0	490.829.296
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	120.903.344	0	0	0	120.903.344
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	120.903.344	0	0	0	120.903.344
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	120.903.344	0	0	0	120.903.344
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	43.255.164.689	132.380.000	0	0	43.387.544.689
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.255.164.689	132.380.000	0	0	43.387.544.689
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.821.557.820	132.380.000	0	0	37.953.937.820

3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.720	0	0	0	35.827.720
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.720	0	0	0	35.827.720
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.576.430.323	0	0	0	32.576.430.323
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.534.900.553	0	0	0	32.534.900.553
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.529.770	0	0	0	41.529.770
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.216.705	7.980.000	0	0	740.196.705
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.932.500	0	0	0	29.932.500
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.540.405	7.980.000	0	0	166.520.405
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.000.000	0	0	0	234.000.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.101.800	0	0	0	53.101.800
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.970.000	0	0	0	12.970.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.250.000	0	0	0	26.250.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.422.000	0	0	0	217.422.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.170.000	124.400.000	0	0	149.570.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.170.000	124.400.000	0	0	149.570.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.961.426	0	0	0	925.961.426
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.095.242	0	0	0	281.095.242

3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.866.184	0	0	0	644.866.184
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.525.951.646	0	0	0	3.525.951.646
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.092.789.790	0	0	0	2.092.789.790
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	346.710.000	0	0	0	346.710.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.086.451.856	0	0	0	1.086.451.856
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.895.944.786	0	0	0	4.895.944.786
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.773.437.100	0	0	0	4.773.437.100
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	4.155.237.100	0	0	0	4.155.237.100
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	618.200.000	0	0	0	618.200.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.507.686	0	0	0	122.507.686
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.686	0	0	0	122.507.686
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	399.999.900	0	0	0	399.999.900
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	399.999.900	0	0	0	399.999.900
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	399.999.900	0	0	0	399.999.900

3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	137.662.183	0	0	0	137.662.183
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.662.183	0	0	0	137.662.183
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	137.662.183	0	0	0	137.662.183
3	29					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	186.047.592	0	0	0	186.047.592
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	186.047.592	0	0	0	186.047.592
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	186.047.592	0	0	0	186.047.592
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	186.047.592	0	0	0	186.047.592
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	186.047.592	0	0	0	186.047.592
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	17.632.467.003	850.238.180	0	0	18.482.705.183
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.632.467.003	850.238.180	0	0	18.482.705.183
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.483.391.703	850.238.180	0	0	17.333.629.883
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.592.962.401	0	0	0	13.592.962.401
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.592.962.401	0	0	0	13.592.962.401
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.789.170	850.238.180	0	0	1.281.027.350
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.952.100	0	0	0	12.952.100
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.911.070	850.238.180	0	0	966.149.250
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	0	0	0	85.000.000

3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.217.000	0	0	0	16.217.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.840.000	0	0	0	5.840.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.869.000	0	0	0	194.869.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.870.148	0	0	0	961.870.148
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.000.000	0	0	0	222.000.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539.870.148	0	0	0	539.870.148
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.497.769.984	0	0	0	1.497.769.984
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.080.817.088	0	0	0	1.080.817.088
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	416.952.896	0	0	0	416.952.896
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	334.463.198	0	0	0	334.463.198
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	334.463.198	0	0	0	334.463.198
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	334.463.198	0	0	0	334.463.198
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	95.778.800	0	0	0	95.778.800

3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	95.778.800	0	0	0	95.778.800
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	95.778.800	0	0	0	95.778.800
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	8.483.820	0	0	0	8.483.820
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8.483.820	0	0	0	8.483.820
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	8.483.820	0	0	0	8.483.820
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	661.832.724	0	0	0	661.832.724
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	494.826.448	0	0	0	494.826.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	494.826.448	0	0	0	494.826.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	103.869.848	0	0	0	103.869.848
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	103.869.848	0	0	0	103.869.848
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	63.136.428	0	0	0	63.136.428
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	63.136.428	0	0	0	63.136.428
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.516.758	0	0	0	48.516.758

3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.516.758	0	0	0	48.516.758
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.516.758	0	0	0	48.516.758
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.262.119.592	0	0	0	6.262.119.592
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.262.119.592	0	0	0	6.262.119.592
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.955.457.050	0	0	0	1.955.457.050
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.863.774	0	0	0	1.766.863.774
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.766.863.774	0	0	0	1.766.863.774
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.990.380	0	0	0	24.990.380
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.710.380	0	0	0	17.710.380
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	0	0	0	1.000.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.280.000	0	0	0	2.280.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.506.448	0	0	0	53.506.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.506.448	0	0	0	53.506.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.096.448	0	0	0	110.096.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.096.448	0	0	0	110.096.448

3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.170.958.454	0	0	0	4.170.958.454
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.170.958.454	0	0	0	4.170.958.454
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	11.222.420	0	0	0	11.222.420
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	327.169.110	0	0	0	327.169.110
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.832.566.924	0	0	0	3.832.566.924
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	135.704.088	0	0	0	135.704.088
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	135.704.088	0	0	0	135.704.088
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	135.704.088	0	0	0	135.704.088
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	360.147.253.816	1.621.172.600	0	0	361.768.426.416
4	01					SEKRETARIAT DAERAH	155.740.169.210	1.486.472.600	0	0	157.226.641.810
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000				Sekretariat Daerah	155.740.169.210	1.486.472.600	0	0	157.226.641.810
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.255.381.103	323.272.600	0	0	127.578.653.703
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.045.537.800	0	0	0	1.045.537.800

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.045.537.800	0	0	0	1.045.537.800
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.296.637.961	0	0	0	74.296.637.961
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.642.003.615	0	0	0	73.642.003.615
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	654.634.346	0	0	0	654.634.346
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	383.535.005	0	0	0	383.535.005
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	383.535.005	0	0	0	383.535.005
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.379.510	0	0	0	7.379.510
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.379.510	0	0	0	7.379.510
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.325.524.091	220.372.600	0	0	11.545.896.691
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	358.412.742	0	0	0	358.412.742
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.602.543.103	220.372.600	0	0	3.822.915.703
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.242.500	0	0	0	57.242.500
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.648.264.444	0	0	0	3.648.264.444
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.073.893.880	0	0	0	3.073.893.880
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	585.167.422	0	0	0	585.167.422
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.993.593.052	0	0	0	9.993.593.052
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.708.500.000	0	0	0	1.708.500.000

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.551.092.944	0	0	0	3.551.092.944
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.734.000.108	0	0	0	4.734.000.108
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.121.026.662	17.900.000	0	0	11.138.926.662
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.148.254.340	0	0	0	2.148.254.340
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.981.846.350	0	0	0	6.981.846.350
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.820.000	0	0	0	355.820.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.605.105.972	17.900.000	0	0	1.623.005.972
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	0	0	0	30.000.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.747.349.060	0	0	0	4.747.349.060
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	0	0	0	247.349.060
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.500.000.000	0	0	0	4.500.000.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	11.889.281.466	85.000.000	0	0	11.974.281.466
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.635.476.759	60.000.000	0	0	8.695.476.759

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.993.324.707	25.000.000	0	0	3.018.324.707
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	260.480.000	0	0	0	260.480.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	469.974.800	0	0	0	469.974.800
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	469.974.800	0	0	0	469.974.800
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	1.975.541.696	0	0	0	1.975.541.696
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.975.541.696	0	0	0	1.975.541.696
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	271.872.406	0	0	0	271.872.406
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	111.469.058	0	0	0	111.469.058
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	14.957.855	0	0	0	14.957.855
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	36.228.955	0	0	0	36.228.955
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	60.282.248	0	0	0	60.282.248
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	160.403.348	0	0	0	160.403.348
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40.452.940	0	0	0	40.452.940
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	28.544.400	0	0	0	28.544.400
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.249.350	0	0	0	11.249.350
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	14.021.610	0	0	0	14.021.610
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	66.135.048	0	0	0	66.135.048
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.226.585.227	0	0	0	2.226.585.227
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	182.449.668	0	0	0	182.449.668
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	138.656.788	0	0	0	138.656.788

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	43.792.880	0	0	0	43.792.880
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	354.512.690	0	0	0	354.512.690
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	203.521.144	0	0	0	203.521.144
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	150.991.546	0	0	0	150.991.546
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.689.622.869	0	0	0	1.689.622.869
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	163.461.209	0	0	0	163.461.209
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1.526.161.660	0	0	0	1.526.161.660
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.038.894.896	0	0	0	21.038.894.896
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6.699.871.726	0	0	0	6.699.871.726
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	6.015.491.970	0	0	0	6.015.491.970
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	684.379.756	0	0	0	684.379.756
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	14.339.023.170	0	0	0	14.339.023.170
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	14.339.023.170	0	0	0	14.339.023.170
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.802.769.888	0	0	0	3.802.769.888
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.748.481.856	0	0	0	1.748.481.856
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.073.905.792	0	0	0	1.073.905.792
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	187.382.240	0	0	0	187.382.240
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	149.905.792	0	0	0	149.905.792

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	337.288.032	0	0	0	337.288.032
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.054.288.032	0	0	0	2.054.288.032
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.866.905.792	0	0	0	1.866.905.792
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	187.382.240	0	0	0	187.382.240
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	232.816.710	0	0	0	232.816.710
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	51.353.550	0	0	0	51.353.550
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	51.353.550	0	0	0	51.353.550
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	28.869.710	0	0	0	28.869.710
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	28.869.710	0	0	0	28.869.710
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	152.593.450	0	0	0	152.593.450
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	152.593.450	0	0	0	152.593.450
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	853.473.950	1.163.200.000	0	0	2.016.673.950
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	248.798.600	1.091.200.000	0	0	1.339.998.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.990.000	0	0	0	24.990.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	176.721.600	1.091.200.000	0	0	1.267.921.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.087.000	0	0	0	47.087.000

4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	89.070.510	72.000.000	0	0	161.070.510
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	66.006.510	0	0	0	66.006.510
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	23.064.000	72.000.000	0	0	95.064.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	515.604.840	0	0	0	515.604.840
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	298.365.000	0	0	0	298.365.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.982.840	0	0	0	50.982.840
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	166.257.000	0	0	0	166.257.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	58.375.030	0	0	0	58.375.030
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	33.285.330	0	0	0	33.285.330
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	33.285.330	0	0	0	33.285.330
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.089.700	0	0	0	25.089.700
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.089.700	0	0	0	25.089.700
4	02					SEKRETARIAT DPRD	204.407.084.606	134.700.000	0	0	204.541.784.606
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000				Sekretariat DPRD	204.407.084.606	134.700.000	0	0	204.541.784.606
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.015.454.065	44.700.000	0	0	85.060.154.065
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.395.946	0	0	0	265.395.946

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.524.898	0	0	0	141.524.898
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.871.048	0	0	0	123.871.048
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.568.971.816	0	0	0	10.568.971.816
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.337.405.520	0	0	0	10.337.405.520
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.403.648	0	0	0	116.403.648
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	115.162.648	0	0	0	115.162.648
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.689.394.853	0	0	0	6.689.394.853
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.238.775	0	0	0	132.238.775
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.232.480	0	0	0	276.232.480
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	782.938.254	0	0	0	782.938.254
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.269.400	0	0	0	62.269.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	930.000.000	0	0	0	930.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.505.715.944	0	0	0	4.505.715.944
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	44.700.000	0	0	44.700.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	44.700.000	0	0	44.700.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.422.535.832	0	0	0	2.422.535.832
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	0	0	0	7.500.000

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	890.000.000	0	0	0	890.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.525.035.832	0	0	0	1.525.035.832
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.771.945.996	0	0	0	3.771.945.996
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.933.401.096	0	0	0	2.933.401.096
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193.458.400	0	0	0	193.458.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645.086.500	0	0	0	645.086.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	59.675.837.172	0	0	0	59.675.837.172
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.298.132.074	0	0	0	58.298.132.074
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.098.350.000	0	0	0	1.098.350.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	279.355.098	0	0	0	279.355.098
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD	1.621.372.450	0	0	0	1.621.372.450
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	229.421.490	0	0	0	229.421.490
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.391.950.960	0	0	0	1.391.950.960
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	119.391.630.541	90.000.000	0	0	119.481.630.541
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	16.346.065.318	0	0	0	16.346.065.318
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.891.443.906	0	0	0	1.891.443.906

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	13.604.734.006	0	0	0	13.604.734.006
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	849.887.406	0	0	0	849.887.406
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	13.731.667.440	0	0	0	13.731.667.440
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	2.738.500.048	0	0	0	2.738.500.048
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.770.418.098	0	0	0	2.770.418.098
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pembahasan APBD	2.742.114.098	0	0	0	2.742.114.098
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	2.738.369.798	0	0	0	2.738.369.798
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.742.265.398	0	0	0	2.742.265.398
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	28.882.239.284	0	0	0	28.882.239.284
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6.583.992.692	0	0	0	6.583.992.692
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.472.319.200	0	0	0	6.472.319.200
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7.129.576.516	0	0	0	7.129.576.516
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.992.273.196	0	0	0	5.992.273.196
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.704.077.680	0	0	0	2.704.077.680
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	15.277.907.586	90.000.000	0	0	15.367.907.586
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	5.412.289.344	0	0	0	5.412.289.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.346.479.596	90.000.000	0	0	3.436.479.596
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.246.703.500	0	0	0	3.246.703.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	903.498.650	0	0	0	903.498.650

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.368.936.496	0	0	0	2.368.936.496
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	30.496.661.985	0	0	0	30.496.661.985
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.773.746.896	0	0	0	5.773.746.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.170.509.050	0	0	0	2.170.509.050
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	22.552.406.039	0	0	0	22.552.406.039
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	932.540.096	0	0	0	932.540.096
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	932.540.096	0	0	0	932.540.096
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	13.724.548.832	0	0	0	13.724.548.832
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.692.836.984	0	0	0	11.692.836.984
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.031.711.848	0	0	0	2.031.711.848
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	297.863.416.073	5.626.142.600	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.670.269.132.916
5	01					PERENCANAAN	23.573.750.843	146.500.000	0	0	23.720.250.843
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.573.750.843	146.500.000	0	0	23.720.250.843
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.780.621.384	46.500.000	0	0	15.827.121.384
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.275.530	0	0	0	263.275.530
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239.812.600	0	0	0	239.812.600
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.462.930	0	0	0	23.462.930
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.803.837.631	0	0	0	12.803.837.631
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.517.817.040	0	0	0	12.517.817.040
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.117.995	0	0	0	198.117.995

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	87.902.596	0	0	0	87.902.596
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.947.986	46.500.000	0	0	588.447.986
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.703.698	0	0	0	43.703.698
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.033.548	46.500.000	0	0	116.533.548
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.276.448	0	0	0	126.276.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.884.948	0	0	0	73.884.948
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.916.448	0	0	0	74.916.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.426.448	0	0	0	42.426.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.706.448	0	0	0	110.706.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.606.216	0	0	0	965.606.216
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.476.448	0	0	0	40.476.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.276.448	0	0	0	342.276.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.853.320	0	0	0	582.853.320
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.954.021	0	0	0	1.205.954.021
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	779.224.480	0	0	0	779.224.480
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.986.448	0	0	0	132.986.448

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.743.093	0	0	0	293.743.093
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.461.454.662	100.000.000	0	0	5.561.454.662
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.944.538.880	50.000.000	0	0	2.994.538.880
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	48.368.940	0	0	0	48.368.940
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.896.169.940	50.000.000	0	0	2.946.169.940
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	698.026.742	0	0	0	698.026.742
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	420.083.626	0	0	0	420.083.626
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	277.943.116	0	0	0	277.943.116
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.818.889.040	50.000.000	0	0	1.868.889.040
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	85.669.200	0	0	0	85.669.200
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	247.600.240	50.000.000	0	0	297.600.240
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.485.619.600	0	0	0	1.485.619.600
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.331.674.797	0	0	0	2.331.674.797

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	897.059.160	0	0	0	897.059.160
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.967.696	0	0	0	84.967.696
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.529.728	0	0	0	40.529.728
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.527.748	0	0	0	44.527.748
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	40.341.648	0	0	0	40.341.648
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.572.488	0	0	0	89.572.488
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	44.966.908	0	0	0	44.966.908
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	498.455.196	0	0	0	498.455.196
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.697.748	0	0	0	53.697.748

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	605.640.162	0	0	0	605.640.162
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	168.775.054	0	0	0	168.775.054
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	196.484.514	0	0	0	196.484.514
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.778.500	0	0	0	8.778.500
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	231.602.094	0	0	0	231.602.094
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	828.975.475	0	0	0	828.975.475
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	235.629.195	0	0	0	235.629.195
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	181.846.740	0	0	0	181.846.740
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236.831.540	0	0	0	236.831.540

5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	174.668.000	0	0	0	174.668.000
5	02					KEUANGAN	194.523.875.739	4.290.018.400	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.565.593.468.382
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.870.922.573	347.329.000	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.414.997.825.816
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.857.725.715	347.329.000	0	0	23.205.054.715
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.381.270	0	0	0	31.381.270
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.381.270	0	0	0	31.381.270
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.446.218.288	0	0	0	19.446.218.288
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.244.694.968	0	0	0	19.244.694.968
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.523.320	0	0	0	201.523.320
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.052.385	347.329.000	0	0	1.335.381.385
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	510.000	347.329.000	0	0	347.839.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	987.542.385	0	0	0	987.542.385
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.392.073.772	0	0	0	2.392.073.772
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	587.350.096	0	0	0	587.350.096
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.100.700	0	0	0	135.100.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.669.622.976	0	0	0	1.669.622.976

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	21.349.053.256	0	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.388.128.627.499
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.757.169.262	0	0	0	2.757.169.262
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.757.169.262	0	0	0	2.757.169.262
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	213.748.700	0	0	0	213.748.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	213.748.700	0	0	0	213.748.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	200.692.050	0	0	0	200.692.050
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	200.692.050	0	0	0	200.692.050
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	402.443.244	0	0	0	402.443.244
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	402.443.244	0	0	0	402.443.244
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.775.000.000	0	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.384.554.574.243

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	17.775.000.000	0	0	0	17.775.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	282.897.903.508	282.897.903.508
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	50.000.000.000	0	50.000.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	0	0	0	1.033.881.670.735	1.033.881.670.735
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.664.143.602	0	0	0	3.664.143.602
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.664.143.602	0	0	0	3.664.143.602
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	249.633.680	0	0	0	249.633.680
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	302.560.800	0	0	0	302.560.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.299.220.720	0	0	0	2.299.220.720
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	812.728.402	0	0	0	812.728.402
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000				Badan Pendapatan Daerah	146.652.953.166	3.942.689.400	0	0	150.595.642.566
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.932.836.818	3.942.689.400	0	0	132.875.526.218
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.621.700	0	0	0	20.621.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.091.400	0	0	0	11.091.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.300	0	0	0	9.530.300
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.636.310.861	0	0	0	110.636.310.861
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110.636.310.861	0	0	0	110.636.310.861
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.558.381.665	0	0	0	4.558.381.665
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.978.800	0	0	0	76.978.800

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.467.937.965	0	0	0	1.467.937.965
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	0	0	0	300.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.928.552.900	0	0	0	1.928.552.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.752.000	0	0	0	47.752.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	164.050.000	0	0	0	164.050.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.110.000	0	0	0	573.110.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000	2.275.100.000	0	0	2.288.100.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	200.000.000	0	0	200.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.799.500.000	0	0	1.799.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000	275.600.000	0	0	288.600.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.372.270.000	0	0	0	4.372.270.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.260.000	0	0	0	17.260.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.518.020.000	0	0	0	2.518.020.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.836.990.000	0	0	0	1.836.990.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.332.252.592	1.667.589.400	0	0	10.999.841.992
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	437.080.548	0	0	0	437.080.548

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.180.881.612	0	0	0	2.180.881.612
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	727.527.376	0	0	0	727.527.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.575.980.160	1.667.589.400	0	0	6.243.569.560
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.398.800	0	0	0	260.398.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.384.096	0	0	0	1.150.384.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	42.694.340	0	0	0	42.694.340
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	42.694.340	0	0	0	42.694.340
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	42.694.340	0	0	0	42.694.340
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.677.422.008	0	0	0	17.677.422.008
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.677.422.008	0	0	0	17.677.422.008
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	135.726.190	0	0	0	135.726.190
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	20.042.180	0	0	0	20.042.180
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200.849.460	0	0	0	200.849.460
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9.474.892.768	0	0	0	9.474.892.768
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	6.284.575.160	0	0	0	6.284.575.160

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.525.833.910	0	0	0	1.525.833.910
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.502.340	0	0	0	35.502.340
5	03					KEPEGAWAIAN	25.643.532.295	47.635.000	0	0	25.691.167.295
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000				Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	0	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.643.532.295	47.635.000	0	0	25.691.167.295
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.243.566.981	47.635.000	0	0	19.291.201.981
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.435.800	0	0	0	121.435.800
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.953.800	0	0	0	106.953.800
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.482.000	0	0	0	14.482.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.068.737.828	0	0	0	16.068.737.828
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.068.737.828	0	0	0	16.068.737.828
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.345.960	0	0	0	565.345.960
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.818.000	0	0	0	7.818.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.839.160	0	0	0	152.839.160
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.275.000	0	0	0	92.275.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.763.800	0	0	0	15.763.800
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	0	0	0	19.764.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.886.000	0	0	0	276.886.000

5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	47.635.000	0	0	47.635.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	47.635.000	0	0	47.635.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.673.341	0	0	0	1.549.673.341
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000	0	0	0	279.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.673.341	0	0	0	1.267.673.341
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.374.052	0	0	0	938.374.052
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599.804.232	0	0	0	599.804.232
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	136.669.820	0	0	0	136.669.820
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	0	0	0	75.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.900.000	0	0	0	126.900.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.399.965.314	0	0	0	6.399.965.314
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.924.488.886	0	0	0	4.924.488.886
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.265	0	0	0	8.072.265
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	4.649.000.468	0	0	0	4.649.000.468

5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	125.186.809	0	0	0	125.186.809
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	142.229.344	0	0	0	142.229.344
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	301.235.744	0	0	0	301.235.744
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	63.784.848	0	0	0	63.784.848
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	69.300.448	0	0	0	69.300.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	168.150.448	0	0	0	168.150.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	638.381.592	0	0	0	638.381.592
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	360.687.800	0	0	0	360.687.800
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	145.158.896	0	0	0	145.158.896
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	66.522.448	0	0	0	66.522.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	66.012.448	0	0	0	66.012.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	535.859.092	0	0	0	535.859.092
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.402.448	0	0	0	287.402.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	136.075.748	0	0	0	136.075.748
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	94.072.896	0	0	0	94.072.896
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.308.000	0	0	0	18.308.000
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.692.465.384	697.000.000	0	0	24.389.465.384
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.692.465.384	697.000.000	0	0	24.389.465.384
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.209.758.270	697.000.000	0	0	18.906.758.270
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.721.503.922	0	0	0	7.721.503.922

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.721.503.922	0	0	0	7.721.503.922
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.398.410	0	0	0	268.398.410
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.992.900	0	0	0	99.992.900
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.355.510	0	0	0	49.355.510
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	0	0	0	85.000.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.050.000	0	0	0	34.050.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.120.000	697.000.000	0	0	711.120.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.120.000	697.000.000	0	0	711.120.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.333.807.264	0	0	0	2.333.807.264
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.000.000	0	0	0	630.000.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.703.807.264	0	0	0	1.703.807.264
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912.096.044	0	0	0	912.096.044
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.206.044	0	0	0	298.206.044
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.500.000	0	0	0	399.500.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.390.000	0	0	0	214.390.000
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.959.832.630	0	0	0	6.959.832.630

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.630	0	0	0	6.959.832.630
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.482.707.114	0	0	0	5.482.707.114
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	781.447.770	0	0	0	781.447.770
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	31.640.650	0	0	0	31.640.650
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	749.807.120	0	0	0	749.807.120
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.701.259.344	0	0	0	4.701.259.344
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	534.418.994	0	0	0	534.418.994
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	268.237.300	0	0	0	268.237.300
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	107.090.300	0	0	0	107.090.300

5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	14.641.650	0	0	0	14.641.650
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.776.871.100	0	0	0	3.776.871.100
5	04	5.04.0.00.0.00.01.00				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	22.821.732.563	421.379.200	0	0	23.243.111.763
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00				Badan Riset dan Inovasi Daerah	22.821.732.563	421.379.200	0	0	23.243.111.763
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.518.786.063	70.400.000	0	0	14.589.186.063
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.692.750	0	0	0	65.692.750
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.660.750	0	0	0	27.660.750
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.032.000	0	0	0	38.032.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.422.889.349	0	0	0	11.422.889.349
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.408.233.949	0	0	0	11.408.233.949
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.593.400	0	0	0	9.593.400
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.304.400	0	0	0	2.304.400
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.757.600	0	0	0	2.757.600
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.375.800	0	0	0	309.375.800
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.524.000	0	0	0	12.524.000

5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.752.900	0	0	0	34.752.900
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.416.500	0	0	0	142.416.500
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.940.400	0	0	0	11.940.400
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.200.000	0	0	0	37.200.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.542.000	0	0	0	70.542.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.120.000	70.400.000	0	0	79.520.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.120.000	70.400.000	0	0	79.520.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.496.036	0	0	0	532.496.036
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.480.000	0	0	0	2.480.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	0	0	0	226.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.016.036	0	0	0	304.016.036
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.179.212.128	0	0	0	2.179.212.128
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.128.032	0	0	0	761.128.032
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.418.084.096	0	0	0	1.418.084.096
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.302.946.500	350.979.200	0	0	8.653.925.700

5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	7.708.309.100	0	0	0	7.708.309.100
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.059.304.700	0	0	0	7.059.304.700
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	238.708.700	0	0	0	238.708.700
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	154.736.900	0	0	0	154.736.900
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	255.558.800	0	0	0	255.558.800
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	392.507.300	275.979.200	0	0	668.486.500
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	126.582.500	0	0	0	126.582.500
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	24.751.100	275.979.200	0	0	300.730.300
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	241.173.700	0	0	0	241.173.700
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	202.130.100	75.000.000	0	0	277.130.100
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	66.738.150	0	0	0	66.738.150
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	52.293.150	0	0	0	52.293.150
5	05	5.05.0.00.0.00.02.00	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	83.098.800	75.000.000	0	0	158.098.800
5	07					PENGELOLAAN PENGHUBUNG	7.608.059.249	23.610.000	0	0	7.631.669.249

5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000				Badan Penghubung	7.608.059.249	23.610.000	0	0	7.631.669.249
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.574.054.389	23.610.000	0	0	6.597.664.389
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.688.600	0	0	0	2.688.600
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.688.600	0	0	0	2.688.600
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.497.962.505	0	0	0	4.497.962.505
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.497.962.505	0	0	0	4.497.962.505
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.248.300	0	0	0	149.248.300
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.652.000	0	0	0	14.652.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.506.200	0	0	0	19.506.200
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.075.100	0	0	0	4.075.100
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.015.000	0	0	0	31.015.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	23.610.000	0	0	23.610.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	23.610.000	0	0	23.610.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.692.636	0	0	0	1.049.692.636
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	0	0	0	6.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	0	0	0	205.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838.692.636	0	0	0	838.692.636

5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.462.348	0	0	0	874.462.348
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	754.521.376	0	0	0	754.521.376
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	0	0	0	35.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.940.972	0	0	0	84.940.972
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.034.004.860	0	0	0	1.034.004.860
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.034.004.860	0	0	0	1.034.004.860
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	113.560.972	0	0	0	113.560.972
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	920.443.888	0	0	0	920.443.888
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544
6 01						INSPEKTORAT DAERAH	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000				Inspektorat	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.676.550.481	581.815.000	0	0	23.258.365.481
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.189.750	0	0	0	18.189.750
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.439.930	0	0	0	10.439.930
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.749.820	0	0	0	7.749.820
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.263.943.526	0	0	0	20.263.943.526
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.263.943.526	0	0	0	20.263.943.526

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.706.685	0	0	0	468.706.685
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.500.400	0	0	0	23.500.400
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.497.885	0	0	0	72.497.885
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.840.400	0	0	0	114.840.400
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	0	0	0	40.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	0	0	0	13.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.868.000	0	0	0	189.868.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.100.000	64.815.000	0	0	69.915.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.100.000	64.815.000	0	0	69.915.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.857.588	0	0	0	590.857.588
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	0	0	0	265.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.857.588	0	0	0	324.857.588
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.329.752.932	517.000.000	0	0	1.846.752.932
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	938.922.232	0	0	0	938.922.232

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.401.356	505.000.000	0	0	695.401.356
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.429.344	12.000.000	0	0	212.429.344
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.774.642.598	0	0	0	1.774.642.598
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.261.835.606	0	0	0	1.261.835.606
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	141.715.876	0	0	0	141.715.876
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	331.734.162	0	0	0	331.734.162
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	34.197.165	0	0	0	34.197.165
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	130.892.896	0	0	0	130.892.896
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	342.513.996	0	0	0	342.513.996
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	98.371.115	0	0	0	98.371.115
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	182.410.396	0	0	0	182.410.396
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	512.806.992	0	0	0	512.806.992
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	67.084.648	0	0	0	67.084.648
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	445.722.344	0	0	0	445.722.344
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.099.848.465	0	0	0	1.099.848.465
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	497.351.224	0	0	0	497.351.224
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	245.041.432	0	0	0	245.041.432

6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	252.309.792	0	0	0	252.309.792
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	602.497.241	0	0	0	602.497.241
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	367.216.448	0	0	0	367.216.448
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38.385.375	0	0	0	38.385.375
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	110.027.970	0	0	0	110.027.970
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	86.867.448	0	0	0	86.867.448
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.026.024.737	19.882.000	0	0	10.045.906.737
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.330.380	0	0	0	9.330.380
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.936.980	0	0	0	6.936.980
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.393.400	0	0	0	2.393.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.660.957.696	0	0	0	8.660.957.696
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.660.957.696	0	0	0	8.660.957.696
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.600.645	19.882.000	0	0	212.482.645
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.693.095	0	0	0	1.693.095
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.331.750	19.882.000	0	0	41.213.750
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.155.800	0	0	0	25.155.800
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000	0	0	0	3.750.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.670.000	0	0	0	55.670.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.599.616	0	0	0	774.599.616
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0	0	0	2.500.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	0	0	0	110.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.099.616	0	0	0	662.099.616
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.536.400	0	0	0	388.536.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.566.400	0	0	0	336.566.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.040.000	0	0	0	32.040.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	0	0	0	19.930.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	370.344.596	0	0	0	370.344.596
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	370.344.596	0	0	0	370.344.596

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	370.344.596	0	0	0	370.344.596
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.747.420.284	0	0	0	16.747.420.284
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.747.420.284	0	0	0	16.747.420.284
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.747.420.284	0	0	0	16.747.420.284
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	172.865.144	10.000.000	0	0	182.865.144
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	172.865.144	10.000.000	0	0	182.865.144

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	172.865.144	10.000.000	0	0	182.865.144
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	274.653.544	10.000.000	0	0	284.653.544
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	274.653.544	10.000.000	0	0	284.653.544
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	274.653.544	10.000.000	0	0	284.653.544
TOTAL							3.857.438.485.026	878.272.783.493	50.000.000.000	1.316.779.574.243	6.102.490.842.762

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN V

**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

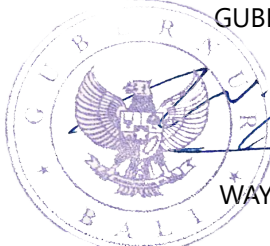
Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01				PELAYANAN UMUM					
01	01	1	01	Pendidikan	888.637.391.466	2.456.852.000	0	0	891.094.243.466
01	02	1	02	Kesehatan	431.515.913.794	4.330.426.000	0	0	435.846.339.794
01	03	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.935.210.756	50.000.000	0	0	31.985.210.756
01	04	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	42.561.477.946	0	0	0	42.561.477.946
01	05	1	06	Sosial	25.236.684.784	63.911.700	0	0	25.300.596.484
01	06	2	07	Tenaga Kerja	29.882.073.879	110.000.000	0	0	29.992.073.879
01	07	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.655.448.147	7.000.000	0	0	3.662.448.147
01	08	2	09	Pangan	725.784.974	0	0	0	725.784.974
01	09	2	11	Lingkungan Hidup	4.314.691.360	16.416.000	0	0	4.331.107.360
01	10	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	306.869.158	0	0	0	306.869.158
01	11	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.282.620.259	0	0	0	21.282.620.259
01	12	2	15	Perhubungan	20.676.249.100	12.996.000	0	0	20.689.245.100
01	13	2	16	Komunikasi dan Informatika	18.526.128.282	345.509.000	0	0	18.871.637.282
01	14	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.145.548.968	0	0	0	17.145.548.968

01	15	2	18	Penanaman Modal	19.802.924.907	27.900.000	0	0	19.830.824.907
01	16	2	20	Statistik	486.822.218	0	0	0	486.822.218
01	17	2	22	Kebudayaan	52.115.707.190	1.678.799.200	0	0	53.794.506.390
01	18	2	24	Kearsipan	164.453.346	0	0	0	164.453.346
01	19	3	25	Kelautan dan Perikanan	23.999.798.019	2.000.000	0	0	24.001.798.019
01	20	3	26	Pariwisata	14.271.974.457	0	0	0	14.271.974.457
01	21	3	27	Pertanian	58.328.124.860	0	0	0	58.328.124.860
01	22	3	28	Kehutanan	37.821.557.820	132.380.000	0	0	37.953.937.820
01	23	3	30	Perdagangan	16.483.391.703	850.238.180	0	0	17.333.629.883
01	24	3	31	Perindustrian	1.955.457.050	0	0	0	1.955.457.050
01	25	4	01	Sekretariat Daerah	151.937.399.322	1.486.472.600	0	0	153.423.871.922
01	26	4	02	Sekretariat DPRD	204.407.084.606	134.700.000	0	0	204.541.784.606
01	27	5	01	Perencanaan	23.573.750.843	146.500.000	0	0	23.720.250.843
01	28	5	02	Keuangan	194.523.875.739	4.290.018.400	50.000.000.000	1.316.779.574.243	1.565.593.468.382
01	29	5	03	Kepegawaian	25.643.532.295	47.635.000	0	0	25.691.167.295
01	30	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	23.692.465.384	697.000.000	0	0	24.389.465.384
01	31	5	05	Penelitian dan Pengembangan	22.821.732.563	421.379.200	0	0	23.243.111.763
01	32	5	07	Penghubung	7.608.059.249	23.610.000	0	0	7.631.669.249
01	33	6	01	Inspektorat	25.551.041.544	581.815.000	0	0	26.132.856.544
01	34	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	27.591.308.305	39.882.000	0	0	27.631.190.305
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
03	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.773.217.074	0	0	0	19.773.217.074
03	02	1	06	Sosial	255.939.600	0	0	0	255.939.600
03	03	4	01	Sekretariat Daerah	3.802.769.888	0	0	0	3.802.769.888

04				EKONOMI					
04	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190.896.256.897	543.809.519.687	0	0	734.705.776.584
04	02	2	07	Tenaga Kerja	482.660.600	0	0	0	482.660.600
04	03	2	09	Pangan	1.936.405.068	0	0	0	1.936.405.068
04	04	2	15	Perhubungan	6.733.701.974	47.500.000	0	0	6.781.201.974
04	05	2	16	Komunikasi dan Informatika	28.968.433.046	103.615.500.000	0	0	132.583.933.046
04	06	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.296.059.222	0	0	0	5.296.059.222
04	07	2	18	Penanaman Modal	2.927.127.328	0	0	0	2.927.127.328
04	08	2	21	Persandian	341.503.236	0	0	0	341.503.236
04	09	3	25	Kelautan dan Perikanan	1.096.483.778	1.111.620.000	0	0	2.208.103.778
04	10	3	27	Pertanian	17.331.237.632	1.102.500	0	0	17.332.340.132
04	11	3	28	Kehutanan	5.295.944.686	0	0	0	5.295.944.686
04	12	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	186.047.592	0	0	0	186.047.592
04	13	3	30	Perdagangan	1.149.075.300	0	0	0	1.149.075.300
04	14	3	31	Perindustrian	4.306.662.542	0	0	0	4.306.662.542
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
05	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.321.656.088	924.603.034	0	0	13.246.259.122
05	02	2	10	Pertanahan	162.888.950	0	0	0	162.888.950
05	03	2	11	Lingkungan Hidup	4.646.501.267	0	0	0	4.646.501.267
05	04	3	28	Kehutanan	137.662.183	0	0	0	137.662.183
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.999.332.224	4.428.693.711	0	0	39.428.025.935
06	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.429.125.794	0	0	0	1.429.125.794
07				KESEHATAN					
07	01	1	02	Kesehatan	69.326.377.946	3.887.772.000	0	0	73.214.149.946

07	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	349.495.851	0	0	0	349.495.851
08				PARIWISATA					
08	01	3	26	Pariwisata	1.453.241.650	0	0	0	1.453.241.650
10				PENDIDIKAN					
10	01	1	01	Pendidikan	430.134.983.233	202.493.032.281	0	0	632.628.015.514
10	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	35.336.552.025	0	0	0	35.336.552.025
10	03	2	22	Kebudayaan	500.510.053.352	0	0	0	500.510.053.352
10	04	2	23	Perpustakaan	444.857.938	0	0	0	444.857.938
11				PERLINDUNGAN SOSIAL					
11	01	1	06	Sosial	4.865.701.870	0	0	0	4.865.701.870
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.122.841.100	0	0	0	1.122.841.100
TOTAL					3.857.203.351.227	878.272.783.493	50.000.000.000	1.316.779.574.243	6.102.255.708.963

GUBERNUR BALI,



Wayan Koster

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VI

<p>REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022</p>
--

Lampiran VI : Peraturan Daerah Provinsi Bali
 Nomor : 11 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	A SPM Bidang Pendidikan			
	Pendidikan Menengah			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.922.869.628
			Penambahan Ruang Kelas Baru	15.913.874.304
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	617.729.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1.074.375.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	526.654.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	956.630.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.691.920.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	784.691.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	521.500.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	260.750.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	268.151.000
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	106.061.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.841.775.450
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	125.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	481.682.860

			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44.038.300
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	57.846.573.388
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14.378.970
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	504.578.600
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	170.560.240.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	21.149.500
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	318.084.622.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	12.628.359.000
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.152.800.000
			Pembangunan Ruang Praktik Siswa	5.085.000.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	846.197.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4.835.355.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.970.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	302.687.050
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	87.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49.610.791.718
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	14.267.930
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	218.639.600
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	178.725.220.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	264.476.317.298
			Jumlah Pendidikan Menengah	582.560.939.298
			Pendidikan Khusus	

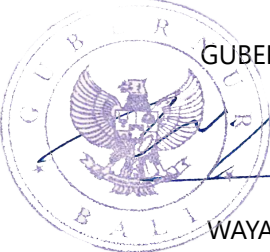

		Pengelolaan Pendidikan Khusus		
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.589.824.884
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	218.332.000
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.241.239.460
			Pembangunan Kantin Sekolah	1.068.864.000
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.289.560.000
			Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	193.140.000
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.094.709.100
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	27.400.400
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.548.936.056
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	352.155.850
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.155.530.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.258.400
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus	24.797.950.150
			Jumlah Pendidikan Khusus	24.797.950.150
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	607.358.889.448
	B SPM Bidang Kesehatan			
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	228.310.200
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	228.310.200
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	228.310.200
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	305.886.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		305.886.000
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi		305.886.000
	Jumlah SPM Bidang Kesehatan		534.196.200
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.249.246.336
		Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	4.831.593.711
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	33.347.185.888
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		39.428.025.935
	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		39.428.025.935
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	924.603.034
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.148.098.400
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		12.072.701.434
	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota		12.072.701.434
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		51.500.727.369
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	14.753.910
	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		14.753.910

	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi		14.753.910
	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	636.324.298
	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		636.324.298
	Jumlah Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		636.324.298
	Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		651.078.208
	E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.625.124.694
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.895.652.320
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		17.558.253.462
	Jumlah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi		17.558.253.462
	Jumlah SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		17.558.253.462
	F SPM Bidang Sosial		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Pant		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant		
		Penyediaan Permakanan	28.959.755
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	8.664.800

	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		37.624.555
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		37.624.555
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		
		Pengasuhan	35.000.000
		Penyediaan Makanan	190.000.000
		Penyediaan Sandang	35.000.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	15.800.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30.344.000
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	55.926.000
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	222.100.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000
		Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	26.203.555
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		616.073.555
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		616.073.555
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
		Penyediaan Permakanan	465.000.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	117.902.500
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.599.600
		Pemulasaraan	137.734.055
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		747.236.155
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		747.236.155
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		

		Pemulangan ke Daerah Asal	3.284.398.200
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		3.284.398.200
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		3.284.398.200
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.939.600
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		255.939.600
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		255.939.600
	Jumlah SPM Bidang Sosial		4.941.272.065


 GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.956.709.216.994	2.946.334.079.885
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.524.988.036.648	1.523.722.258.980
1	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	724.712.884.066	891.094.243.466
1	01	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	771.395.152.582	607.358.889.448
1	01	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.030.000.000	233.380.850
1	01	04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.350.000.000	29.048.850
1	01	06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	26.500.000.000	25.006.696.366
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.103.852.371.657	509.060.489.740
1	02	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	447.612.953.402	435.846.339.794
1	02	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	627.411.271.104	40.342.076.154
1	02	03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.271.634.826	32.777.513.792
1	02	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.014.785.845	94.560.000
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.189.197.042.042	819.365.272.397
1	03	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.886.223.852	31.985.210.756
1	03	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	477.985.167.183	13.712.600.900
1	03	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	90.375.882.116	39.428.025.935
1	03	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	24.538.881.070	12.072.701.434
1	03	09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.246.478.205.290	427.410.477.402
1	03	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	302.075.041.961	290.224.682.184
1	03	11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.934.793.772	3.358.016.098
1	03	12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.922.846.798	1.173.557.688
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.185.790.564	1.429.125.794
1	04	02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.163.559.376	1.056.670.806
1	04	05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.022.231.188	372.454.988

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	91.763.249.387	62.334.695.020
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.539.390.996	42.561.477.946
1	05	02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.705.000.000	17.801.725.174
1	05	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.518.858.391	1.971.491.900
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	41.722.726.696	30.422.237.954
1	06	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.044.479.248	25.300.596.484
1	06	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	430.000.000	42.150.165
1	06	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.507.260.417	4.692.582.335
1	06	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	365.000.000	3.805.370
1	06	06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	470.000.000	255.939.600
1	06	07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	266.000.000	127.164.000
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.313.558.997.897	884.206.022.945
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	53.865.000.000	30.474.734.479
2	07	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.500.000.000	29.992.073.879
2	07	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	13.914.000.000	125.150.500
2	07	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.400.000.000	179.010.100
2	07	06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.051.000.000	178.500.000
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.336.059.248	4.785.289.247
2	08	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.044.479.248	3.662.448.147
2	08	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	110.000.000	11.100.100
2	08	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	298.315.000	381.834.000
2	08	06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	672.500.000	653.101.000
2	08	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	50.765.000	76.806.000
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	74.465.880.260	2.662.190.042

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.958.797.745	725.784.974
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.533.957.930	293.645.438
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	517.097.500	523.099.224
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.456.027.085	1.119.660.406
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	426.899.890	162.888.950
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	426.899.890	162.888.950
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	79.899.885.151	8.977.608.627
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.200.843.587	4.331.107.360
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.141.998.000	209.579.144
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.176.921.564	28.292.800
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	950.000.000	209.890.467
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.755.533.000	4.198.738.856
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.950.000.000	306.869.158
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.050.000.000	173.673.414
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	900.000.000	133.195.744
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.670.990.964	21.282.620.259
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.424.184.655	15.402.711.807
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	448.000.000	114.915.006
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.267.000.000	727.309.784
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.531.806.309	5.037.683.662
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	537.381.575	349.495.851
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	537.381.575	349.495.851
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	68.620.517.873	27.470.447.074

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.891.780.576	20.689.245.100
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.728.737.297	5.872.434.124
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.000.000.000	691.617.510
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.000.000.000	217.150.340
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	240.117.782.389	151.455.570.328
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.918.970.847	18.871.637.282
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	38.325.401.764	15.846.130.310
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	179.873.409.778	116.737.802.736
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	35.405.878.884	22.441.608.190
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.568.884.696	17.145.548.968
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	695.650.000	255.064.240
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	215.140.026	118.552.896
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.707.770.311	3.844.528.896
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.023.433.851	468.864.290
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.920.000.000	609.048.900
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	26.240.170.138	22.757.952.235
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.658.293.554	19.830.824.907
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000	450.080.316
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	579.999.564	458.026.986
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.599.999.664	1.047.798.138
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	713.207.250	792.840.792
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	388.670.106	178.381.096
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	86.821.150.000	35.336.552.025
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	9.671.150.000	767.258.585
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	74.650.000.000	34.069.293.440

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.500.000.000	500.000.000
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	752.154.120	486.822.218
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	752.154.120	486.822.218
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	589.000.000	341.503.236
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	589.000.000	341.503.236
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	585.860.247.405	554.304.559.742
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.542.932.758	53.794.506.390
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	18.825.080.828	31.281.654.036
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	16.969.613.935	1.217.138.902
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.390.048.782	336.500.000
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	5.656.466.882	661.513.920
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.978.200.930	3.600.000.000
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	469.497.903.290	463.413.246.494
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	444.857.938
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	444.857.938
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	164.453.346
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	164.453.346
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	324.797.466.454	186.149.133.751
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.282.547.168	26.209.901.797
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.530.268.856	24.001.798.019
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.207.968.750	1.293.435.696
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.392.378.031	469.284.796
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.953.329.297	99.999.770
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.798.602.234	345.383.516
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	27.332.444.157	15.960.349.906
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.425.261.799	14.271.974.457

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.240.467.890	358.469.345
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.180.706.608	580.213.291
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	630.129.860	235.133.799
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.855.878.000	514.559.014
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	132.769.185.442	75.660.464.992
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.958.797.745	58.328.124.860
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	41.288.013.335	12.911.026.805
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.326.026.112	936.817.188
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	5.650.438.636	1.067.730.926
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.577.909.614	2.295.861.869
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	968.000.000	120.903.344
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	94.914.118.587	43.387.544.689
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.200.843.587	37.953.937.820
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22.332.934.000	4.895.944.786
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	13.310.000.000	399.999.900
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	892.406.000	137.662.183
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.068.447.992	186.047.592
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	500.000.000	186.047.592
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	23.085.723.048	18.482.705.183
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.075.938.404	17.333.629.883
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	460.832.748	334.463.198
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	85.000.000	95.778.800
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	250.000.000	8.483.820

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	883.952.076	661.832.724
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	169.999.820	48.516.758
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	31.420.938.464	6.262.119.592
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.075.938.404	1.955.457.050
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.175.000.060	4.170.958.454
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	170.000.000	135.704.088
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	370.347.847.442	361.768.426.416
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	160.706.515.798	157.226.641.810
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.533.305.686	127.578.653.703
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	632.448.200	271.872.406
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.650.000.000	2.226.585.227
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.250.000.000	21.038.894.896
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.995.119.441	3.802.769.888
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.056.840.411	232.816.710
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.147.283.300	2.016.673.950
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	441.518.760	58.375.030
4	02		SEKRETARIAT DPRD	209.641.331.644	204.541.784.606
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	85.060.154.065
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	120.172.582.625	119.481.630.541
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.891.070.957.716	1.670.269.132.916
5	01		PERENCANAAN	24.380.849.779	23.720.250.843
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.554.026.578	15.827.121.384
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.822.350.794	5.561.454.662
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.004.472.407	2.331.674.797
5	02		KEUANGAN	1.827.101.525.256	1.565.593.468.382
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	153.112.877.352	156.080.580.933

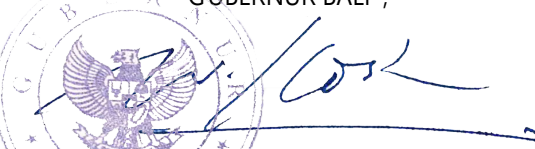
PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022


Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.650.114.444.340	1.388.171.321.839
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.300.105.728	3.664.143.602
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18.574.097.836	17.677.422.008
5	03		KEPEGAWAIAN	0	25.691.167.295
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	19.291.201.981
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	6.399.965.314
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	24.389.465.384
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	18.906.758.270
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5.482.707.114
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.355.586.666	23.243.111.763
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.573.744.171	14.589.186.063
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.781.842.495	8.653.925.700
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.232.996.015	7.631.669.249
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.675.506.183	6.597.664.389
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.557.489.832	1.034.004.860
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34.083.763.431	26.132.856.544
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	34.083.763.431	26.132.856.544
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.995.634.000	23.258.365.481
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.120.656.566	1.774.642.598
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.967.472.865	1.099.848.465
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	32.269.569.718	27.631.190.305
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.269.569.718	27.631.190.305
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.880.886.446	10.045.906.737
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.212.154.896	370.344.596
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	11.976.528.376	16.747.420.284

Lampiran VII : Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.200.000.000	182.865.144
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.000.000.000	284.653.544

GUBERNUR BALI ,

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN VIII

**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD
DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DENGAN PPAS
DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)	
1.01.2.19.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	933.741.475.114	933.741.475.114	1.559.058.811.005	
1.01.2.19.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	928.716.592.484	928.716.592.484	1.523.722.258.980	
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	928.716.592.484	928.716.592.484	1.523.722.258.980	
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	690.583.748.855	690.583.748.855	891.094.243.466	
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.742.900	28.742.900	28.742.900	
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.533.100	24.533.100	24.533.100
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.209.800	4.209.800	4.209.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	678.194.745.850	678.194.745.850	878.319.040.255
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	678.057.369.770	678.057.369.770	878.160.194.170
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.909.090	113.909.090	78.500.790
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.466.990	23.466.990	80.345.295
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	49.990.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	100.000.000	49.990.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.724.670	53.724.670	27.537.400

1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53.724.670	53.724.670	27.537.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.605.515	1.239.605.515	1.048.782.895
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	744.885.615	744.885.615	740.790.545
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.981.800	14.981.800	6.781.850
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.568.100	76.568.100	74.123.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.125.000	53.125.000	33.525.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.125.000	19.125.000	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.920.000	330.920.000	193.562.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.203.984.000	2.203.984.000	2.103.984.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.203.984.000	2.203.984.000	2.103.984.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.431.389.192	7.431.389.192	7.501.890.088
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.452.000	7.452.000	3.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	682.653.000	682.653.000	682.653.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.741.284.192	6.741.284.192	6.816.237.088
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.331.556.728	1.331.556.728	2.014.275.728
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	661.600.728	661.600.728	734.829.728
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	3.000.000

1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	9.890.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.876.000	197.876.000	853.876.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	459.080.000	459.080.000	412.680.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	212.771.055.563	212.771.055.563	607.358.889.448
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	133.808.082.550	133.808.082.550	318.084.622.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	61.485.124.128	61.485.124.128	60.922.869.628
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	9.045.458.304	9.045.458.304	15.913.874.304
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	617.729.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	0	0	1.074.375.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	0	526.654.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	0	956.630.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	1.691.920.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	784.691.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	0	0	521.500.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	0	260.750.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0	0	268.151.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	106.061.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.841.775.450	4.841.775.450	4.841.775.450
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	0	125.000.000

1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	508.292.140	508.292.140	481.682.860
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	100.000.000	44.038.300
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	57.746.647.928	57.746.647.928	57.846.573.388
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20.784.600	20.784.600	14.378.970
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	30.000.000	30.000.000	504.578.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0	0	170.560.240.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.000.000	30.000.000	21.149.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	69.448.896.523	69.448.896.523	264.476.317.298
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	12.871.556.000	12.871.556.000	12.628.359.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.152.800.000	1.152.800.000	1.152.800.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	0	5.085.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	603.000.000	603.000.000	846.197.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4.835.355.000	4.835.355.000	4.835.355.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	10.970.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	320.455.270	320.455.270	302.687.050
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	87.000.000	87.000.000	87.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49.500.046.158	49.500.046.158	49.610.791.718

1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20.684.260	20.684.260	14.267.930
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	57.999.835	57.999.835	218.639.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	178.725.220.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	9.514.076.490	9.514.076.490	24.797.950.150
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.589.824.884	1.589.824.884	1.589.824.884
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	218.332.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	987.783.360	987.783.360	1.241.239.460
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	0	0	1.068.864.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	165.600.000	165.600.000	3.289.560.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	0	0	193.140.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.094.709.100	1.094.709.100	1.094.709.100
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	25.642.400	25.642.400	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	40.000.000	40.000.000	27.400.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.550.517.306	5.550.517.306	5.548.936.056
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	39.999.440	39.999.440	352.155.850
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0	0	10.155.530.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	20.000.000	20.000.000	18.258.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	274.997.300	274.997.300	233.380.850
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	224.998.050	224.998.050	207.084.950

1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	130.029.250	130.029.250	128.276.150
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	50.209.450	50.209.450	46.731.350
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	44.759.350	44.759.350	32.077.450
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	49.999.250	49.999.250	26.295.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	49.999.250	49.999.250	26.295.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.999.950	59.999.950	29.048.850
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	59.999.950	59.999.950	29.048.850
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik Menengah dan Pendidikan Khusus	59.999.950	59.999.950	29.048.850
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	25.026.790.816	25.026.790.816	25.006.696.366
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.026.790.816	25.026.790.816	25.006.696.366
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25.026.790.816	25.026.790.816	25.006.696.366
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.024.882.630	5.024.882.630	35.336.552.025
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.024.882.630	5.024.882.630	35.336.552.025
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	249.999.930	249.999.930	767.258.585

1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	249.999.930	249.999.930	767.258.585
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	249.999.930	249.999.930	767.258.585
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.274.882.700	4.274.882.700	34.069.293.440
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	4.000.000.000	4.000.000.000	33.694.293.440
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	4.000.000.000	4.000.000.000	33.694.293.440
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	49.883.040	49.883.040	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	49.883.040	49.883.040	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	224.999.660	224.999.660	375.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	49.999.660	49.999.660	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	175.000.000	175.000.000	375.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	522.634.593.439	522.634.593.439	509.060.489.740
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	522.634.593.439	522.634.593.439	509.060.489.740
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	522.634.593.439	522.634.593.439	509.060.489.740
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	429.447.754.204	429.447.754.204	435.846.339.794

1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.336.930	42.336.930	31.482.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.122.100	12.122.100	31.482.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.905.130	3.905.130	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.932.550	3.932.550	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.368.400	6.368.400	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.360.600	6.360.600	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.188.400	5.188.400	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.459.750	4.459.750	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	200.440.826.806	200.440.826.806	194.389.858.535
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200.381.357.236	200.381.357.236	194.341.449.565
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.714.370	43.714.370	48.408.970
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.755.200	15.755.200	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.166.087.110	3.166.087.110	2.172.733.345
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.335.240	33.335.240	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	827.495.470	827.495.470	536.494.955
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.825.490.800	1.825.490.800	1.636.238.390
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.596.600	95.596.600	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	186.099.000	186.099.000	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.750.000	6.750.000	0

1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.320.000	191.320.000	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.978.999.000	1.978.999.000	179.184.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.790.000	197.790.000	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	104.184.000	104.184.000	29.184.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.677.025.000	1.677.025.000	150.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.925.198.018	60.925.198.018	59.077.208.274
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.760.000	7.760.000	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.283.610.402	9.283.610.402	7.382.010.402
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.633.827.616	51.633.827.616	51.695.197.872
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.995.397.600	1.995.397.600	3.626.146.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.287.300	46.287.300	665.652.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	939.233.300	939.233.300	276.338.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	569.889.000	569.889.000	528.624.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	434.988.000	434.988.000	2.155.532.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	160.898.908.740	160.898.908.740	176.369.727.240
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.898.908.740	160.898.908.740	176.369.727.240

1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.003.610.708	61.003.610.708	40.342.076.154
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	41.882.676.292	41.882.676.292	16.311.108.308
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	40.151.238.592	40.151.238.592	13.080.947.232
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1.001.437.700	1.001.437.700	1.013.437.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	500.000.000	1.986.723.376
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.074.511.616	19.074.511.616	23.742.713.046
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	36.054.000	36.054.000	228.310.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	254.787.550	254.787.550	305.886.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0	0	212.374.780
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	3.734.644.800

1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	81.465.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	160.534.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.000.000	40.000.000	347.207.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	647.313.450	647.313.450	576.505.650
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	722.335.136	722.335.136	722.335.136
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.374.021.480	17.374.021.480	17.339.429.480
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0	0	34.020.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	46.422.800	46.422.800	34.422.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	46.422.800	46.422.800	34.422.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	253.832.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0	0	253.832.000

1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	32.006.865.427	32.006.865.427	32.777.513.792
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	31.994.179.072	31.994.179.072	32.777.513.792
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.994.179.072	31.994.179.072	32.777.513.792
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	12.686.355	12.686.355	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.686.355	12.686.355	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	32.363.100	32.363.100	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	19.643.800	19.643.800	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	19.643.800	19.643.800	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	12.719.300	12.719.300	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	12.719.300	12.719.300	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	144.000.000	144.000.000	94.560.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0

1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	144.000.000	144.000.000	94.560.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	144.000.000	144.000.000	94.560.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	360.148.062.071	762.472.208.527	820.957.287.141
1.03.1.04.2.10.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	360.023.177.071	762.347.323.527	820.794.398.191
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	358.457.141.857	760.781.288.313	819.365.272.397
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.011.030.123	32.011.030.123	31.985.210.756
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	837.099.511	837.099.511	740.488.011
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	462.845.925	462.845.925	423.053.425
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.253.586	374.253.586	317.434.586

1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.337.510.506	26.337.510.506	26.552.529.609
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.337.510.506	26.337.510.506	26.552.529.609
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.055.210	828.055.210	706.320.840
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.251.500	36.251.500	36.251.500
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.065.710	144.065.710	84.345.340
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000	115.000.000	115.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.747.000	99.747.000	93.376.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.520.000	37.520.000	37.520.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.295.000	26.295.000	17.640.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.176.000	369.176.000	322.188.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.998.600	114.998.600	105.100.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.998.600	114.998.600	105.100.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.576.448	997.576.448	999.576.448
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	551.100.000	551.100.000	549.850.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.476.448	392.476.448	395.726.448
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.895.789.848	2.895.789.848	2.881.195.848
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.404.833.540	1.404.833.540	1.404.333.540
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.298.452	320.298.452	320.298.452

1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.170.657.856	1.170.657.856	1.156.563.856
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.945.488.440	6.595.965.640	13.712.600.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	255.588.400	2.906.065.600	2.901.101.400
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	0	1.513.837.200	1.513.837.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	1.136.640.000	1.136.640.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	255.588.400	255.588.400	250.624.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.689.900.040	3.689.900.040	10.811.499.500
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	413.645.216	413.645.216	763.916.216
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	259.807.828	259.807.828	7.038.101.488
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.016.446.996	3.016.446.996	3.009.481.796
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38.110.584.224	38.378.025.935	39.428.025.935

1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	38.110.584.224	38.378.025.935	39.428.025.935
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.199.246.336	1.199.246.336	1.249.246.336
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	152.152.000	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3.412.000.000	3.831.593.711	4.831.593.711
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	33.347.185.888	33.347.185.888	33.347.185.888
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.148.098.400	12.072.701.434	12.072.701.434
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	11.148.098.400	12.072.701.434	12.072.701.434
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	924.603.034	924.603.034
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.148.098.400	11.148.098.400	11.148.098.400
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	249.366.963.108	405.323.223.975	427.410.477.402
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.366.963.108	405.323.223.975	427.410.477.402

1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	226.892.660	384.667.380	1.002.129.220
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	6.010.308.668	16.011.677.240	17.832.656.734
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	243.129.761.780	388.926.879.355	408.575.691.448
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.892.769.016	261.418.132.660	290.224.682.184
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	18.892.769.016	261.418.132.660	290.224.682.184
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	320.972.896	302.648.896	479.941.346
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	600.000.000	123.763.620.612	123.563.620.612
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	208.211.568	59.316.448	48.204.898
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	59.506.448	59.506.448	48.394.898
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	0	116.468.361.352	116.861.298.909
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	404.337.832	404.337.832	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	0	0	9.332.501.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	0	0	18.119.122.410
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	14.490.600.101	14.490.600.101	14.490.600.101
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan	0	1.619.879.600	1.619.879.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	2.749.503.723	4.190.224.923	4.190.224.923
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	59.636.448	59.636.448	1.470.892.587

1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.750.203.498	3.750.203.498	3.358.016.098
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	436.365.777	436.365.777	296.643.077
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	436.365.777	436.365.777	296.643.077
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	3.313.837.721	3.313.837.721	3.061.373.021
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2.448.714.116	2.448.714.116	2.359.864.416
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	865.123.605	865.123.605	701.508.605
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.232.005.048	1.232.005.048	1.173.557.688
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	662.288.032	662.288.032	654.373.132
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	662.288.032	662.288.032	654.373.132
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	237.381.960	237.381.960	218.212.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	237.381.960	237.381.960	218.212.600

1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	332.335.056	332.335.056	300.971.956
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	189.905.752	189.905.752	173.317.652
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	142.429.304	142.429.304	127.654.304
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.566.035.214	1.566.035.214	1.429.125.794
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.043.108.826	1.043.108.826	1.056.670.806
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	444.418.538	444.418.538	420.346.508
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	17.430.750	17.430.750	14.753.910
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	426.987.788	426.987.788	405.592.598
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	598.690.288	598.690.288	636.324.298
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	598.690.288	598.690.288	636.324.298
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	522.926.388	522.926.388	372.454.988
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	522.926.388	522.926.388	372.454.988
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	54.075.250	54.075.250	127.688.700
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	442.694.688	442.694.688	229.264.838
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	26.156.450	26.156.450	15.501.450

1.03.1.04.2.10.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	124.885.000	124.885.000	162.888.950
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	124.885.000	124.885.000	162.888.950
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	124.885.000	124.885.000	162.888.950
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	124.885.000	124.885.000	162.888.950
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	124.885.000	124.885.000	162.888.950
1.05.0.00.0.00.01.0000					Satuan Polisi Pamong Praja	41.305.062.225	41.305.062.225	41.417.103.413
1.05.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41.305.062.225	41.305.062.225	41.417.103.413
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	41.305.062.225	41.305.062.225	41.417.103.413
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.533.315.943	23.533.315.943	23.615.378.239
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000	13.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.694.985.919	20.694.985.919	20.725.809.319
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.694.985.919	20.694.985.919	20.725.809.319
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.386.200	282.386.200	258.672.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.783.000	29.783.000	29.783.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.536.800	55.536.800	55.536.800
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000

1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.130.400	34.130.400	34.130.400
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.936.000	87.936.000	64.222.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.927.376	1.074.927.376	1.149.880.272
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	142.000.000	142.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.210.000	80.210.000	80.210.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.717.376	849.717.376	924.670.272
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.468.016.448	1.468.016.448	1.468.016.448
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.468.016.448	1.468.016.448	1.468.016.448
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.771.746.282	17.771.746.282	17.801.725.174
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.550.171.418	17.550.171.418	17.633.206.358
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.437.742.454	2.437.742.454	2.625.124.694
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	37.476.448	37.476.448
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	37.476.448	0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.476.448	37.476.448	74.952.896
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.999.999.620	14.999.999.620	14.895.652.320
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	221.574.864	221.574.864	168.518.816
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	37.476.448	37.476.448	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	184.098.416	184.098.416	168.518.816
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.778.862.207	20.778.862.207	20.917.591.607
1.05.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.778.862.207	20.778.862.207	20.917.591.607
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.778.862.207	20.778.862.207	20.917.591.607
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.806.847.907	18.806.847.907	18.946.099.707
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.782.000	5.782.000	4.376.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.546.000	3.546.000	2.554.700
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.236.000	2.236.000	1.821.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.033.529.297	13.033.529.297	13.180.885.859
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.033.529.297	13.033.529.297	13.180.885.859
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.219.200	114.219.200	108.104.990
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.910.350	4.910.350	4.910.350
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.176.450	29.176.450	25.628.640

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.132.400	5.132.400	2.566.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.760.000	13.760.000	13.760.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.760.000	13.760.000	13.760.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.296.974	744.296.974	744.296.974
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.592.042	387.592.042	387.592.042
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.204.932	355.204.932	355.204.932
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.895.260.436	4.895.260.436	4.894.675.284
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.835.605.436	4.835.605.436	4.835.020.284
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.655.000	59.655.000	59.655.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.972.014.300	1.972.014.300	1.971.491.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	426.624.000	426.624.000	426.624.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	426.624.000	426.624.000	426.624.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	525.390.300	525.390.300	524.867.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	525.390.300	525.390.300	524.867.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	34.778.811.971	34.778.811.971	35.207.527.201
1.06.2.08.0.00.06.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.412.493.804	30.412.493.804	30.422.237.954
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.412.493.804	30.412.493.804	30.422.237.954
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.108.219.604	25.108.219.604	25.300.596.484
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.996.700	29.996.700	27.080.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.450.700	23.450.700	21.834.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.546.000	6.546.000	5.246.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.169.476.444	20.169.476.444	20.243.154.726
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.169.476.444	20.169.476.444	20.243.154.726
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.904.200	266.904.200	270.814.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.953.000	24.953.000	23.357.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	49.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.955.000	185.955.000	185.955.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.996.200	10.996.200	9.852.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	5.000.000	1.900.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.829.600	9.829.600	23.991.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.829.600	9.829.600	23.991.300

1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.706.040	605.706.040	605.706.040
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.250.000	1.250.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	389.500.000	389.500.000	389.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.956.040	214.956.040	214.956.040
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.026.306.620	4.026.306.620	4.129.848.818
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.069.816.312	1.069.816.312	1.156.924.512
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	727.034.720	727.034.720	727.034.720
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.229.455.588	2.229.455.588	2.245.889.586
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	62.059.670	62.059.670	42.150.165
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.985.020	6.985.020	3.530.110
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6.985.020	6.985.020	3.530.110
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	55.074.650	55.074.650	38.620.055
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.074.650	55.074.650	38.620.055
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.844.659.235	4.844.659.235	4.692.582.335
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	231.999.655	231.999.655	37.624.555
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	31.999.755	31.999.755	28.959.755

1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	199.999.900	199.999.900	8.664.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	616.073.555	616.073.555	616.073.555
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	135.000.000	135.000.000	35.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	190.000.000	190.000.000	190.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	21.000.000	21.000.000	35.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.000.000	5.000.000	15.800.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	32.960.000	32.960.000	30.344.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	74.810.000	74.810.000	55.926.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	122.100.000	122.100.000	222.100.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9.000.000	9.000.000	5.700.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	26.203.555	26.203.555	26.203.555
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	697.207.955	697.207.955	747.236.155
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	465.000.000	465.000.000	465.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	117.502.500	117.502.500	117.902.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.999.600	16.999.600	16.599.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	87.705.855	87.705.855	137.734.055
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.292.128.200	3.292.128.200	3.284.398.200
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	3.292.128.200	3.292.128.200	3.284.398.200

1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.870	7.249.870	7.249.870
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	7.249.870	7.249.870	7.249.870
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.535.540	7.535.540	3.805.370
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	7.535.540	7.535.540	3.805.370
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.535.540	7.535.540	3.805.370
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	260.019.755	260.019.755	255.939.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	260.019.755	260.019.755	255.939.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	260.019.755	260.019.755	255.939.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	130.000.000	130.000.000	127.164.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	130.000.000	130.000.000	127.164.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	130.000.000	130.000.000	127.164.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.366.318.167	4.366.318.167	4.785.289.247
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.366.318.167	4.366.318.167	4.785.289.247
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.680.338.267	3.680.338.267	3.662.448.147
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.152.309.860	3.152.309.860	3.152.309.860
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.152.309.860	3.152.309.860	3.152.309.860
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.430.300	26.430.300	12.690.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.967.100	1.967.100	1.967.100

1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	19.000.000	7.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.463.200	5.463.200	3.723.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.598.107	496.598.107	492.447.787
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.546.296	124.546.296	124.545.896
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.299.668	40.299.668	40.299.668
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.752.143	331.752.143	327.602.223
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	20.000.000	20.000.000	11.100.100
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	11.100.100
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	11.100.100
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	7.980.000	7.980.000	381.834.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	112.950.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0	0	112.950.000

1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.980.000	7.980.000	268.884.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.980.000	7.980.000	6.840.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	0	262.044.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	657.999.900	657.999.900	653.101.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	657.999.900	657.999.900	653.101.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	657.999.900	657.999.900	653.101.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	0	76.806.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	76.806.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	0	76.806.000
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.006.728.223	31.006.728.223	30.660.782.071
2.07.3.29.3.32.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.785.368.831	30.785.368.831	30.474.734.479
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.785.368.831	30.785.368.831	30.474.734.479

2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.275.208.231	30.275.208.231	29.992.073.879
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.893.358.555	25.893.358.555	25.673.379.955
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.893.358.555	25.893.358.555	25.673.379.955
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.110.240	345.110.240	310.434.440
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.769.600	21.769.600	21.769.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.534.240	86.534.240	74.432.440
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.250.000	120.250.000	120.250.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.608.400	63.608.400	61.808.400
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000	2.400.000

2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.548.000	41.548.000	20.774.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.479.193.220	1.479.193.220	1.479.193.220
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	2.700.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.000.000	612.000.000	612.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.493.220	864.493.220	864.493.220
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.557.546.216	2.557.546.216	2.529.066.264
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.212.624.120	1.212.624.120	1.146.667.720
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	309.905.792	309.905.792	309.905.792
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.035.016.304	1.035.016.304	1.072.492.752
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	125.150.500	125.150.500	125.150.500
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	125.150.500	125.150.500
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	125.150.500	125.150.500
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0

2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	179.010.100	179.010.100	179.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179.010.100	179.010.100	179.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	179.010.100	179.010.100	179.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	0	0	0

2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	206.000.000	206.000.000	178.500.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	206.000.000	206.000.000	178.500.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	55.000.000	55.000.000	27.500.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	151.000.000	151.000.000	151.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	221.359.392	221.359.392	186.047.592
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	221.359.392	221.359.392	186.047.592
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	221.359.392	221.359.392	186.047.592

2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	221.359.392	221.359.392	186.047.592
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	221.359.392	221.359.392	186.047.592
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.581.376.126	24.581.376.126	21.938.985.268
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.581.376.126	24.581.376.126	21.938.985.268
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	374.858.688	374.858.688	306.869.158
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	212.429.344	212.429.344	173.673.414
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	212.429.344	212.429.344	173.673.414
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	212.429.344	212.429.344	173.673.414
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	162.429.344	162.429.344	133.195.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	162.429.344	162.429.344	133.195.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	162.429.344	162.429.344	133.195.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.726.459.939	23.726.459.939	21.282.620.259
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.632.733.537	15.632.733.537	15.402.711.807
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.710.044	290.710.044	211.187.044
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.424.100	19.424.100	14.659.300
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.285.944	271.285.944	196.527.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.030.019.729	13.030.019.729	13.054.052.229
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.888.097.955	12.888.097.955	12.918.921.355

2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.921.774	141.921.774	135.130.874
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.926.760	352.926.760	180.205.930
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.495.900	5.495.900	5.495.900
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.247.360	128.247.360	19.146.030
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000	93.000.000	93.000.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.299.500	11.299.500	5.649.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.200.000	13.200.000	7.575.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.484.000	97.484.000	45.140.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.140.000	9.140.000	7.340.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.140.000	9.140.000	7.340.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.536.076	733.536.076	733.532.076
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.536.076	483.536.076	483.532.076
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.400.928	1.216.400.928	1.216.394.528
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.177.800.928	1.177.800.928	1.177.794.528
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	38.600.000	38.600.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	174.952.706	174.952.706	114.915.006

2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	174.952.706	174.952.706	114.915.006
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	174.952.706	174.952.706	114.915.006
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	854.129.984	854.129.984	727.309.784
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	854.129.984	854.129.984	727.309.784
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	299.905.792	299.905.792	227.318.792
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	554.224.192	554.224.192	499.990.992
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.064.643.712	7.064.643.712	5.037.683.662
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.064.643.712	7.064.643.712	5.037.683.662
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	249.905.792	249.905.792	202.835.892
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	424.905.792	424.905.792	357.108.592
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	312.428.794	312.428.794	213.427.594
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.077.403.334	6.077.403.334	4.264.311.584

2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	480.057.499	480.057.499	349.495.851
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	480.057.499	480.057.499	349.495.851
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	480.057.499	480.057.499	349.495.851
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01 02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	480.057.499	480.057.499	349.495.851
2.15.0.00.0.00.01.0000					Dinas Perhubungan	27.623.996.937	27.623.996.937	27.470.447.074
2.15.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.623.996.937	27.623.996.937	27.470.447.074
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.623.996.937	27.623.996.937	27.470.447.074
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.668.424.171	20.668.424.171	20.689.245.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.069.750	45.069.750	26.789.660
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.677.300	27.677.300	13.512.870
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.392.450	17.392.450	13.276.790
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.444.597.722	15.444.597.722	15.674.601.529
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.419.604.382	15.419.604.382	15.653.028.709
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.993.340	24.993.340	21.572.820
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	807.281.545	807.281.545	701.745.505

2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.875.700	5.875.700	5.191.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.216.565	85.216.565	60.997.725
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	90.000.000	100.893.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.100.800	19.100.800	5.971.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.000.000	29.000.000	26.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	578.088.480	578.088.480	502.690.280
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.247.049.000	1.247.049.000	1.200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	22.197.000	22.197.000	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.852.000	24.852.000	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.970.230	716.970.230	715.570.230
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.900.000	5.900.000	4.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.700.000	292.700.000	292.700.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.370.230	418.370.230	418.370.230
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.407.455.924	2.407.455.924	2.370.538.176
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.401.396	184.401.396	169.504.096

2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	907.533.328	907.533.328	885.512.880
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.610.000	68.610.000	68.610.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.046.911.200	1.046.911.200	1.046.911.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.995.448.516	5.995.448.516	5.872.434.124
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	517.097.800	517.097.800	525.156.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	217.381.950	217.381.950	247.666.950
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	299.715.850	299.715.850	277.489.350
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.149.434.752	1.149.434.752	1.222.797.596
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	237.382.240	237.382.240	349.811.584
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	812.052.512	812.052.512	772.986.012
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	50.000.000	50.000.000	25.829.560
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25.000.000	25.000.000	13.025.960
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	25.000.000	25.000.000	12.803.600

2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.666.675.096	3.666.675.096	3.586.802.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.666.675.096	3.666.675.096	3.586.802.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	612.240.868	612.240.868	511.848.468
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	612.240.868	612.240.868	511.848.468
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	722.742.010	722.742.010	691.617.510
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	687.382.010	687.382.010	673.937.510
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	687.382.010	687.382.010	673.937.510
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	35.360.000	35.360.000	17.680.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	17.680.000	17.680.000	8.840.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	17.680.000	17.680.000	8.840.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	237.382.240	237.382.240	217.150.340

2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	237.382.240	237.382.240	217.150.340
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	237.382.240	237.382.240	217.150.340
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	131.384.139.193	131.384.139.193	152.283.895.782
2.16.2.20.2.21.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	131.384.139.193	131.384.139.193	152.283.895.782
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130.129.875.659	130.129.875.659	151.455.570.328
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.537.184.795	18.537.184.795	18.871.637.282
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.910	31.023.910	23.090.900
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.582.190	18.582.190	12.763.590
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.656.320	5.656.320	4.738.970
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.785.400	6.785.400	5.588.340
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.590.141.485	13.590.141.485	14.145.964.884
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.845.141.485	12.845.141.485	12.875.964.884
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	745.000.000	745.000.000	1.270.000.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	742.554.000	742.554.000	564.699.650
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.615.500	4.615.500	4.615.500
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	449.782.700	449.782.700	354.987.750
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.860.800	17.860.800	8.930.400
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.805.000	35.805.000	35.805.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0

2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.490.000	154.490.000	80.361.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.194.000	54.194.000	17.154.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	37.550.000	37.550.000	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.644.000	16.644.000	17.154.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.135.000	401.135.000	401.135.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.020.000	3.020.000	3.020.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.605.000	262.605.000	262.605.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.510.000	135.510.000	135.510.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.718.136.400	3.718.136.400	3.719.592.848
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.866.980.272	1.866.980.272	1.866.980.272
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	4.800.000	4.800.000	4.800.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.740.000	149.740.000	149.740.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.499.152.128	1.499.152.128	1.537.138.576
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.464.000	197.464.000	160.934.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	17.178.435.400	17.178.435.400	15.846.130.310
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	17.178.435.400	17.178.435.400	15.846.130.310
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.055.077.578	2.055.077.578	1.775.787.578
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10.368.999.744	10.368.999.744	9.904.915.644

2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	308.965.018	308.965.018	282.027.318
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.542.320.008	2.542.320.008	2.437.653.968
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	817.004.432	817.004.432	813.654.432
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.086.068.620	1.086.068.620	632.091.370
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	94.414.255.464	94.414.255.464	116.737.802.736
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	94.414.255.464	94.414.255.464	116.737.802.736
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	80.600.834.139	80.600.834.139	103.027.334.139
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9.303.867.467	9.303.867.467	9.235.294.739
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.509.553.858	4.509.553.858	4.475.173.858
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	652.111.708	652.111.708	486.822.218
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	652.111.708	652.111.708	486.822.218
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	652.111.708	652.111.708	486.822.218
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	285.716.606	285.716.606	220.504.016
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	206.366.096	206.366.096	140.047.996
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	160.029.006	160.029.006	126.270.206
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	602.151.826	602.151.826	341.503.236
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	602.151.826	602.151.826	341.503.236

2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	283.513.918	283.513.918	212.092.878
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	150.514.268	150.514.268	116.551.978
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	132.999.650	132.999.650	95.540.900
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	318.637.908	318.637.908	129.410.358
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	318.637.908	318.637.908	129.410.358
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.546.844.439	18.546.844.439	22.441.608.190
2.17.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.546.844.439	18.546.844.439	22.441.608.190
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.546.844.439	18.546.844.439	22.441.608.190
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.077.886.427	17.077.886.427	17.145.548.968
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.630.016	80.630.016	80.630.016
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.417.006	78.417.006	78.417.006
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.213.010	2.213.010	2.213.010
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.188.068.457	14.188.068.457	14.255.730.998
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.188.068.457	14.188.068.457	14.255.730.998
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.311.990	101.311.990	101.311.990

2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.688.750	10.688.750	10.688.750
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.658.240	67.658.240	67.658.240
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.965.000	15.965.000	15.965.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.574.563.592	1.574.563.592	1.574.563.592
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	319.700.000	319.700.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.251.863.592	1.251.863.592	1.251.863.592
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.312.372	1.133.312.372	1.133.312.372
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.244.984	825.244.984	825.244.984
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.270.000	53.270.000	53.270.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.797.388	254.797.388	254.797.388
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	266.464.240	266.464.240	255.064.240

2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.516.000	22.516.000	17.956.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.516.000	22.516.000	17.956.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	243.948.240	243.948.240	237.108.240
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	243.948.240	243.948.240	237.108.240
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	0	0	0

2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.896	118.552.896	118.552.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.896	118.552.896	118.552.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01	01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01	02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.896	118.552.896	118.552.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	74.952.896	74.952.896	3.844.528.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05	1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.952.896	74.952.896	3.844.528.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05	1.01	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	74.952.896	74.952.896	3.844.528.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	394.224.080	394.224.080	468.864.290
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	394.224.080	394.224.080	468.864.290

2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	167.461.344	167.461.344	315.246.554
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	226.762.736	226.762.736	153.617.736
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	614.763.900	614.763.900	609.048.900
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	614.763.900	614.763.900	609.048.900
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	614.763.900	614.763.900	609.048.900
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.658.293.554	22.658.293.554	22.757.952.235
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.658.293.554	22.658.293.554	22.757.952.235
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22.658.293.554	22.658.293.554	22.757.952.235
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.584.015.698	21.584.015.698	19.830.824.907
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0

2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.578.758.831	18.578.758.831	17.361.963.422
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.578.758.831	18.578.758.831	17.361.963.422
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.803.775	458.803.775	190.975.285
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.638.850	18.638.850	18.638.850
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.166.335	213.166.335	41.177.845
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.466.990	63.466.990	61.466.990
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.231.600	16.231.600	16.231.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.500.000	7.500.000	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.800.000	139.800.000	53.460.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.223.200	114.223.200	27.900.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.223.200	114.223.200	27.900.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.536.222.652	1.536.222.652	1.333.728.960
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	178.000.000	178.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.222.652	1.355.222.652	1.155.728.960

2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.007.240	896.007.240	916.257.240
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	763.822.240	763.822.240	784.372.240
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.185.000	132.185.000	131.885.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	324.748.896	324.748.896	450.080.316
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	84.523.746
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	84.523.746
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	324.748.896	324.748.896	365.556.570
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	324.748.896	324.748.896	365.556.570
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	74.952.896	74.952.896	458.026.986
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	74.952.896	74.952.896	458.026.986
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	0	0	168.678.196
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	74.952.896	74.952.896	289.348.790
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	599.623.168	599.623.168	1.047.798.138
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	599.623.168	599.623.168	1.047.798.138
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0

2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	524.670.272	524.670.272	820.783.972
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	74.952.896	74.952.896	227.014.166
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	0	792.840.792
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	792.840.792
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	655.191.792
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	137.649.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	74.952.896	74.952.896	178.381.096
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	74.952.896	74.952.896	178.381.096
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	74.952.896	74.952.896	178.381.096
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	60.749.399.227	60.749.399.227	75.233.235.750
2.22.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	60.749.399.227	60.749.399.227	75.233.235.750
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	60.749.399.227	60.749.399.227	75.233.235.750
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.388.093.377	38.388.093.377	38.136.428.892

2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.709.696	126.709.696	118.609.696
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.137.696	115.137.696	110.637.696
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.572.000	11.572.000	7.972.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.277.153.419	22.277.153.419	22.334.504.708
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.943.085.835	21.943.085.835	21.979.924.976
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324.067.584	324.067.584	349.539.732
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	5.040.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.682.836.620	1.682.836.620	1.106.518.520
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	380.068.320	380.068.320	363.582.320
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	776.048.900	776.048.900	207.324.800
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.250.000	296.250.000	287.625.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.261.400	88.261.400	61.611.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.600.000	43.600.000	43.600.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.608.000	80.608.000	124.775.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.825.000	638.825.000	533.925.200
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.412.000	374.412.000	281.587.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	264.413.000	264.413.000	252.338.200
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.866.989.054	6.866.989.054	6.521.911.944

2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.020.000	20.020.000	15.020.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.031.000.000	2.031.000.000	1.901.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	673.685.110	673.685.110	666.944.060
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.142.283.944	4.142.283.944	3.938.947.884
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.795.579.588	6.795.579.588	7.520.958.824
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.273.009.788	1.273.009.788	1.263.253.888
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	415.075.000	415.075.000	415.075.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.107.494.800	5.107.494.800	5.842.629.936
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	18.507.803.586	18.507.803.586	31.281.654.036
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.062.180.678	2.062.180.678	4.995.917.436
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.378.938.208
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	562.180.678	562.180.678	3.616.979.228
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	7.474.858.428	7.474.858.428	15.138.780.790
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.974.858.518	1.974.858.518	13.644.869.035
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	5.499.999.910	5.499.999.910	1.493.911.755

2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.970.764.480	8.970.764.480	11.146.955.810
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	8.970.764.480	8.970.764.480	11.146.955.810
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.273.849.404	1.273.849.404	1.217.138.902
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.273.849.404	1.273.849.404	1.217.138.902
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	499.999.900	499.999.900	485.091.100
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	773.849.504	773.849.504	732.047.802
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	492.271.620	492.271.620	336.500.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	492.271.620	492.271.620	336.500.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	292.271.620	292.271.620	0
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	200.000.000	200.000.000	336.500.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.087.381.240	2.087.381.240	661.513.920
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	150.000.000	150.000.000	124.999.900
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	150.000.000	150.000.000	124.999.900
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.937.381.240	1.937.381.240	536.514.020
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	437.381.240	437.381.240	405.623.020
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	1.500.000.000	1.500.000.000	130.891.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	3.600.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	0	0	3.600.000.000

2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0	0	1.080.000.280
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0	0	1.800.000.370
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0	0	719.999.350
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	483.000.498.840	483.000.498.840	479.071.323.992
2.22.0.00.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	483.000.498.840	483.000.498.840	479.071.323.992
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	483.000.498.840	483.000.498.840	479.071.323.992
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.467.155.745	19.467.155.745	15.658.077.498
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.267.800	22.267.800	13.861.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.267.800	22.267.800	13.861.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.224.258.024	9.224.258.024	9.255.081.424
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.224.258.024	9.224.258.024	9.255.081.424
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.341.046.600	1.341.046.600	926.368.900

2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.354.200	24.354.200	24.354.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.831.400	67.831.400	46.565.700
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.450.000	33.450.000	17.216.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.215.411.000	1.215.411.000	838.233.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.903.853.209	2.903.853.209	1.227.798.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.903.853.209	2.903.853.209	1.227.798.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.479.089.212	4.479.089.212	944.382.250
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.479.089.212	4.479.089.212	944.382.250
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.640.900	1.496.640.900	3.290.585.924
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	939.808.000	939.808.000	1.384.600.896
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	556.832.900	556.832.900	1.905.985.028
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	463.533.343.095	463.533.343.095	463.413.246.494
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	457.752.498.075	457.752.498.075	459.066.605.985
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	456.590.008.875	456.590.008.875	457.870.600.241
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	1.162.489.200	1.162.489.200	1.196.005.744
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01	03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	847.705.700	847.705.700	705.727.988
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	264.696.000	264.696.000	151.055.550
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	583.009.700	583.009.700	554.672.438
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.03		Penyelenggaraan Desa Adat	914.533.000	914.533.000	632.068.892
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.03	01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.03	02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	914.533.000	914.533.000	632.068.892
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia	4.018.606.320	4.018.606.320	3.008.843.629
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.04	01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.04	02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	4.018.606.320	4.018.606.320	3.008.843.629
2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.827.501.775	24.827.501.775	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.827.501.775	24.827.501.775	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	207.381.950	207.381.950	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	197.382.090	197.382.090	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	197.382.090	197.382.090	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.999.850	9.999.850	0

2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	149.905.792	149.905.792	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448	37.476.448	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	9.999.860	9.999.860	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	9.999.860	9.999.860	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	9.999.860	9.999.860	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	24.620.119.825	24.620.119.825	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.455.666.479	24.455.666.479	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.473.448	41.473.448	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.473.448	41.473.448	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.006.836.475	23.006.836.475	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.966.623.517	22.966.623.517	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.212.958	40.212.958	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.815.800	258.815.800	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.000	9.997.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.899.300	59.899.300	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	55.000.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.937.500	29.937.500	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.982.000	103.982.000	0

2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.620.000	21.620.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.720.000	3.720.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.900.000	17.900.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.002.724	387.002.724	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000	124.000.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.002.724	262.002.724	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.918.032	739.918.032	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	498.152.240	498.152.240	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.765.792	201.765.792	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	164.453.346	164.453.346	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	37.476.448	37.476.448	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	37.476.448	37.476.448	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	126.976.898	126.976.898	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	10.000.000	10.000.000	0
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	116.976.898	116.976.898	0
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	24.234.119.071	24.234.119.071	26.209.901.797

3.25.0.00.0.00.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.234.119.071	24.234.119.071	26.209.901.797
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.234.119.071	24.234.119.071	26.209.901.797
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.251.117.937	23.251.117.937	24.001.798.019
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.253.442.048	20.253.442.048	20.505.300.291
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.253.442.048	20.253.442.048	20.505.300.291
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.347.345	202.347.345	267.157.480
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.347.345	24.347.345	16.952.380
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.000.000	178.000.000	250.205.100
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.795.328.544	2.795.328.544	3.229.340.248
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.290.576	919.290.576	919.345.976
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.688.617.968	1.688.617.968	2.122.574.272
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.420.000	187.420.000	187.420.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	149.952.896	149.952.896	1.293.435.696
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0	0	1.146.253.500
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0	0	1.146.253.500
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	149.952.896	149.952.896	147.182.196
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	149.952.896	149.952.896	147.182.196

3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	400.575.600	400.575.600	469.284.796	
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	400.575.600	400.575.600	469.284.796	
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	400.575.600	400.575.600	469.284.796
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	99.999.770	99.999.770	99.999.770	
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	99.999.770	99.999.770	99.999.770	
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99.999.770	99.999.770	99.999.770
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	332.472.868	332.472.868	345.383.516	
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	332.472.868	332.472.868	345.383.516	
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	323.972.868	323.972.868	336.883.516
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.26.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pariwisata	15.637.446.972	15.637.446.972	15.960.349.906	
3.26.0.00.0.00.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.637.446.972	15.637.446.972	15.960.349.906	
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.637.446.972	15.637.446.972	15.960.349.906	

3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.007.242.348	14.007.242.348	14.271.974.457
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.711.704	119.711.704	116.597.394
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.723.098	42.723.098	40.313.098
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.988.606	76.988.606	76.284.296
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.587.132.632	12.587.132.632	12.617.956.032
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.587.132.632	12.587.132.632	12.617.956.032
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.428.825	87.428.825	89.071.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.593.000	3.593.000	3.593.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.567.525	11.567.525	10.711.200
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	55.000.000	55.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.798.300	6.798.300	6.798.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.250.000	8.250.000	10.749.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.140.823	344.140.823	344.140.823
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000	138.000.000	138.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.140.823	204.140.823	204.140.823
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.828.364	868.828.364	1.104.208.708

3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.532.300	178.532.300	266.162.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	674.576.064	674.576.064	787.005.408
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.720.000	15.720.000	51.041.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	574.721.070	574.721.070	358.469.345
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	88.584.620	88.584.620	2.077.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	88.584.620	88.584.620	2.077.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	268.806.254	268.806.254	216.204.749
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	268.806.254	268.806.254	216.204.749
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	217.330.196	217.330.196	140.187.096
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	179.252.896	179.252.896	115.548.996
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	38.077.300	38.077.300	24.638.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	587.684.991	587.684.991	580.213.291
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	587.684.991	587.684.991	580.213.291
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	229.170.486	229.170.486	227.487.896
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	84.467.551	84.467.551	80.046.751
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	274.046.954	274.046.954	272.678.644

3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	285.369.299	285.369.299	235.133.799
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	135.252.851	135.252.851	117.725.051
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	135.252.851	135.252.851	117.725.051
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	150.116.448	150.116.448	117.408.748
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	150.116.448	150.116.448	117.408.748
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	182.429.264	182.429.264	514.559.014
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	182.429.264	182.429.264	514.559.014
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	182.429.264	182.429.264	514.559.014
3.27.2.09.0.00.01.0000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.320.793.276	65.320.793.276	78.322.655.034
3.27.2.09.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.025.598.868	2.025.598.868	2.662.190.042
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.025.598.868	2.025.598.868	2.662.190.042
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	105.235.000	105.235.000	725.784.974
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	52.521.800
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	10.143.400
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	6.278.400
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	30.000.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	6.100.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.235.000	105.235.000	323.118.582

3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000	59.400.000	202.224.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.835.000	45.835.000	120.894.582
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	350.144.592
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	125.891.696
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	100.000.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	124.252.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	252.360.688	252.360.688	293.645.438
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	252.360.688	252.360.688	293.645.438
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	252.360.688	252.360.688	293.645.438
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	547.207.024	547.207.024	523.099.224
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	207.386.640	207.386.640	202.464.540
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	207.386.640	207.386.640	202.464.540
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	339.820.384	339.820.384	320.634.684

3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	339.820.384	339.820.384	320.634.684
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.120.796.156	1.120.796.156	1.119.660.406
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.120.796.156	1.120.796.156	1.119.660.406
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	358.743.934	358.743.934	358.701.184
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	362.287.987	362.287.987	361.690.887
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	399.764.235	399.764.235	399.268.335
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	63.295.194.408	63.295.194.408	75.660.464.992
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	63.295.194.408	63.295.194.408	75.660.464.992
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.620.464.671	56.620.464.671	58.328.124.860
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.134.520	619.134.520	596.276.720
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	329.811.484	329.811.484	317.784.084
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.323.036	289.323.036	278.492.636
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.953.083.364	51.953.083.364	52.192.042.867
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.549.582.884	51.549.582.884	51.795.425.387
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	403.500.480	403.500.480	396.617.480
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.283.395	371.283.395	313.071.995
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.892.580	64.892.580	54.749.180
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.435.515	50.435.515	39.225.215

3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	205.000.000	175.000.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.955.300	50.955.300	44.097.600
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.000.000	602.000.000	1.730.104.574
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.000.000	402.000.000	871.776.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	200.000.000	858.328.574
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.074.963.392	3.074.963.392	3.496.628.704
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.050.240.224	2.050.240.224	2.385.557.504
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	824.623.168	824.623.168	881.958.304
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.100.000	200.100.000	229.112.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.173.750.861	5.173.750.861	12.911.026.805
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	375.050.142	375.050.142	362.608.292
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	375.050.142	375.050.142	362.608.292
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.314.382.971	2.314.382.971	5.314.692.944
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	0	0	736.389.362
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	619.660.751	619.660.751	1.364.595.672
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	357.528.396	357.528.396	1.217.766.466
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.337.193.824	1.337.193.824	1.995.941.444

3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	0	0	1.178.999.830
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.03	04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	0	0	1.178.999.830
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.484.317.748	2.484.317.748	6.054.725.739
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.484.317.748	2.484.317.748	4.157.926.867
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0	0	1.896.798.872
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	994.572.588	994.572.588	936.817.188
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	Penataan Prasarana Pertanian	994.572.588	994.572.588	936.817.188
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	696.040.880	696.040.880	680.832.480
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	298.531.708	298.531.708	255.984.708
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	373.292.944	373.292.944	1.067.730.926
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	315.692.896	315.692.896	308.092.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	315.692.896	315.692.896	308.092.896

3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	0	0	712.022.782
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	0	0	340.118.240
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	371.904.542
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	57.600.048	57.600.048	47.615.248
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	57.600.048	57.600.048	47.615.248
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0	0	2.295.861.869
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	0	0	2.295.861.869
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	0	756.741.987
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	0	1.048.290.586
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	490.829.296
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	133.113.344	133.113.344	120.903.344
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	133.113.344	133.113.344	120.903.344
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	133.113.344	133.113.344	120.903.344
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.814.647.527	47.814.647.527	52.365.153.316
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.961.467.335	8.961.467.335	8.977.608.627
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.961.467.335	8.961.467.335	8.977.608.627

3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.225.177.560	4.225.177.560	4.331.107.360
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.367.122	3.437.367.122	3.437.367.122
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.437.367.122	3.437.367.122	3.437.367.122
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.243.510	81.243.510	81.243.310
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.330.510	13.330.510	13.330.310
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.875.000	55.875.000	55.875.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.038.000	9.038.000	9.038.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.286.000	17.286.000	17.286.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.286.000	17.286.000	17.286.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.280.928	689.280.928	795.210.928
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.278.688	346.278.688	346.278.688
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.002.240	243.002.240	348.932.240
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	212.429.240	212.429.240	209.579.144
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	212.429.240	212.429.240	209.579.144
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	212.429.240	212.429.240	209.579.144

3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	34.999.800	34.999.800	28.292.800
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.999.800	34.999.800	28.292.800
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	34.999.800	34.999.800	28.292.800
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	264.905.667	264.905.667	209.890.467
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	264.905.667	264.905.667	209.890.467
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	264.905.667	264.905.667	209.890.467
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.223.955.068	4.223.955.068	4.198.738.856
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4.223.955.068	4.223.955.068	4.198.738.856
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	1.418.945.408	1.418.945.408	1.454.208.596
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.630.936.500	2.630.936.500	2.630.936.500
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	9.868.110	9.868.110	9.068.110
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	77.205.050	77.205.050	30.875.650
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	87.000.000	87.000.000	73.650.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.853.180.192	38.853.180.192	43.387.544.689
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	38.853.180.192	38.853.180.192	43.387.544.689
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.510.094.538	38.510.094.538	37.953.937.820

3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.827.720	40.827.720	35.827.720
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.827.720	40.827.720	35.827.720
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.475.941.347	32.475.941.347	32.576.430.323
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.430.398.872	32.430.398.872	32.534.900.553
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.542.475	45.542.475	41.529.770
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.032.375.325	1.032.375.325	740.196.705
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.932.500	29.932.500	29.932.500
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.135.025	228.135.025	166.520.405
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.000.000	249.000.000	234.000.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	54.429.800	54.429.800	53.101.800
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.970.000	12.970.000	12.970.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.750.000	42.750.000	26.250.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.158.000	415.158.000	217.422.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.654.104	341.654.104	149.570.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	341.654.104	341.654.104	149.570.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.561.426	924.561.426	925.961.426
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.695.242	279.695.242	281.095.242
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.866.184	644.866.184	644.866.184
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.694.734.616	3.694.734.616	3.525.951.646

3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.170.881.390	2.170.881.390	2.092.789.790
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.401.370	437.401.370	346.710.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.086.451.856	1.086.451.856	1.086.451.856
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	155.609.496	155.609.496	4.895.944.786
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	4.773.437.100
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	4.155.237.100
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	0	618.200.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	155.609.496	155.609.496	122.507.686
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	155.609.496	155.609.496	122.507.686
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	0	399.999.900
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	0	399.999.900
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	0	399.999.900
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	187.476.158	187.476.158	137.662.183
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	187.476.158	187.476.158	137.662.183

3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	187.476.158	187.476.158	137.662.183
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.757.486.669	26.757.486.669	24.744.824.775
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.757.486.669	26.757.486.669	24.744.824.775
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.983.804.477	18.983.804.477	18.482.705.183
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.737.828.045	17.737.828.045	17.333.629.883
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.592.962.401	13.592.962.401	13.592.962.401
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.592.962.401	13.592.962.401	13.592.962.401
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.138.306.760	1.138.306.760	1.281.027.350
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.952.100	12.952.100	12.952.100
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	720.131.660	720.131.660	966.149.250
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	85.000.000	85.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.217.000	16.217.000	16.217.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.840.000	5.840.000	5.840.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.166.000	298.166.000	194.869.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.393.700	924.393.700	961.870.148
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.000.000	222.000.000	222.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	502.393.700	502.393.700	539.870.148
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.082.165.184	2.082.165.184	1.497.769.984

3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.054.412.288	1.054.412.288	1.080.817.088
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.027.752.896	1.027.752.896	416.952.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	356.465.798	356.465.798	334.463.198
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	356.465.798	356.465.798	334.463.198
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	356.465.798	356.465.798	334.463.198
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	99.958.800	99.958.800	95.778.800
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	99.958.800	99.958.800	95.778.800
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	99.958.800	99.958.800	95.778.800
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	18.363.820	18.363.820	8.483.820
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	18.363.820	18.363.820	8.483.820
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	18.363.820	18.363.820	8.483.820
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	653.871.256	653.871.256	661.832.724
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	496.401.448	496.401.448	494.826.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	496.401.448	496.401.448	494.826.448

3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	107.469.848	107.469.848	103.869.848
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	107.469.848	107.469.848	103.869.848
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	49.999.960	49.999.960	63.136.428
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	49.999.960	49.999.960	63.136.428
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	117.316.758	117.316.758	48.516.758
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	117.316.758	117.316.758	48.516.758
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	117.316.758	117.316.758	48.516.758
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.773.682.192	7.773.682.192	6.262.119.592
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.122.819.450	2.122.819.450	1.955.457.050
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.863.774	1.766.863.774	1.766.863.774
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.766.863.774	1.766.863.774	1.766.863.774
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.352.780	192.352.780	24.990.380
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.984.780	166.984.780	17.710.380
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	1.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.368.000	19.368.000	2.280.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.506.448	53.506.448	53.506.448

3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.506.448	53.506.448	53.506.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.096.448	110.096.448	110.096.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.096.448	110.096.448	110.096.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.450.691.454	5.450.691.454	4.170.958.454
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5.450.691.454	5.450.691.454	4.170.958.454
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	15.247.420	15.247.420	11.222.420
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	334.869.110	334.869.110	327.169.110
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.100.574.924	5.100.574.924	3.832.566.924
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	200.171.288	200.171.288	135.704.088
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.171.288	200.171.288	135.704.088
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.171.288	200.171.288	135.704.088
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	0	109.122.323.140	157.835.953.094
4.01.2.23.2.24.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	0	609.311.284
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	0	444.857.938

4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0	444.857.938
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	307.381.840
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	0	9.999.850
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	0	0	50.000.140
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	209.905.402
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0	0	37.476.448
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	0	0	137.476.098
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0	0	137.476.098
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	0	164.453.346
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	0	164.453.346
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	0	0	37.476.448
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	0	0	37.476.448
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	0	0	126.976.898
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	0	0	10.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	0	0	116.976.898
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	109.122.323.140	157.226.641.810
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	0	109.122.323.140	157.226.641.810
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	86.318.433.203	127.578.653.703

4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1.026.234.852	1.045.537.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1.023.941.252	1.045.537.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	2.293.600	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	37.585.820.596	74.296.637.961
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	36.965.278.898	73.642.003.615
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	617.157.898	654.634.346
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	3.383.800	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	346.058.557	383.535.005
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	346.058.557	383.535.005
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	15.409.415	7.379.510
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	15.409.415	7.379.510
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	9.663.556.231	11.545.896.691
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	435.648.467	358.412.742
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1.940.471.716	3.822.915.703
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	110.195.900	57.242.500
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	3.618.264.444	3.648.264.444
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	3.011.284.730	3.073.893.880

4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	547.690.974	585.167.422
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	9.317.162.628	9.993.593.052
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	10.000.000	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	1.534.500.000	1.708.500.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	3.551.092.944	3.551.092.944
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	4.221.569.684	4.734.000.108
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	9.024.866.282	11.138.926.662
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1.049.478.440	2.148.254.340
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	6.295.401.214	6.981.846.350
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	276.370.000	355.820.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.357.616.628	1.623.005.972
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	46.000.000	30.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	5.012.003.128	4.747.349.060

4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	247.349.060	247.349.060
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	4.764.654.068	4.500.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	0	11.919.281.466	11.974.281.466
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0	8.695.476.759	8.695.476.759
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0	3.018.324.707	3.018.324.707
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0	205.480.000	260.480.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	0	469.974.800	469.974.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.13	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	0	469.974.800	469.974.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan	0	1.938.065.248	1.975.541.696
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14	01	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14	02	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0	1.938.065.248	1.975.541.696
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0	389.862.946	271.872.406
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01		Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0	164.896.348	111.469.058
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	01	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	0	29.181.900	14.957.855
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	02	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	0	52.724.600	36.228.955
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	0	82.989.848	60.282.248
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02		Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	0	224.966.598	160.403.348
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	54.999.640	40.452.940
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0	40.000.000	28.544.400
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	0	17.498.700	11.249.350

4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	0	24.999.810	14.021.610
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	0	87.468.448	66.135.048
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0	1.169.983.807	2.226.585.227
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	0	279.928.408	182.449.668
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	0	149.999.988	138.656.788
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	0	129.928.420	43.792.880
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	0	502.626.490	354.512.690
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	0	242.429.144	203.521.144
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	0	260.197.346	150.991.546
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah	0	387.428.909	1.689.622.869
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	0	242.429.109	163.461.209
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	144.999.800	1.526.161.660
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	17.441.273.296	21.038.894.896
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	0	6.849.715.526	6.699.871.726
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	0	6.087.381.170	6.015.491.970
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	0	762.334.356	684.379.756
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	0	10.591.557.770	14.339.023.170
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	0	10.591.557.770	14.339.023.170
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0	3.802.769.888	3.802.769.888
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	0	1.748.481.856	1.748.481.856
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	0	1.073.905.792	1.073.905.792
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	0	187.382.240	187.382.240

4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	0	149.905.792	149.905.792
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	0	337.288.032	337.288.032
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	0	2.054.288.032	2.054.288.032
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	0	1.866.905.792	1.866.905.792
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	0	187.382.240	187.382.240
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	232.816.710
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	0	0	51.353.550
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	0	0	51.353.550
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	0	0	28.869.710
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0	0	28.869.710
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	0	0	152.593.450
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	0	0	152.593.450
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	2.016.673.950
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1.339.998.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	24.990.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1.267.921.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	47.087.000

4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	0	161.070.510
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	0	0	66.006.510
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	95.064.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	515.604.840
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	298.365.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	50.982.840
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	166.257.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	0	58.375.030
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	0	33.285.330
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	0	0	33.285.330
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	0	25.089.700
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	0	25.089.700
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	158.604.866.318	158.604.866.318	204.541.784.606
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	158.604.866.318	158.604.866.318	204.541.784.606
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	158.604.866.318	158.604.866.318	204.541.784.606
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.189.112.068	83.189.112.068	85.060.154.065
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.213.546	162.213.546	265.395.946
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.131.698	68.131.698	141.524.898

4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.081.848	94.081.848	123.871.048
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.263.226.426	10.263.226.426	10.568.971.816
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.074.221.200	10.074.221.200	10.337.405.520
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.916.008	95.916.008	116.403.648
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	93.089.218	93.089.218	115.162.648
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.170.829.138	5.170.829.138	6.689.394.853
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	193.869.025	193.869.025	132.238.775
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.634.290	289.634.290	276.232.480
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.213.438.254	1.213.438.254	782.938.254
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	217.750.300	217.750.300	62.269.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	930.000.000	930.000.000	930.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.326.137.269	2.326.137.269	4.505.715.944
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.655.000	119.655.000	44.700.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.655.000	119.655.000	44.700.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.519.075.580	2.519.075.580	2.422.535.832
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	7.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	890.000.000	890.000.000	890.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.619.075.580	1.619.075.580	1.525.035.832
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.919.418.996	3.919.418.996	3.771.945.996

4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.933.409.096	2.933.409.096	2.933.401.096
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193.458.400	193.458.400	193.458.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	792.551.500	792.551.500	645.086.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	59.407.519.202	59.407.519.202	59.675.837.172
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.253.132.074	58.253.132.074	58.298.132.074
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	912.787.500	912.787.500	1.098.350.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	241.599.628	241.599.628	279.355.098
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD	1.627.174.180	1.627.174.180	1.621.372.450
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	226.443.290	226.443.290	229.421.490
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.400.730.890	1.400.730.890	1.391.950.960
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	75.415.754.250	75.415.754.250	119.481.630.541
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	8.678.304.300	8.678.304.300	16.346.065.318
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.144.555.116	1.144.555.116	1.891.443.906
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	7.037.180.316	7.037.180.316	13.604.734.006
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	496.568.868	496.568.868	849.887.406
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.428.883.940	4.428.883.940	13.731.667.440
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	64.235.198	64.235.198	2.738.500.048
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.572.098	77.572.098	2.770.418.098
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.426.247.948	1.426.247.948	2.742.114.098
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.434.105.948	1.434.105.948	2.738.369.798
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.426.722.748	1.426.722.748	2.742.265.398

4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	15.778.735.564	15.778.735.564	28.882.239.284
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.833.882.092	3.833.882.092	6.583.992.692
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.330.225.550	3.330.225.550	6.472.319.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.984.445.516	3.984.445.516	7.129.576.516
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.605.429.356	3.605.429.356	5.992.273.196
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.024.753.050	1.024.753.050	2.704.077.680
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	10.775.481.008	10.775.481.008	15.367.907.586
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	1.816.403.666	1.816.403.666	5.412.289.344
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.432.978.696	2.432.978.696	3.436.479.596
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.251.172.500	3.251.172.500	3.246.703.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	905.842.450	905.842.450	903.498.650
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.369.083.696	2.369.083.696	2.368.936.496
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	26.871.819.430	26.871.819.430	30.496.661.985
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.220.347.396	3.220.347.396	5.773.746.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.106.646.500	1.106.646.500	2.170.509.050
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	22.544.825.534	22.544.825.534	22.552.406.039
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	493.084.496	493.084.496	932.540.096
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	493.084.496	493.084.496	932.540.096
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	8.389.445.512	8.389.445.512	13.724.548.832
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.356.583.514	6.356.583.514	11.692.836.984
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.032.861.998	2.032.861.998	2.031.711.848
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.380.849.779	24.380.849.779	23.720.250.843

5.01.0.00.0.00.01.0000	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24.380.849.779	24.380.849.779	23.720.250.843
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01			PERENCANAAN	24.380.849.779	24.380.849.779	23.720.250.843
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.554.026.578	15.554.026.578	15.827.121.384
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.181.172	300.181.172	263.275.530
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.728.912	247.728.912	239.812.600
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.452.260	52.452.260	23.462.930
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.594.313.631	12.594.313.631	12.803.837.631
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.308.293.040	12.308.293.040	12.517.817.040
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.117.995	198.117.995	198.117.995
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	87.902.596	87.902.596	87.902.596
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.266.986	625.266.986	588.447.986
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.703.698	43.703.698	43.703.698
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.152.548	176.152.548	116.533.548
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.476.448	123.476.448	126.276.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.884.948	53.884.948	73.884.948
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.916.448	74.916.448	74.916.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	42.426.448	42.426.448	42.426.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.706.448	110.706.448	110.706.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.129.768	928.129.768	965.606.216
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	40.476.448

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.276.448	342.276.448	342.276.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.853.320	582.853.320	582.853.320
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.135.021	1.106.135.021	1.205.954.021
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	779.224.480	779.224.480	779.224.480
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.986.448	132.986.448	132.986.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193.924.093	193.924.093	293.743.093
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.822.350.794	5.822.350.794	5.561.454.662
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.197.432.160	3.197.432.160	2.994.538.880
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	83.047.620	83.047.620	48.368.940
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.114.384.540	3.114.384.540	2.946.169.940
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	761.917.542	761.917.542	698.026.742
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	471.309.026	471.309.026	420.083.626
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	290.608.516	290.608.516	277.943.116
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.863.001.092	1.863.001.092	1.868.889.040
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	85.850.000	85.850.000	85.669.200
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	282.305.892	282.305.892	297.600.240

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.494.845.200	1.494.845.200	1.485.619.600
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.004.472.407	3.004.472.407	2.331.674.797
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.075.821.545	1.075.821.545	897.059.160
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.315.696	88.315.696	84.967.696
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.841.728	43.841.728	40.529.728
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	47.839.748	47.839.748	44.527.748
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43.968.648	43.968.648	40.341.648
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.966.188	144.966.188	89.572.488
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	78.889.993	78.889.993	44.966.908
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	555.999.896	555.999.896	498.455.196
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71.999.648	71.999.648	53.697.748

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	858.164.562	858.164.562	605.640.162
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	221.994.084	221.994.084	168.775.054
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	275.939.884	275.939.884	196.484.514
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16.249.400	16.249.400	8.778.500
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	343.981.194	343.981.194	231.602.094
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.070.486.300	1.070.486.300	828.975.475
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	277.270.320	277.270.320	235.629.195
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	257.973.940	257.973.940	181.846.740
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	289.839.040	289.839.040	236.831.540
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	245.403.000	245.403.000	174.668.000
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.213.463.680.361	1.213.463.680.361	1.414.997.825.816
5.02.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.213.463.680.361	1.213.463.680.361	1.414.997.825.816
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	1.213.463.680.361	1.213.463.680.361	1.414.997.825.816

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.686.909.129	22.686.909.129	23.205.054.715	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.381.270	31.381.270	31.381.270	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.381.270	31.381.270	31.381.270
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.165.416.206	19.165.416.206	19.446.218.288	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.961.132.256	18.961.132.256	19.244.694.968
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	204.283.950	204.283.950	201.523.320
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.180.837.037	1.180.837.037	1.335.381.385	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.827.000	252.827.000	347.839.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	928.010.037	928.010.037	987.542.385
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.309.274.616	2.309.274.616	2.392.073.772	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	478.856.744	478.856.744	587.350.096
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.418.000	97.418.000	135.100.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.732.999.872	1.732.999.872	1.669.622.976
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.186.842.012.286	1.186.842.012.286	1.388.128.627.499	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0	0	2.757.169.262	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	0	2.757.169.262
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	287.855.450	287.855.450	213.748.700	

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	287.855.450	287.855.450	213.748.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	246.936.050	246.936.050	200.692.050
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	246.936.050	246.936.050	200.692.050
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	264.469.244	264.469.244	402.443.244
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	264.469.244	264.469.244	402.443.244
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.186.042.751.542	1.186.042.751.542	1.384.554.574.243
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.775.000.000	2.775.000.000	17.775.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	172.932.325.432	172.932.325.432	282.897.903.508
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	960.335.426.110	960.335.426.110	1.033.881.670.735
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.934.758.946	3.934.758.946	3.664.143.602
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.934.758.946	3.934.758.946	3.664.143.602
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	249.633.680	249.633.680	249.633.680
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	302.560.800	302.560.800	302.560.800

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.383.880.720	2.383.880.720	2.299.220.720
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	998.683.746	998.683.746	812.728.402
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	159.675.916.259	159.675.916.259	150.595.642.566
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	159.675.916.259	159.675.916.259	150.595.642.566
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	159.675.916.259	159.675.916.259	150.595.642.566
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	142.343.011.921	142.343.011.921	132.875.526.218
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.621.700	20.621.700	20.621.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.091.400	11.091.400	11.091.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.300	9.530.300	9.530.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.104.825.206	122.104.825.206	110.636.310.861
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122.104.825.206	122.104.825.206	110.636.310.861
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.683.517.815	4.683.517.815	4.558.381.665
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.978.800	76.978.800	76.978.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.458.427.115	1.458.427.115	1.467.937.965
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.019.552.900	2.019.552.900	1.928.552.900

5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.752.000	47.752.000	47.752.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	157.050.000	157.050.000	164.050.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623.757.000	623.757.000	573.110.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.069.710.000	2.069.710.000	2.288.100.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.779.500.000	1.779.500.000	1.799.500.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.210.000	290.210.000	288.600.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.367.480.000	4.367.480.000	4.372.270.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.260.000	17.260.000	17.260.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.513.220.000	2.513.220.000	2.518.020.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.837.000.000	1.837.000.000	1.836.990.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.096.857.200	9.096.857.200	10.999.841.992
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	435.511.948	435.511.948	437.080.548
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.221.947.060	2.221.947.060	2.180.881.612
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	613.718.032	613.718.032	727.527.376
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.510.897.264	4.510.897.264	6.243.569.560
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	256.398.800	256.398.800	260.398.800

5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.058.384.096	1.058.384.096	1.150.384.096
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	42.694.340	42.694.340	42.694.340
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	42.694.340	42.694.340	42.694.340
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	42.694.340	42.694.340	42.694.340
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.290.209.998	17.290.209.998	17.677.422.008
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.290.209.998	17.290.209.998	17.677.422.008
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	151.604.900	151.604.900	135.726.190
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	20.042.180	20.042.180	20.042.180
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	400.849.460	400.849.460	200.849.460
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9.316.466.976	9.316.466.976	9.474.892.768
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	5.839.910.232	5.839.910.232	6.284.575.160
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.525.833.910	1.525.833.910	1.525.833.910
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.502.340	35.502.340	35.502.340
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	18.649.489.436	18.649.489.436	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.649.489.436	18.649.489.436	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	18.649.489.436	18.649.489.436	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.621.770.922	15.621.770.922	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.982.000	33.982.000	0

5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	5.250.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.732.000	28.732.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.335.140.673	12.335.140.673	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.335.140.673	12.335.140.673	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.912.960	651.912.960	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.818.000	7.818.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.006.160	148.006.160	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.275.000	92.275.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.763.800	15.763.800	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	19.764.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.286.000	368.286.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.135.000	48.135.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.135.000	48.135.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.673.341	1.549.673.341	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000	279.000.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.673.341	1.267.673.341	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.002.926.948	1.002.926.948	0

5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	674.757.128	674.757.128	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	136.669.820	136.669.820	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	55.000.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.500.000	136.500.000	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.027.718.514	3.027.718.514	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.430.571.982	1.430.571.982	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	13.772.265	13.772.265	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.111.383.564	1.111.383.564	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	134.686.809	134.686.809	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	170.729.344	170.729.344	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	360.855.744	360.855.744	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	79.166.848	79.166.848	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	99.676.448	99.676.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	182.012.448	182.012.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	659.927.144	659.927.144	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	386.195.800	386.195.800	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	106.244.448	106.244.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	86.654.448	86.654.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	80.832.448	80.832.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	576.363.644	576.363.644	0

5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	314.002.448	314.002.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	161.725.748	161.725.748	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	75.026.448	75.026.448	0
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25.609.000	25.609.000	0
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	50.080.632.679
5.03.5.04.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	0	0	50.080.632.679
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	0	0	25.691.167.295
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	19.291.201.981
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	121.435.800
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	106.953.800
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	14.482.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	16.068.737.828
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	16.068.737.828
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	565.345.960
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	7.818.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	152.839.160
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	92.275.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	15.763.800
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	19.764.000

5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	276.886.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	47.635.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	47.635.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	1.549.673.341
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	3.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	279.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	1.267.673.341
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	938.374.052
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	599.804.232
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	136.669.820
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	75.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	126.900.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	6.399.965.314
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	0	0	4.924.488.886
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	0	8.072.265
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	0	0	4.649.000.468
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	0	125.186.809

5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	142.229.344
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	0	0	301.235.744
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	0	0	63.784.848
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0	0	69.300.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	0	0	168.150.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	0	0	638.381.592
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	0	0	360.687.800
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0	0	145.158.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	0	0	66.522.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	0	0	66.012.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	0	535.859.092
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	0	287.402.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0	0	136.075.748
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	0	0	94.072.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0	0	18.308.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	24.389.465.384
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	18.906.758.270
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	7.721.503.922
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	7.721.503.922
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	268.398.410
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	99.992.900
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	49.355.510
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	85.000.000

5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	34.050.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	711.120.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	711.120.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	2.333.807.264
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	630.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	1.703.807.264
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	912.096.044
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	298.206.044
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	399.500.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	214.390.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	0	6.959.832.630
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0	6.959.832.630
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	5.482.707.114
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	0	0	781.447.770
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	31.640.650

5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	749.807.120
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0	0	4.701.259.344
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	0	0	534.418.994
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	0	268.237.300
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	0	0	107.090.300
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	0	0	14.641.650
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0	0	3.776.871.100
5.04.0.00.0.00.01.00						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.220.034.302	30.220.034.302	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	30.220.034.302	30.220.034.302	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	30.220.034.302	30.220.034.302	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.744.802.246	15.744.802.246	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.999.750	16.999.750	0

5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.999.750	16.999.750	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.942.110.056	11.942.110.056	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.942.110.056	11.942.110.056	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.134.440	224.134.440	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.992.900	99.992.900	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.229.540	41.229.540	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.050.000	49.050.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.862.000	33.862.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.908.000	213.908.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.908.000	213.908.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.469.372.512	1.469.372.512	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.000.000	630.000.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	839.372.512	839.372.512	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.878.277.488	1.878.277.488	0

5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.722.344	336.722.344	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.261.165.144	1.261.165.144	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.390.000	280.390.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.475.232.056	14.475.232.056	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	1.176.978.304	1.176.978.304	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	39.645.050	39.645.050	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.137.333.254	1.137.333.254	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13.298.253.752	13.298.253.752	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	1.043.600.494	1.043.600.494	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	349.595.000	349.595.000	0

5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	164.753.000	164.753.000	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	19.376.650	19.376.650	0
5.04.0.00.0.00.01.00	5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	11.720.928.608	11.720.928.608	0
5.05.0.00.0.00.02.00						Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.722.103.336	24.722.103.336	23.243.111.763
5.05.0.00.0.00.02.00	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24.722.103.336	24.722.103.336	23.243.111.763
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24.722.103.336	24.722.103.336	23.243.111.763
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.385.386.536	15.385.386.536	14.589.186.063
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.070.150	86.070.150	65.692.750
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.999.750	39.999.750	27.660.750
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.070.400	46.070.400	38.032.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.010.334.630	12.010.334.630	11.422.889.349
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.992.703.030	11.992.703.030	11.408.233.949
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.000.000	11.000.000	9.593.400
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.331.600	3.331.600	2.304.400
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.300.000	3.300.000	2.757.600
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.430.040	391.430.040	309.375.800
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.524.000	12.524.000	12.524.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.005.140	41.005.140	34.752.900

5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.416.500	142.416.500	142.416.500
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.880.400	23.880.400	11.940.400
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.200.000	37.200.000	37.200.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.404.000	134.404.000	70.542.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	337.320.000	337.320.000	79.520.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	133.800.000	133.800.000	0
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.520.000	203.520.000	79.520.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.496.036	532.496.036	532.496.036
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.480.000	2.480.000	2.480.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	226.000.000	226.000.000
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.016.036	304.016.036	304.016.036
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.027.735.680	2.027.735.680	2.179.212.128
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.128.032	761.128.032	761.128.032
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.266.607.648	1.266.607.648	1.418.084.096
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.336.716.800	9.336.716.800	8.653.925.700
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8.217.820.100	8.217.820.100	7.708.309.100

5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.217.820.100	7.217.820.100	7.059.304.700
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	350.000.000	350.000.000	238.708.700
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	212.413.500	212.413.500	154.736.900
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	437.586.500	437.586.500	255.558.800
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	745.000.000	745.000.000	668.486.500
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	175.000.000	175.000.000	126.582.500
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	320.000.000	320.000.000	300.730.300
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	250.000.000	250.000.000	241.173.700
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	373.896.700	373.896.700	277.130.100
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	101.702.800	101.702.800	66.738.150
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	99.999.800	99.999.800	52.293.150
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	172.194.100	172.194.100	158.098.800
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	7.764.707.249	7.764.707.249	7.631.669.249
5.07.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.764.707.249	7.764.707.249	7.631.669.249
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG	7.764.707.249	7.764.707.249	7.631.669.249
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.700.202.389	6.700.202.389	6.597.664.389

5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.877.200	4.877.200	2.688.600
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.200	4.877.200	2.688.600
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.593.002.505	4.593.002.505	4.497.962.505
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.593.002.505	4.593.002.505	4.497.962.505
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.557.700	154.557.700	149.248.300
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.652.000	14.652.000	14.652.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.633.200	20.633.200	19.506.200
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.132.500	7.132.500	4.075.100
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.140.000	32.140.000	31.015.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.610.000	23.610.000	23.610.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.610.000	23.610.000	23.610.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.692.636	1.049.692.636	1.049.692.636
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	205.000.000	205.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838.692.636	838.692.636	838.692.636
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.462.348	874.462.348	874.462.348
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	754.521.376	754.521.376	754.521.376

5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.940.972	84.940.972	84.940.972
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.064.504.860	1.064.504.860	1.034.004.860
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.064.504.860	1.064.504.860	1.034.004.860
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	115.560.972	115.560.972	113.560.972
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	948.943.888	948.943.888	920.443.888
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	27.462.267.274	27.462.267.274	26.132.856.544
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	27.462.267.274	27.462.267.274	26.132.856.544
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	27.462.267.274	27.462.267.274	26.132.856.544
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.510.352.081	23.510.352.081	23.258.365.481
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.750	24.999.750	18.189.750
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.930	14.999.930	10.439.930
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.820	9.999.820	7.749.820
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.233.120.126	20.233.120.126	20.263.943.526
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.233.120.126	20.233.120.126	20.263.943.526
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.621.685	514.621.685	468.706.685
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.500.400	23.500.400	23.500.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.497.885	72.497.885	72.497.885
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.840.400	114.840.400	114.840.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	15.000.000

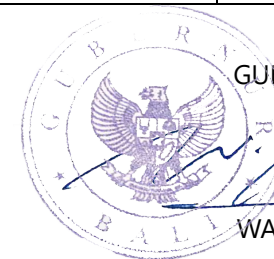
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	25.000.000	13.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.783.000	223.783.000	189.868.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	300.000.000	69.915.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	69.915.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.857.588	590.857.588	590.857.588
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	265.000.000	265.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.857.588	324.857.588	324.857.588
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.846.752.932	1.846.752.932	1.846.752.932
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	938.922.232	938.922.232	938.922.232
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.401.356	695.401.356	695.401.356
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.429.344	212.429.344	212.429.344
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.599.991.228	2.599.991.228	1.774.642.598
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.874.716.036	1.874.716.036	1.261.835.606
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	194.952.876	194.952.876	141.715.876
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	464.905.782	464.905.782	331.734.162
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	49.999.825	49.999.825	34.197.165
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	174.952.896	174.952.896	130.892.896

6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	574.952.146	574.952.146	342.513.996
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	149.999.615	149.999.615	98.371.115
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	264.952.896	264.952.896	182.410.396
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	725.275.192	725.275.192	512.806.992
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	97.476.448	97.476.448	67.084.648
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	627.798.744	627.798.744	445.722.344
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.351.923.965	1.351.923.965	1.099.848.465
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	591.971.224	591.971.224	497.351.224
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	262.065.432	262.065.432	245.041.432
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	329.905.792	329.905.792	252.309.792
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	759.952.741	759.952.741	602.497.241
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	397.476.448	397.476.448	367.216.448
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.999.875	49.999.875	38.385.375
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	199.999.970	199.999.970	110.027.970
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	112.476.448	112.476.448	86.867.448
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.430.358.877	22.430.358.877	27.631.190.305
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	22.430.358.877	22.430.358.877	27.631.190.305
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.430.358.877	22.430.358.877	27.631.190.305

8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.029.278.757	10.029.278.757	10.045.906.737
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	9.330.380
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	6.936.980
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	2.393.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.660.957.696	8.660.957.696	8.660.957.696
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.660.957.696	8.660.957.696	8.660.957.696
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.365.045	269.365.045	212.482.645
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.693.095	1.693.095	1.693.095
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.854.150	69.854.150	41.213.750
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.155.800	25.155.800	25.155.800
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	5.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	3.750.000	3.750.000	3.750.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.912.000	70.912.000	55.670.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.599.616	774.599.616	774.599.616
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000	110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.099.616	662.099.616	662.099.616
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.356.400	312.356.400	388.536.400

8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.766.400	276.766.400	336.566.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	15.660.000	32.040.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	19.930.000	19.930.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	424.952.596	424.952.596	370.344.596
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	424.952.596	424.952.596	370.344.596
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	424.952.596	424.952.596	370.344.596
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	11.328.522.836	11.328.522.836	16.747.420.284
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	11.328.522.836	11.328.522.836	16.747.420.284
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.328.522.836	11.328.522.836	16.747.420.284
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	222.429.144	222.429.144	182.865.144

8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Peman-tapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	222.429.144	222.429.144	182.865.144
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	222.429.144	222.429.144	182.865.144
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	425.175.544	425.175.544	284.653.544
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Peman-tapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	425.175.544	425.175.544	284.653.544
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	425.175.544	425.175.544	284.653.544



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.894.582	0	0	0	120.894.582	60
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	202.464.540	0	0	0	202.464.540	100
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	361.690.887	0	0	0	361.690.887	179
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.915.006	0	0	0	114.915.006	57
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	202.835.892	0	0	0	202.835.892	100
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.213.010	0	0	0	2.213.010	1
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.956.000	0	0	0	17.956.000	9
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.844.528.896	0	0	0	3.844.528.896	1.901

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	153.617.736	0	0	0	153.617.736	76
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	609.048.900	0	0	0	609.048.900	301
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.361.963.422	0	0	0	17.361.963.422	8.586
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	168.678.196	0	0	0	168.678.196	83
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Kelautan dan Perikanan	6.700.380	0	0	0	6.700.380	3
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						
		Dinas Kelautan dan Perikanan	40.633.500	1.105.620.000	0	0	1.146.253.500	567
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
		Dinas Kelautan dan Perikanan	93.999.770	6.000.000	0	0	99.999.770	49
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Pariwisata	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
		Dinas Pariwisata	2.077.500	0	0	0	2.077.500	1
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
		Dinas Pariwisata	80.046.751	0	0	0	80.046.751	40
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
		Dinas Pariwisata	117.408.748	0	0	0	117.408.748	58
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
		Dinas Pariwisata	514.559.014	0	0	0	514.559.014	254
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.076.530	0	0	0	14.076.530	7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	352.901.196	0	0	0	352.901.196	175

		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47.615.248	0	0	0	47.615.248	24
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.903.344	0	0	0	120.903.344	60
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	186.047.592	0	0	0	186.047.592	92
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.840.000	0	0	0	5.840.000	3
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95.778.800	0	0	0	95.778.800	47
2		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.249.870	0	0	0	7.249.870	100
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000	0	0	0	1.000.000	13
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	273.800	526.380.200	0	0	526.654.000	6.856
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	26.295.900	0	0	0	26.295.900	342
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	29.048.850	0	0	0	29.048.850	378
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Kesehatan	31.482.000	0	0	0	31.482.000	410
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.246.000	0	0	0	5.246.000	68
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						

		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.530.110	0	0	0	3.530.110	46
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	127.164.000	0	0	0	127.164.000	1.655
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	900.000	0	0	0	900.000	12
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	125.150.500	0	0	0	125.150.500	1.629
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	179.010.100	0	0	0	179.010.100	2.330
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	27.500.000	0	0	0	27.500.000	358
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	76.806.000	0	0	0	76.806.000	1.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.659.300	0	0	0	14.659.300	191
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.318.792	0	0	0	227.318.792	2.959
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	349.495.851	0	0	0	349.495.851	4.549
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	767.258.585	0	0	0	767.258.585	9.988
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	375.000.000	0	0	0	375.000.000	4.881
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						

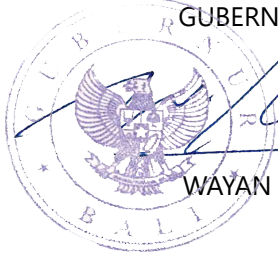
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000	0	0	0	500.000.000	6.509
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
		Sekretariat Daerah	137.476.098	0	0	0	137.476.098	1.790
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4.870.000	0	0	0	4.870.000	63
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
		Dinas Kelautan dan Perikanan	8.500.000	0	0	0	8.500.000	111
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.959.832.630	0	0	0	6.959.832.630	90.598
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.640.650	0	0	0	31.640.650	412
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
		Badan Riset dan Inovasi Daerah	52.293.150	0	0	0	52.293.150	681
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Kebudayaan	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2
		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	13.861.000	0	0	0	13.861.000	13
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
		Dinas Kebudayaan	1.378.938.208	0	0	0	1.378.938.208	1.254
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
		Dinas Kebudayaan	336.500.000	0	0	0	336.500.000	306
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
		Dinas Kebudayaan	124.999.900	0	0	0	124.999.900	114
		PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI						
		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	151.055.550	0	0	0	151.055.550	137
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	370.344.596	0	0	0	370.344.596	337

5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.624.200	0	0	0	250.624.200	123
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.000.000.000	3.831.593.711	0	0	4.831.593.711	2.379
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.002.129.220	0	0	0	1.002.129.220	493
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.753.910	0	0	0	14.753.910	7
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.501.450	0	0	0	15.501.450	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
		Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
		Satuan Polisi Pamong Praja	37.476.448	0	0	0	37.476.448	18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
		Dinas Perhubungan	13.276.790	0	0	0	13.276.790	7
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
		Dinas Perhubungan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	49
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
		Dinas Perhubungan	217.150.340	0	0	0	217.150.340	107
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							


		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	510.000	16.644.000	0	0	17.154.000	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
		Dinas Kelautan dan Perikanan	469.284.796	0	0	0	469.284.796	231
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Sekretariat Daerah	247.349.060	0	0	0	247.349.060	122
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
		Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.751.100	275.979.200	0	0	300.730.300	148
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.693.095	0	0	0	1.693.095	1
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	172.865.144	10.000.000	0	0	182.865.144	90
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.821.900	0	0	0	1.821.900	75
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	426.624.000	0	0	0	426.624.000	17.513
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	209.579.144	0	0	0	209.579.144	8.603
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28.292.800	0	0	0	28.292.800	1.161
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.529.770	0	0	0	41.529.770	1.705
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56.200.000	0	0	0	56.200.000	2.307
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	399.999.900	0	0	0	399.999.900	16.420
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						

		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.673.414	0	0	0	173.673.414	599
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	133.195.744	0	0	0	133.195.744	459
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Sekretariat Daerah	140.450.000	0	0	0	140.450.000	484
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
		Sekretariat Daerah	24.990.000	0	0	0	24.990.000	86
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
		Sekretariat Daerah	33.285.330	0	0	0	33.285.330	115
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Sekretariat DPRD	7.500.000	0	0	0	7.500.000	26
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
		Sekretariat DPRD	849.887.406	0	0	0	849.887.406	2.929
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.462.930	0	0	0	23.462.930	81
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.368.940	0	0	0	48.368.940	167
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.778.500	0	0	0	8.778.500	30
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	510.000	347.329.000	0	0	347.839.000	1.199
		Badan Pendapatan Daerah	2.660.000	0	0	0	2.660.000	9
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.757.169.262	0	0	0	2.757.169.262	9.503
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
		Badan Pendapatan Daerah	422.614.480	0	0	0	422.614.480	1.457
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.539.720	0	0	0	6.539.720	23
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63.784.848	0	0	0	63.784.848	220
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
		Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.120.000	70.400.000	0	0	79.520.000	274
		Badan Penghubung	2.688.600	0	0	0	2.688.600	9
		Inspektorat	5.100.000	64.815.000	0	0	69.915.000	241
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
		Inspektorat	34.197.165	0	0	0	34.197.165	118
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	274.653.544	10.000.000	0	0	284.653.544	981



 GUBERNUR BALI,



 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran X : Peraturan Daerah Provinsi Bali

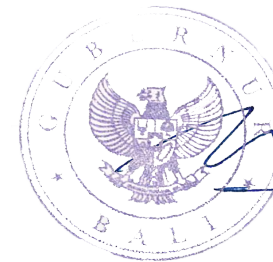
Nomor : 11 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan IV/e						4			4
Golongan IV/d	1	10				17			28
Golongan IV/c		25	1			97			123
Golongan IV/b		4	140	1		1.468	5		1.618
Golongan IV/a			88	209		1.467	38		1.802
JUMLAH GOLONGAN IV	1	39	229	210	0	3.053	43	0	3.575
Golongan III/e									0
Golongan III/d			23	391		976	425		1.815
Golongan III/c				141		711	338		1.190
Golongan III/b				40		540	701		1.281
Golongan III/a				6		343	1.196		1.545
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	23	578	0	2.570	2.660	0	5.831
Golongan II/e									0
Golongan II/d						38	425		463
Golongan II/c						142	444		586
Golongan II/b							205		205
Golongan II/a							28		28
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	180	1.102	0	1.282

Golongan I/e										0
Golongan I/d								33		33
Golongan I/c								4		4
Golongan I/b								9		9
Golongan I/a										0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Golongan IX									40	40
JUMLAH GOLONGAN IX	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Golongan VIII									1	1
JUMLAH GOLONGAN VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	1	39	252	788	0	5.803	3.851	41	10.775	



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2020	Perkiraan Penambahan Tahun 2021	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2021	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		27.168.286.627,00	-	26.514.230.527,00	654.056.100,00
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		302.995.700,00	-	31.705.100,00	271.290.600,00
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		439.530.500,00	-	56.765.000,00	382.765.500,00
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		26.173.418.555,00	-	26.173.418.555,00	-
	d. Piutang Pajak Air Permukaan		252.341.872,00	-	252.341.872,00	-
	e. Piutang Pajak Rokok		-	-	-	-
2	Piutang Retribusi		92.570.985,00	-	-	92.570.985,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,03	-	-	0,03
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		25.974.965.895,00	-	-	25.974.965.895,00
5	Piutang Lainnya		405.612.337,10	-	-	405.612.337,10
	Jumlah		53.641.435.844,13	-	26.514.230.527,00	27.127.205.317,13



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XII

<p>DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022</p>

PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2004	PT. BPD Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besarannya Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali 	Uang	Rp644.912.000.000,00	Rp614.912.000.000,00	Rp30.000.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp110.000.000.000,00	Rp158.436.630.618,70		
2	2010	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besarannya Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali 	Uang	Rp135.000.000.000,00	Rp120.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp1.279.822.630,00		

No	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyeretaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyeretaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyeretaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyeretaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyeretaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
3	1974	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyeretaan Modal Daerah 	Uang	Rp5.282.769.658,00	Rp5.282.769.658,00		Rp5.282.769.658,00				
4	2003	PT. Puri Raharja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyeretaan Modal Daerah 	Uang	Rp8.736.000.000,00	Rp8.736.000.000,00		Rp8.736.000.000,00		Rp23.182.430,00		
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyeretaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyeretaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyeretaan Modal Daerah 	Uang	Rp1.150.000.000,00	Rp1.150.000.000,00		Rp1.150.000.000,00		Rp173.054.110,00		
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tol	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyeretaan Modal Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyeretaan Modal Daerah 	Uang	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00		Rp100.000.000.000,00				
Jumlah					Rp895.080.769.658,00	Rp850.080.769.658,00	Rp45.000.000.000,00	Rp1.404.992.769.658,00	Rp125.000.000.000,00	Rp160.712.689.788,70	Rp0,00	Rp0,00



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2020	Perkiraan Penambahan Tahun 2021	Perkiraan Pengurangan Tahun 2021	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap Rusak Berat	Aset Lainnya	54.009.355.264,79	7.764.285.278,66	19.213.139.986,00	42.560.500.557,45
2	Aset Tetap Yang Akan Di Hibahkan	Aset Lainnya	226.742.689.499,00	-	2.624.730.000,00	224.117.959.499,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Aset Lainnya	6.936.434.636,66	-	-	6.936.434.636,66
Jumlah			287.688.479.400,45	7.764.285.278,66	21.837.869.986,00	273.614.894.693,11


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIV

**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN
2022**

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor : 11 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

1) Tahun Pertama

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
Jumlah								



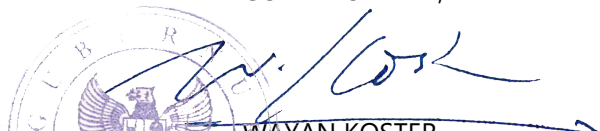
GUBERNUR BALI,


WAYAN KOSTER

2) Tahun Kedua

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER




LAMPIRAN XV


DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XV : Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendanai kegiatan Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Perda Nomor...Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024	250.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00
Jumlah			250.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

